

**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MOROWALI**



BUKU I P-RKPD

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024**



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan dalam asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program kegiatan prioritas sesuai dengan sasaran pembangunan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi Pemerintah dan kondisi Daerah, sesuai hasil Evaluasi yang sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.**

Pasal 1

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 023) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH
BAB III	:	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP

Penutup

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Juli 2024
Plh. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 29 Juli 2024
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR 024

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina, Tingkat 1, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

**LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2024	II-26
2.2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Semster I	II-26
2.2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci.....	II-70
2.3 Realisasi APBD Semester I Tahun 2024.....	II-84
2.4 Capaian Pelaksanaan Program.....	II-90
2.5 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-143
2.6 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-146

2.6.1	Urusan Pendidikan.....	II-146
2.6.2	Urusan Kesehatan.....	II-147
2.6.3	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.	II-147
2.6.4	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman.....	II-147
2.6.5	Urusan Sosial.....	II-148
2.6.6	Urusan Tenaga Kerja.....	II-148
2.6.7	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	II-148
2.6.8	Urusan Pangan.....	II-149
2.6.9	Urusan Lingkungan Hidup.....	II-149
2.6.10	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil.....	II-149
2.6.11	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa...	II-150
2.6.12	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....	II-150
2.6.13	Urusan Perhubungan.....	II-150
2.6.14	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah...	II-151
2.6.15	Urusan Penanaman Modal.....	II-151
2.6.16	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga.....	II-151
2.6.17	Urusan Perpustakaan.....	II-152
2.6.18	Urusan Kelautan Dan Perikanan.....	II-152
2.6.19	Urusan Pariwisata.....	II-152
2.6.20	Urusan Pertanian.....	II-153
2.6.21	Urusan Perdagangan.....	II-153
2.6.22	Urusan Perindustrian.....	II-153

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-1
3.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	III-4
3.1.3 PDRB Perkapita.....	III-5
3.1.4 Ketenagakerjaan.....	III-7
3.1.5 Kemiskinan.....	III-8
3.1.6 Ketimpangan Pendapatan.....	III-10
3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia.....	III-12
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-15
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-15
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-17

3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-19
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali 2024 – 2026.....	IV-1
4.2	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	IV-5
4.2.1	Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	IV-5
4.2.2	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional Tahun 2025	IV-10
4.3	Telahaan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	IV-28
4.3	Inovasi Daerah.....	IV-28
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1	Rencana Program Prioritas.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH...	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1
7.1	Kaidah Pelaksanaan.....	VII-1
7.2	Kesimpulan.....	VII-4

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Jarak setiap kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.....	II-3
Tabel 2.2	Potensi Bencana Dan Dampak Yang Ditimbulkan Di Kabupaten Morowali	II-8
Tabel 2.2	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Morowali, Tahun 2021-2023.....	II-21
Tabel 2.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2023.....	II-22
Tabel 2.4	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	II-24
Tabel 2.5	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Morowali, Tahun 2023.....	II-25
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan I RPD Tahun 2024.....	II-32
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan II RPD Tahun 2024.....	II-47
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan III RPD Tahun 2024.....	II-57
Tabel 2.9	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan IV RPD Tahun 2024.....	II-62
Tabel 2.10	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan V RPD Tahun 2024.....	II-68
Tabel 2.11	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024.....	II-71
Tabel 2.12	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024.....	II-74
Tabel 2.13	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024.....	II-83
Tabel 2.14	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	II-85
Tabel 2.15	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	II-87
Tabel 2.16	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Kabupaten Morowali Tahun 2023.....	II-89
Tabel 2.17	Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2023.....	II-91

Tabel 3.1	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	III-2
Tabel 3.2	PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022..	III-3
Tabel 3.3	Perubahan Target Indikator Makro Nilai PDRB ADHK dan ADHB pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-4
Tabel 3.4	Target Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-5
Tabel 3.5	Target Indikator Makro PDRB Perkaapita pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-7
Tabel 3.6	Target Indikator Makro Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-8
Tabel 3.7	Target Indikator Makro Persentase Penduduk Miskin pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-10
Tabel 3.8	Target Indikator Makro Indeks Gini pada RKPD Perubahan Tahun 2024.....	III-12
Tabel 3.9	IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-14
Tabel 3.10	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-15
Tabel 3.11	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-17
Tabel 3.12	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-18
Tabel 3.13	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-20
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali 2024 – 2026.....	IV-4
Tabel 4.2	Target Indikator Makro pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2025.....	IV-6
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah kabupaten Morowali Tahun 2025.....	IV-6
Tabel 4.4	Keselarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	IV-11
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	IV-14
Tabel 4.6	Program Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	IV-16
Tabel 4.7	Inovasi Pembanguna Daerah Tahun 2024.....	IV-30

Tabel 5.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Kab. Morowali Tahun 2025.....	V-2
Tabel 6.1	Matriks Indikator dan Target Kinerja Utama Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	VI-1
Tabel 6.2	Matriks Indikator dan Target Kinerja Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	VI-3
Tabel 6.3	Matriks Indikator dan Target Kinerja Pelayanan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	VI-6
Tabel 6.4	Matriks Indikator dan Target Kinerja Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	VI-16

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1.2	Keterkaitan Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya.....	I-7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kab. Morowali.....	II-1
Gambar 2.2	Dampak ancaman bencana masing - masing kecamatan di Kabupaten Morowali	II-9
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-5
Gambar 3.2	PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2018-2022 dan Prediksi PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2023-2024 (juta rupiah).....	III-6
Gambar 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Morowali (%) 2018- 2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024.....	III-7
Gambar 3.4	Jumlah (Ribuan Orang) dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	III-9
Gambar 3.5	Indeks Gini Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-11
Gambar 3.6	Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	III-12
Gambar 3.8	IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-14

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 2.1	Persentase Penduduk Miskin Kab. Moroawali Tahun 2019-2023..... II-27
Grafik 2.2	Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Se-Sulteng Tahun 2023..... II-28
Grafik 2.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Morowali Tahun 2019-2023..... II-29
Grafik 2.4	Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Morowali Tahun 2019-2023..... II-30
Grafik 2.5	Indeks Gini Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023..... II-31
Grafik 2.6	IPEI Kabupaten Morowali Tahun 2017-2021..... II-33
Grafik 2.7	IPM Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023..... II-34
Grafik 2.8	IPM Menurut Kab./Kota Se-Sulteng Tahun 2023..... II-35
Grafik 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Tahu 2019-2023..... II-36
Grafik 2.10	Pertumbuhan Ekonomi Persektor Kab. Morowali Tahun 2022-2023..... II-37
Grafik 2.11	Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023..... II-38
Grafik 2.12	Inflasi Kabupaten Morowali (Januari s/d Juni) Tahun 2024..... II-39
Grafik 2.13	TPT Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023..... II-40
Grafik 2.14	TPAK Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023..... II-41
Grafik 2.15	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Tahun 2019 s.d 2023..... II-42
Grafik 2.16	Rincian Obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022..... II-43
Grafik 2.17	Realsiasi Investasi Kabupaten Morowali tahun 20191 s.d 2023..... II-44
Grafik 2.18	PMTB Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 (dalam Milyar Rupiah)..... II-44
Grafik 2.19	IRB Kabupaten Morowali tahun 2021-2023..... II-49
Grafik 2.20	IKM Kabupaten Morowali tahun 2021-2023..... II-51
Grafik 2.21	SAKIP Kabupaten Morowali tahun 2019-2023..... II-52
Grafik 2.22	Nilai SPI dan Kompnen PERhitungan Kab. Morowali Tahun 2021-2023..... II-53

Grafik 2.23	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-54
Grafik 2.24	Nilai SPBE Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-54
Grafik 2.25	Opini BPK atas LHP Keuangan Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-55
Grafik 2.26	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Morowali Tahun 2021-2022.....	II-56
Grafik 2.27	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-60
Grafik 2.28	IKLH Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-61
Grafik 2.29	Jumlah Kriminal Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023	II-64
Grafik 2.30	IPG Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-65
Grafik 2.31	IKD Kabupaten Morowali Tahun 2023.....	II-66
Grafik 2.32	IRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-67

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat disusun. Penyusunan P-RKPD merupakan tindak lanjut amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) menjadi pedoman penyusunan P-RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun P-RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.



Ruang lingkup penyusunan P-RKPD Tahun 2024 meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Tahun 2024. Penyusunan P-RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal P-RKPD, rancangan P-RKPD, rancangan akhir P-RKPD dan penetapan P-RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan P-RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa Dokumen P-RKPD ini belum sempurna dalam penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu, kami tetap mengharapkan berbagai kritik dan saran sebagai masukan bagi

pemerintah daerah guna penyempurnaan Dokumen ini pada khususnya dan bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Morowali pada umumnya.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Morowali serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Morowali.

Plh. BUPATI MOROWALI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Yusman', is written over a long, horizontal, slightly wavy line.

Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si

The background of the page features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, creating a modern and dynamic visual effect. These shapes are primarily rectangular with rounded corners and are arranged in a way that suggests movement and depth.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor : 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. P-RKPD Tahun 2024 disusun untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Morowali guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, melalui sinergi dan sinkronisasi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat 5 menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) s/d (9) disebutkan Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan dan/atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 di susun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

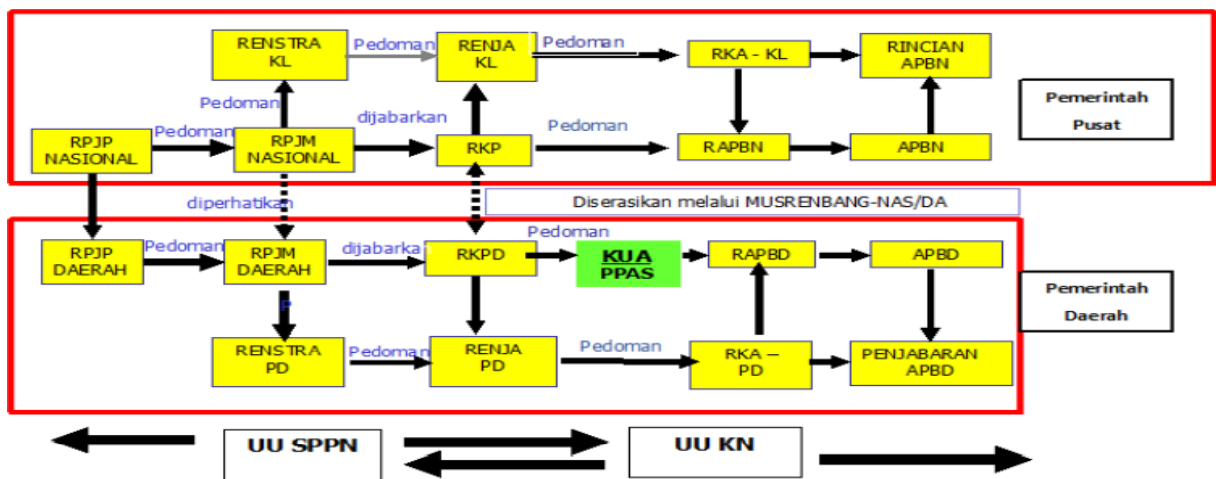
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 13 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 Nomor 140);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0136);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 35 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran daerah Kabupaten Morowali tahun 2023 Nomor: 025);
27. Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor: 025);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, Perubahan RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Perubahan RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) P-RPJMD/RPD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Perubahan Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Selain itu Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 tetap memperhatikan hasil Review APIP Inspektorat Daerah. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Sumber : diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.2
keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya

Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya,

adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
2. Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah/ RPD yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
3. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
4. Perubahan RKPD nantinya dijabarkan ke dalam Perubahan RAPBD dengan berpedoman juga kepada Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2024, Perubahan RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2005 - 2025, dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Selain itu kedudukan Perubahan RKPD Kabupaten Morowali tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah Kedudukan RKPD Morowali.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 yaitu untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan daerah Kabupaten Morowali sebagai akibat dari adanya beberapa perubahan asumsi yang sudah ditetapkan, sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2024. Sedangkan Tujuan Perubahan RKPD 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah, antar sektor pembangunan, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Sebagai Dasar bagi Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) terutama indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

1.5 Sistematika Dokumen P-RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan memuat uraian tentang : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2024, yang menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Morowali Tahun 2024 dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya.
- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah memuat uraian tentang : Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tahun 2024 serta Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah memuat uraian tentang perubahan Tujuan, Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024.
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah memuat uraian tentang perubahan rencana program dan kegiatan masing – masing urusan pemerintahan daerah beserta Perangkat Daerah pengampunya di sertai perubahan kerangka pendanaan untuk Tahun Anggaran 2024.
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memaut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan dengan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB VII Penutup

The background of the page is decorated with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue. These shapes, which resemble stylized chevrons or steps, are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, primarily concentrated along the top and bottom edges of the page.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

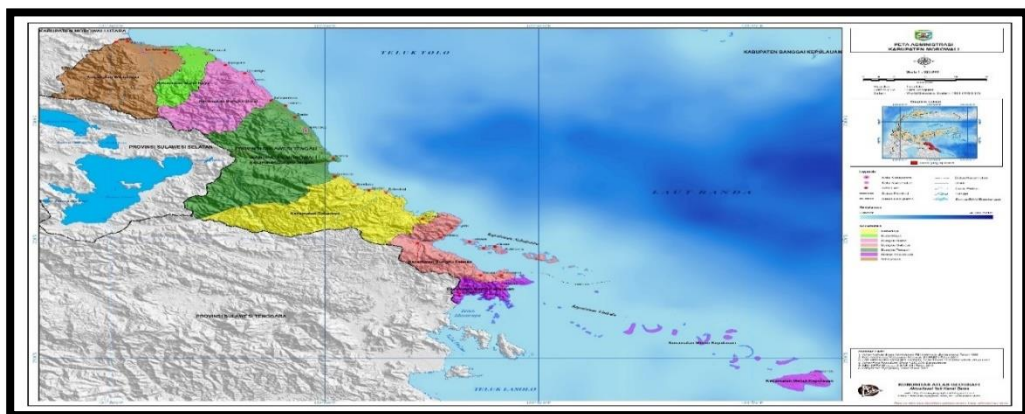
2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografi

2.1.1.1.1. Luas dan Batas wilayah administrasi

Kabupaten Morowali merupakan Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 dengan luas wilayah 15.490,12 km² atau 22,77 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Ibukota Kabupaten di Kolonodale. Dengan terbentuknya dan berpisahnya Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara, maka luas wilayah Kabupaten Morowali terjadi perubahan menjadi 5.472,00 km² atau 8,85 persen dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan terluas 1.080,98 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yang hanya memiliki luas 223,63 km². selengkapnya tertera pada peta administratif Kabupaten Morowali pada Gambar 2.1.



Sumber : <https://sulteng.bpk.go.id/peta-administrasi-kabupaten-morowali>

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kab. Morowali



Jumlah Kecamatan Kabupaten Morowali sebanyak 10 kecamatan yang meliputi Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan dan Pada tahun 2023 dilakukan pemekaran Wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan. Kecamatan Sombori Kepulauan merupakan pemekaran dari 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Menui Kepulauan; dan 3 (tiga) Desa di Kecamatan Bungku Selatan. Kecamatan Sombori Kepulauan memiliki wilayah seluas 267,78 Km². Cakupan wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan terdiri atas 13 (tiga belas) Desa meliputi :

1. Desa Tanjung Harapan seluas 12,90 Km² ;
2. Desa Matano seluas 13,79 Km²;
3. Desa Tanona seluas 7,10 Km²;
4. Desa Tanjung Tiram seluas 9,00 Km²;
5. Desa Matarape seluas 20,03 Km²;
6. Desa Mbokita seluas 7,07 Km²;
7. Desa Dongkalan seluas 13,01 Km²;
8. Desa Pulau Tengah seluas 3,2 Km²;
9. Desa Masadian seluas 6,03 Km²;
10. Desa Pulau Tiga seluas 3,85 Km²;
11. Desa La Lemo seluas 48,09 Km²;
12. Desa Lamontoli seluas 118,70Km²; dan
13. Desa Pulau Dua Darat seluas 5,01 Km².

Adapun luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jarak setiap Kecamatan dengan ibukota kabupaten di Kabupaten Morowali selengkapnya tertera pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Jarak setiap kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023

Kecamatan	Luas (Km2)	%	Desa	Kel.	Ibu Kota Kecamatan	Jarak (Mill Laut/ Km)
Menui Kepulauan	127.65	2.33	13	1	Ulunambo	99
Bungku Tengah	725.57	13.26	13	6	Marsaoleh	0
Bungku Selatan	232.1	4.24	23	0	Kaleroang	64
Bahodopi	1,080.98	19.75	12	0	Bahodopi	41
Bungku Pesisir	867.29	15.85	10	0	Lafeu	75
Bungku Timur	387.23	7.08	10	0	Kolono	18
Bungku Barat	758.93	13.87	10	0	Wosu	27
Bumi Raya	504.77	9.22	13	0	Bahonsuai	48
Witaponda	519.7	9.50	9	0	Laantula Jaya	61
Sombori Kepulauan	267.78	4.89	13	0	Tanjung Harapan	-
Jumlah	5,472.00	100,00	126	7		

Sumber : Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

2.1.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis

Kabupaten Morowali terletak antara 01° 31'12" Lintang Selatan dan 03°46' 48" Lintang Selatan serta antara 121°02' 24" Bujur Timur dan 123°15'36" Bujur Timur. Jika ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen) berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya (11,45 persen) merupakan pulau-pulau kecil terutama bagian paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil.

Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan wilayah kepulauan.

Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Wilayah daratan Pulau Sulawesi meliputi Kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, dan Bungku Pesisir merupakan kecamatan yang ada di sekitar wilayah pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam dominan pada pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan sumberdaya tambang mineral, serta sumberdaya alam pendukung seperti tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan darat; 2) Wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan merupakan daerah yang relatif didominasi oleh potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Dari jumlah 126 (seratus dua puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan tersebut terdapat 110 desa berada di wilayah pesisir dan pulau, serta 23 desa dikategorikan sebagai desa non pesisir (BPS Kabupaten Morowali, 2019). Di antara 110 desa pesisir dan pulau tersebut, terdapat 45 desa yang berada di wilayah pulau-pulau kecil dan 5 desa yang berada di wilayah pesisir, yang tersebar di dua kecamatan yakni Menui Kepulauan dan Bungku Selatan. Sisanya merupakan desa-desa pesisir yang berada di wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali. Dari 23 desa non pesisir, terdapat 5 desa yang berada pada kondisi topografi wilayah yang dikategorikan memiliki kelerengan, dan 18 desa non pesisir pada kondisi topografi datar, terutama desa-desa yang berada di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

2.1.1.1.3. Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl). Kondisi topografi Kabupaten Morowali bervariasi, sebagian besar (52,74 persen).

berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpl, kemudian seluas 33,74 persen berada pada ketinggian antara 200-500 meter dpl, dan selebihnya seluas 13,52 persen berada pada ketinggian di bawah 100 meter dpl. Tingkat kelerengannya, yaitu seluas 52,30 persen kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam-sang at curam), 11,70 %luas wilayah dengan kemiringan di bawah 2 persen (datar agak landai), 12,56 % luas wilayah dengan kemiringan 3 – 15 % dan 23,30 % luas wilayah dengan kemiringan antara 16 - 40 % (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 %. Namun demikian, berdasarkan elevasi (ketinggian tempat) setiap ibukota kecamatan, dataran ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali seluruhnya berada pada ketinggian 0 m - 100 m dpl (100 persen). Ini berarti bahwa umumnya, ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali berada pada wilayah pesisir dan pulau kecil dengan kondisi topografi yang datar.

2.1.1.1.4. Geologi

Secara geologis, wilayah Kabupaten Morowali tersusun atas beberapa jenis batuan yaitu: Batuan Mollase, Batuan kapur, Batuan skiss, Batuan basic, Batuan ultra basic, dan Batuan sedimen. Sedangkan dari sisi geomorfologinya, wilayah ini merupakan beberapa bentukan lahan (landform) yaitu: - Aluvial (A) tersebar di dataran rendah (0 - 3 persen), dijumpai di sekitar sungai besar; - Marine (M) tersebar di wilayah agak cekung di sepanjang pantai; - Vulkanik (V) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung; - Tektonik dan struktural (T) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung.

Berikut adalah uraian tentang kondisi aktual eksplorasi dan produksi bahan galian yang terdapat di daerah ini tersebut (Uno, 2010): di wilayah Sulawesi Tengah, tiga jenis bahan galian utama yang telah nampak survey dan produksinya adalah minyak, gas bumi dan nikel. Kegiatan ekplorasi minyak bumi dilakukan di wilayah perairan Morowali (Teluk Tomori) sedangkan Gas bumi terletak di Senoro (Sinorang) Kabupaten Banggai dan telah melakukan produksinya. Adapun nikel yang terdapat di wilayah Banggai dan Morowali (menerus sampai ke wilayah Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Tenggara) sampai saat ini masih dalam tahapan eksplorasi. Berdasarkan data statistik Tahun 2006, produksi minyak dan gas bumi telah berlangsung sejak Tahun 2005, dengan nilai produksi Tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp 63,2 milyar dan Rp 225,1 milyar, dengan laju pertumbuhan sebesar 158,79 persen. Dengan persentase kontribusi masih senilai 1,16 persen jika nilai ini digabungkan dengan produksi pertambangan bahan galian mineral yang berkontribusi sebesar 1,75 persen, maka total kontribusi sektor pertambangan adalah 2,91 persen, masih rendah dibandingkan dengan sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar yaitu 44,80 persen. Kegiatan penambangan nikel sebetulnya berskala besar telah dan sedang dilakukan bahkan dengan melakukan perubahan fungsi lahan di mana sebagian lahan permukiman (umumnya transmigrasi) dan pertanian menjadi wilayah konsesi tambang sebagaimana terjadi di Kecamatan Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bahodopi dan Bungku Selatan.

2.1.1.1.5. Hidrologi

Beberapa sumber air permukaan terutama sungai-sungai kecil tersebar dari Kecamatan Wita Ponda sampai Kecamatan Bungku Pesisir. Sumber air sungai tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Morowali termaksud dalam wilayah sungai strategis nasional.

Adapun wilayah sungai tersebut adalah wilayah sungai Laa-Tambalako (1045,6Ha), yang meliputi daerah sungai laa (2.875,6 Ha), DAS Tirongan, DAS Salato, DAS Morowali, DAS Sumare (237,5Ha), DAS Bahombelu dan DAS Bahodopi (246,87Ha). Ketersediaan air permukaan dan air tanah juga dipengaruhi oleh kondisi hutan. Penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan nikel, serta konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah



besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai.

Berdasarkan peta potensi penyebaran hidrologi yang merujuk kepada peta Geologi Regional menunjukkan bahwa sekitar 40 persen wilayah Kabupaten Morowali termasuk dalam zona akuifer produktif dengan penyebaran luas artinya memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga maupun industri. Sisanya 60 persen lagi termasuk dalam zona akuifer dengan produktivitas kecil yang berarti memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah rendah tetapi dalam pemanfaatannya dapat diusahakan melalui teknologi geolistrik dan pemboran dengan diameter besar. Terdapat sejumlah sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar di Kabupaten Morowali, karena menjadi daerah resapan air (catchment area). Beberapa potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan.

Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian risiko bencana meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi atau memiliki potensi terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi. Bencana yang pernah terjadi dilihat berdasarkan DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi dikaji berdasarkan kondisi wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya yang terdapat pada metodologi pengkajian risiko bencana dengan menggunakan teknologi SIG. Tidak menutup kemungkinan potensi bencana lain dapat terjadi di Kabupaten Morowali mengingat faktor-faktor kondisi daerah sehingga analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis untuk memetakan potensi bencana berdasarkan faktor-faktor kondisi daerah.

Jumlah potensi bencana di Kabupaten Morowali berdasarkan sejarah kebencanaan dan analisis menggunakan pendekatan SIG dikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan di daerah. Bencana-bencana yang berpotensi di Kabupaten Morowali terdiri dari banjir, banjir bandang, tanah

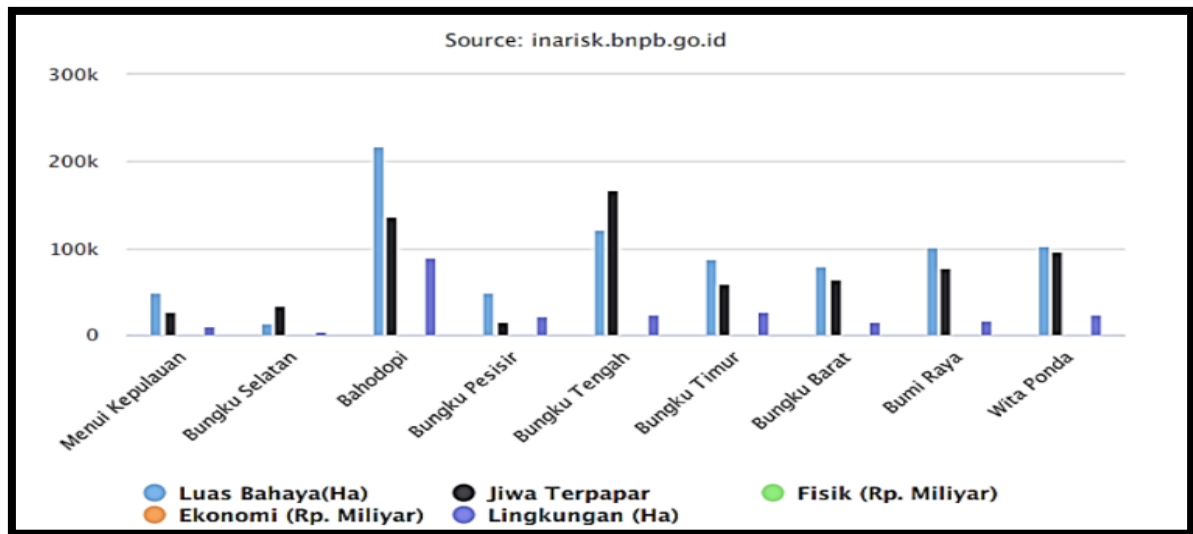
longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Ke sembilan potensi bencana di Kabupaten Morowali tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana Kabupaten Morowali untuk tahun 2022 sampai tahun 2027. Potensi bencana merupakan kemungkinan terjadi suatu bencana dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang pernah terjadi. Potensi tersebut dilihat dari bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah dan kemungkinan terjadi bencana lainnya. Penentuan potensi bencana merupakan langkah awal yang penting dilakukan dalam pengkajian risiko bencana. Dari analisa terhadap bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Morowali dan potensi risiko bencana berdasarkan data yang di keluarkan oleh BNPB , maka terdapat 9 (sembilan) jenis potensi bencana dan dampak yang timbulkan di kabupaten Morowali , bisa di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Potensi Bencana Dan Dampak Yang Ditimbulkan Di Kabupaten Morowali

Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp. Miliar)	Ekonomi (Rp. Miliar)	Lingkungan (Ha)
Gempabumi	129,443	78,438	398.663	552.542	0
Tsunami	8,243	19,988	69.511	8.092	430
Banjir	16,961	59,670	332.73	375.117	434
Banjir Bandang	6,340	3,307	21.157	114.674	57
Tanah Longsor	237,658	15,289	108.982	436.409	85,483
Kebakaran Hutan & Lahan	38,279	0	0	529.85	3,273
Kekeringan	303,705	162,098	0	1,012.25	138,138
Cuaca Ekstrim	39,127	128,144	1,145.204	839.344	0
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	16,961	59,670	332.73	375.117	434

Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Sementara dampak yang ditimbulkan akibat bencana terhadap luas bahaya, Jiwa terpapar, fisik, ekonomi dan lingkungan per kecamatan di wilayah kabupaten Morowali dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.2
Dampak ancaman bencana masing - masing kecamatan
di Kabupaten Morowali

2.1.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Morowali merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sehingga wilayah tergolong iklim A atau sangat basah. Karena itu, wajar jika daerah ini memiliki sungai yang cukup banyak sebagai sumber daya air yang potensial di dimanfaatkan untuk pengairan.

Komponen yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi aliran air permukaan (run off) pada lokasi kegiatan antara lain curah hujan, bentang lahan, jenis tanah dan vegetasi sebagai tutupan lahan. Curah hujan sebagai input utama dalam besarnya aliran air permukaan di daerah tangkapan air (catchment area), daerah tangkapan air merupakan fungsi dari vegetasi yang dapat menyimpan air hujan yang turun pada daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Curah hujan tertinggi pada bulan November dengan Curah Hujan 333 mm³ dengan selama 11 hari hujan, Selanjutnya diikuti dengan Bulan Maret dengan Curah Hujan 332 mm³ selama 16 hari hujan, pada Bulan Mei masa paling lama hari hujan. Sedangkan, Curah Hujan paling sedikit yaitu bulan September dengan Curah Hujan 52 mm³ selama 5 hari hujan, disusul pada bulan Oktober dengan Curah Hujan 77 mm³ selama 7 hari hujan.

2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah sebagian besar digunakan untuk sawah, sementara lahan kering digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perumahan dan bangunan lainnya. Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali didominasi oleh lahan Kehutanan seluas kemudian Lahan Pertanian dan Perkebunan.

2.1.1.1.8. Peruntukkan Lahan

Peruntukan Lahan di Kabupaten Morowali diuraikan pada Rencana Pola Ruang Kota mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Morowali yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2.1.1.1.8.1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Luas kawasan lindung tersebar di wilayah Kabupaten Morowali seluas $\pm 99.576,41$ ha yang terdiri atas hutan lindung, kawasan lindung lainnya, sempadan sungai, sempadan pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039.

Kawasan lindung terdapat Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan. Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dan taman bawah laut berupa terumbu karang terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan cagar alam geologi, berupa kawasan keunikan bentang alam karst yang terdapat dikawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Menui Kepulauan. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah kawasan imbuan Cekungan air tanah pada CAT Tonoa di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Bungku Barat dan kawasan sekitar mata air terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Kawasan cagar budaya terdiri atas : a. kawasan cagar budaya Masjid Tua Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; b. kawasan cagar budaya Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah; dan c. Kawasan cagar budaya Goa di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.

2.1.1.1.8.2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Adapun rincian luas kawasan budidaya yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- b. Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 40.207,91 hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur,

Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;

- d. Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap kecamatan;
- e. Kawasan hortikultura terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan di setiap Kecamatan;
- f. Kawasan perkebunan terdiri atas kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan;
- g. Kawasan peternakan terdiri atas : (a). kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak terdapat di setiap kecamatan; (b). rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi; (c). rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat; (d). rencana pengembangan kawasan Budidaya Ternak terdapat di setiap Kecamatan; (e). rumah Pemotongan Hewan terdapat di kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi, (f). rencana Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir; (g). pasar dan terminal hewan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (h). rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir;
- h. Kawasan perikanan tangkap (a). seluruh perairan Kabupaten Morowali yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap; (b). Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan; dan (c). rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Kepulauan Menui dan sekitarnya di Kecamatan Menui Kepulauan, Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda, dan Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya;
- i. Kawasan perikanan budidaya laut terdiri atas: (a). perikanan budidaya keramba, komoditi ikan kerapu, ikan kuwe, dan lobster di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi,

- Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan; (b). rencana pengembangan perikanan budidaya keramba di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan (c). perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- j. Kawasan budidaya perikanan air Payau terdiri atas: (a). tambak udang, ikan bandeng dan rumput laut terdapat di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan (b). kawasan budidaya perikanan tambak yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas ± 26 (dua puluh enam) hektar di Kecamatan Bahodopi;
- k. Kawasan budidaya perikanan kolam air tawar berupa kolam air tawar dengan komoditi ikan lele, ikan nila dan ikan mas, ikan patin terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya Kecamatan Bungku Barat Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi;
- l. Kawasan Pertambangan Mineral Logam meliputi: (a). pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat; (b). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (c). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi konversi seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (d). rencana WUP mineral logam terdapat di setiap kecamatan; dan (e). Wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi;

- m. Kawasan Pertambangan bukan Logam meliputi rencana WUP mineral bukan logam yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- n. Kawasan Pertambangan Batuan meliputi: (a). pertambangan batuan terdapat di Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kecamatan Bungku Selatan; dan (b). Wilayah pertambangan rakyat (WPR) direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundangundangan, dengan komoditi tambang rakyat terdiri atas Pasir batu di setiap kecamatan, Batu kali di setiap kecamatan, Batu gunung di setiap kecamatan, Tanah liat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Tengah;
- o. Kawasan industri besar terdiri atas: (a) Kawasan Industri Logam; (b) Kawasan Industri perkebunan; (c) Kawasan Industri (KI) Morowali terdapat di Kecamatan Bahodopi; (d) kawasan Industri (KI) Morowali yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas 30.39 hektar di Kecamatan Bahodopi, dan kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 6,35 hektar; (e) pengembangan kawasan industri pengolahan hasil tambang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir; dan (f) rencana industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- p. Kawasan sentra industri kecil dan menengah merupakan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan kegiatan industri terdiri atas: (a). industri pengolahan hasil pertanian pangan berupa Sentra Industri Kecil Menengah (Sikim) Pangan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (b). industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas: (a). industri pengolahan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Witaponda; dan (b). rencana industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bumi Raya;

- q. Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas : (a). industri meubel kayu terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan (b). rencana industri meubel rotan di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bungku Tengah;
- r. Industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas : (a). Industri pengolahan ikan di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Witaponda;
- s. Kawasan pariwisata alam pegunungan/ hutan terdiri atas: (a). Wisata Goa terdiri atas: 1). Goa Petakoa di Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda; 2). Goa Fafompogaro, Goa Kotaeya, Goa Tengkorak di Kecamatan Bungku Barat; 3). Goa Kumapa, Goa Tambeanpana Api, Goa Fumbunsanua di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Goa Berlian, Goa Alo, Kecamatan Menui Kepulauan; (b). Wisata Puncak/Pegunungan terdiri atas: 1). Puncak Fafobaho di Kecamatan Bungku Tengah; 2). Puncak Mateantina, Puncak Unsongi di Kecamatan Bungku Timur; dan 3). Puncak Kayangan, Puncak Narita Kecamatan Menui Kepulauan. (c). Wisata air terjun terdiri atas: 1). Kecamatan Bungku Barat Air Terjun Batu Kapal; 2). Kecamatan Bungku Tengah: Air Terjun Mempueno, Air Terjun Sampa laa, Air Terjun Veranomata, Permandian Tompaika, Air Terjun Vera Inense, Air Terjun Perawan; 3). Kecamatan Bungku Timur Permandian Lofi; 4). Kecamatan Bahodopi, Air Terjun Bahoumumpa; 5). Kecamatan Bungku Pesisir Air terjun Buleleng; dan 6). Kecamatan Menui Kepulauan Air kiri Sombori, (d). Penangkaran Rusa dan Penangkaran Burung Maleo di Kecamatan Bungku Barat;
- t. Kawasan pariwisata maritim/bahari terdiri atas: (a). wisata alam Bentang Laut meliputi: 1). Ekowisata Tracking Mangrove di Kecamatan Bungku Tengah; dan 2). Ekowisata Mangrove Nambo-Laroue di Kecamatan Bungku Timur. (b). Wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil meliputi: 1). Pantai pasir Putih Pebotoa, Pantai Lambelu di Kecamatan Bumi Raya; 2). Pantai Raha-Raha ada rasa, Pantai Raha-raha ada Bio di Kecamatan Bungku Barat; 3). Pantai Tanjung Karang,

Pantai Tapuno Bahomante, Pantai Tapuno Bente ,Pantai Tudua Di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Pantai Pasir Besi, Pantai Puluti, Pulau Pasir Hitam di Kecamatan Bungku Timur; 5). Pulau Langala, Pulau Kanda Pute, Pantai Kea kea di Kecamatan Bahodopi; 6). Pantai Panjang, Pasir Putih Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir; 7). Pulau Dua Laut, Pulau Umbeleyang kecamatan Bungku Selatan; dan 8). Pulau Sombori, Pasir Putih Koi-koila, Pulau Koko, Rumah Nenek, Danau Air Asin, Konservasi perairan pulau tiga Kecamatan Menui Kepulauan; (c). Wisata alam bawah laut meliputi perairan di sekitar Pantai Kecamatan Menui Kepulauan;

- u. Kawasan pariwisata sejarah dan budaya terdiri atas: (a). Situs Istana Raja Bungku di kecamatan bungku tengah; (b). Makam Raja Bungku di kecamatan Bungku Tengah; (c). Masjid Tua Bungku, Masjid Agung dan Islamic center di kecamatan Bungku Tengah; dan (d). Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah;
- v. Kawasan pariwisata buatan antara lain: (a). Taman Kota Fonuasingko, Alun-alun Rumah Jabatan Bupati, Taman Sangiang Kinambuka di Kecamatan Bungku tengah; dan (b). Permandian Bahoruru di Kecamatan Bungku Tengah;
- w. Rencana kawasan potensi parawisata lainnya di setiap kecamatan;
- x. Kawasan permukiman terdiri atas: (a). kawasan permukiman perkotaan terdiri atas : 1). kawasan perkotaan bungku Tengah; 2). permukiman kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; 3). permukiman perkotaan di Kecamatan Bahodopi; 4). rencana permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bungku Pesisir; dan 5). rencana kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; (b). kawasan permukiman perdesaan terdiri atas: 10. permukiman perdesaan terdapat di setiap Kecamatan; 2). kawasan permukiman Transmigrasi Terdapat di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Pesisir; 3). rencana

kawasan permukiman Transmigrasi Nelayan di kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan 4). rencana pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi di kecamatan Bahodopi, kecamatan Bungku Pesisir, kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

2.1.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah Perkawasan

Sektor pertanian merupakan sektor memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Hal tersebut ditunjukkan, sektor ini memegang peranan penting, lebih dari 50 persen tiap tahunnya dalam perekonomian di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan, Subsektor Perikanan dan Subsektor Kehutanan. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan keadaan sub sektor pertanian di Kabupaten Morowali.

2.1.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan curah hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor. Banjir besar terjadi di Kecamatan Bungku Tengah terjadi pada Tahun 2013 yang merendam pemukiman masyarakat yang mencapai 1 (satu) meter lebih. Kabupaten Morowali memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB 189 (tinggi) dan menempati peringkat ke-80 dari 496 kabupaten yang memiliki risiko bencana (BNPB, 2013)

Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku tengah, pada Tahun 2013 telah terjadi bencana banjir yang merendam Kota Lama Bungku dengan perkiraan ketinggian air mencapai 2 meter. Adapun Kawasan rawan bencana dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut :

- Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir.
- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.

- Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur
- Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur

2.1.1.2. Kondisi Demografi

Istilah kependudukan (population) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), perkawinan, perpindahan penduduk (migration) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya.

Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi. Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk



mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk

2.1.1.2.1. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Istilah kependudukan (*population*) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), perkawinan, perpindahan penduduk (*migration*) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya. Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi.

Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk

mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk.

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Morowali akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (*in migration*) lebih besar dari pada migrasi keluar (*out migration*). Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Morowali melalui Buku Kabupaten Morowlai dalam Angka Tahun 2024, diketahui kurun waktu tahun 2021 s/d 2023 jumlah penduduk mengalami peningkatan secara terus menerus.

Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali pada Tahun 2023 sebanyak 170,5 jiwa mengalami peningkatan sebesar 3,70 persen dari tahun 2021. atau bertambah sebanyak 6,08 jiwa, Pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Morowali mencapai 164.4 jiwa dan ditahun 2022 juga meningkat menjadi 167.5 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan tersebut terjadi disebabkan oleh banyaknya penduduk baru yang terdaftar sebagai penduduk kabupaten Morowali yakni pekerja di wilayah pertambangan. Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Morowali antara Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tersaji pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Morowali, Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	Ribu	164,37	167,47	170,45
2	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	2,19	2,01	1,93

Sumber: BPS ; Kab. Morowali dalam Angka Tahun 2024 (diolah Kembali)

b. Penduduk Menurut Kecamatan

Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut *jenis* kelamin adalah rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Semakin besar penduduk perempuan, potensi fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik demografi. Dilihat dari proporsi jenis kelamin Penduduk di Kabupaten Morowali diketahui bahwa terbanyak adalah penduduk dengan jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 96.909 atau sebesar 54,99%, sedangkan penduduk jenis kelamin perempuan sebanyak 79.335 jiwa atau sebesar 45,01%, sehingga rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Morowali sebesar 122,15. Rasio jenis kelamin penduduk terbesar di Kecamatan Bahodopi (184,77), kemudian Kecamatan Bungku Tengah (109,43), sebaliknya yang terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yakni sebesar 95,18. Secara lengkap informasi mengenai rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali Tahun 2023

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	(%)
	Lk	Pr		
Menui Kepulauan	5.676	6.118	11.794	6,92
Bungku Selatan	6.057	6.223	12.280	7,20
Bahodopi	34.877	18.682	53.559	31,42
Bungku Pesisir	3.379	3.202	6.581	3,86
Bungku Tengah	14.690	13.745	28.435	16,68
Bungku Timur	5.998	5.859	11.857	6,96
Bungku Barat	6.911	6.522	13.433	7,88
Bumi Raya	6.738	6.754	13.492	7,92
Wita Ponda	9.467	9.552	19.019	11,16
Total	93.793	76.657	170.450	100

Sumber: BPS ; Kab. Morowali dalam Angka Tahun 2024 (diolah Kembali)

Seperti pada Tabel 2.3 diatas, persentase jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Morowali adalah Kecamatan Bahodopi dengan persentase sebesar 31,42 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali secara keseluruhan, diikuti oleh Kecamatan Bungku Tengah sebagai ibukota Kabupaten Morowali sebesar 16,68 persen dan selanjutnya Wita Ponda sebesar 11,16 persen, sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya di Kabupaten Morowali adalah Kecamatan Bungku Pesisir yang hanya sebesar 6.581 jiwa atau proporsinya mencapai 3,86 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali. Sementara itu Penduduk Kabupaten Morowali berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 laki laki sebanyak 93.793 jiwa dan perempuan sebanyak 76.657 jiwa.

c. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Morowali adalah 31,15 jiwa per km². Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Morowali tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Morowali memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 725,57 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 28.435 jiwa mencapai kepadatan penduduk sebanyak 39,19 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Menui Kepulauan yaitu 52,74 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bungku Pesisir dengan tingkat kepadatan sebesar 7,59 jiwa per km². Data rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.4 dibawah ini

Tabel 2.4
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali
Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan (Org/Km ²)
	Km2	%	Jumlah	%	
Menui Kepulauan	223,63	4,07	11.794	6,919	52,74
Bungku Selatan	403,9	7,38	12.280	7,204	30,40
Bahodopi	1.080,98	19,76	53.559	31,42	49,55
Bungku Pesisir	867,29	15,85	6.581	3,861	7,59
Bungku Tengah	725,57	13,26	28.435	16,68	39,19
Bungku Timur	387,23	7,08	11.857	6,956	30,62
Bungku Barat	758,93	13,87	13.433	7,881	17,70
Bumi Raya	504,77	9,23	13.492	7,916	26,73
Wita Ponda	519,7	9,5	19.019	11,16	36,60
Morowali	5.472,00	100	170.450	100	31,15

Sumber: BPS, Kab. Morowali dalam Angka Tahun 2024 (diolah kembali)

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa Kecamatan Menui Kepulauan merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibanding kecamatan lain, sementara terendah kepadatan penduduknya di Kecamatan Bungku Pesisir. Hal ini disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Menui Kepulauan lebih sempit dibanding kecamatan lain yakni hanya 4,07 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali. Data yang disajikan belum menyesuaikan dengan pemekaran wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan.

d. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "*Sex Ratio*" adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, yakni semakin besar porsi penduduk perempuan, maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu, hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Jika dilihat dengan cermat tabel 1.4, tergambarkan bahwa Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Morowali pada Tahun 2023 dengan rasio sebesar 186,69 sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Menui Kepulauan dengan rasio sebesar 92,78. Data terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Di Kabupaten Morowali, Tahun 2023

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Rasio
	Lk	Pr		
Menui Kepulauan	5.676	6.118	11.794	92,78
Bungku Selatan	6.057	6.223	12.280	97,33
Bahodopi	34.877	18.682	53.559	186,69
Bungku Pesisir	3.379	3.202	6.581	105,53
Bungku Tengah	14.690	13.745	28.435	106,88
Bungku Timur	5.998	5.859	11.857	102,37
Bungku Barat	6.911	6.522	13.433	105,96
Bumi Raya	6.738	6.754	13.492	99,76
Witaponda	9.467	9.552	19.019	99,11
Kab. Morowali	93.793	76.657	170.450	122,35

Sumber: BPS, Kab. Morowali dalam Angka Tahun 2024 (diolah kembali)

Secara keseluruhan terlihat *sex ratio* pada tingkat kecamatan di Kabupaten Morowali relatif bervariasi antara 92,78 sampai 186,69. Namun secara kumulatif, pada tingkat Kabupaten Morowali dalam Tahun terakhir komposisi penduduk laki-laki dan perempuan telah relatif berbeda (*sex ratio=100*) dengan angka rasio sebesar 122,35 dan bahkan terdapat kecenderungan *sex ratio* tetap di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Ketimpangan rasio kelamin penduduk di Kabupaten Morowali dikarenakan Potensi wilayah kecamatan yang berbeda, seperti Kecamatan Bahodopi rasionya sangat tinggi karena merupakan wilayah industri yang mempekerjakan banyak penduduk laki-laki.

2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2024

Sebagaimana penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan tahun berjalan dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara mengukur realisasi kinerja dibandingkan dengan target. Hasil pengukuran kinerja memberi gambaran terhadap pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dirumuskan langkah- langkah perbaikan pada periode berikutnya.

2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Semester I

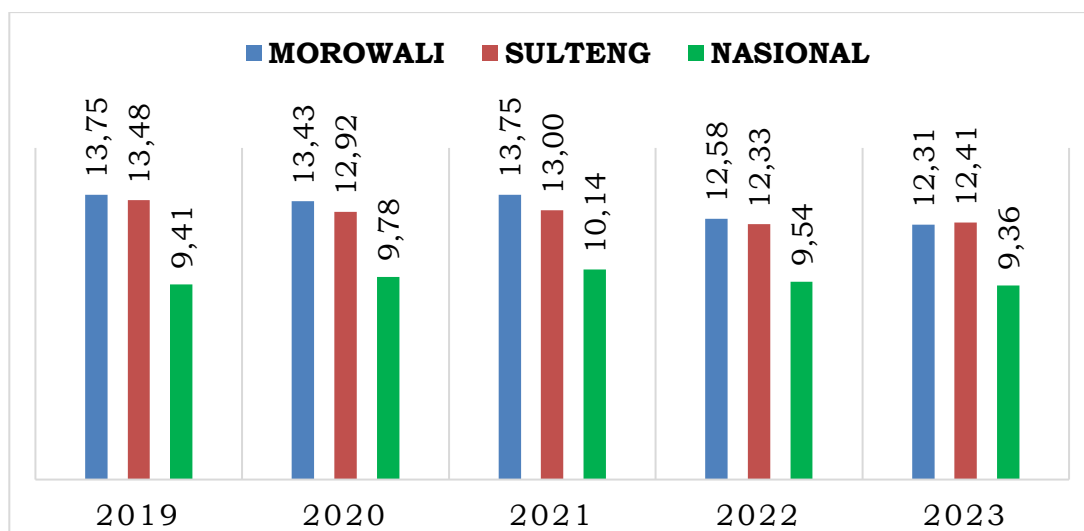
Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024–2026 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Morowali dan akan dilaksanakannya pemilu serentak pada tahun 2024, Juga berakhirnya periodisasi Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali 2018-2023, maka perlu dirumuskan perencanaan pembangunan selama tiga tahun ke depan dalam rangka mengisi kekosongan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang dituangkan ke dalam (RPD) periode 2024-2026.

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Morowali sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang digunakan pada masa transisi sebagai rumusan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Untuk mencapai Visi dan Misi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025, maka pemerintah daerah menetapkan 5 (lima) tujuan pembangunan daerah dengan 6 (enam) indikator dan 13 (tiga belas) sasaran Strategis dengan 26 (Dua Puluh enam). Adapun pencapaian tujuan pembangunan daerah pada semester I tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Tujuan 1 : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator yaitu Angka Kemiskinan dengan target 10,47 persen. Jika melihat kinerja pemerintah daerah pada indikator ini telah mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan Kabupaten Morowali dari tahun ke tahun. Pada grafik dibawah ini menunjukkan kondisi kemiskinan Kabupaten Morowal kurun 2019-2023.

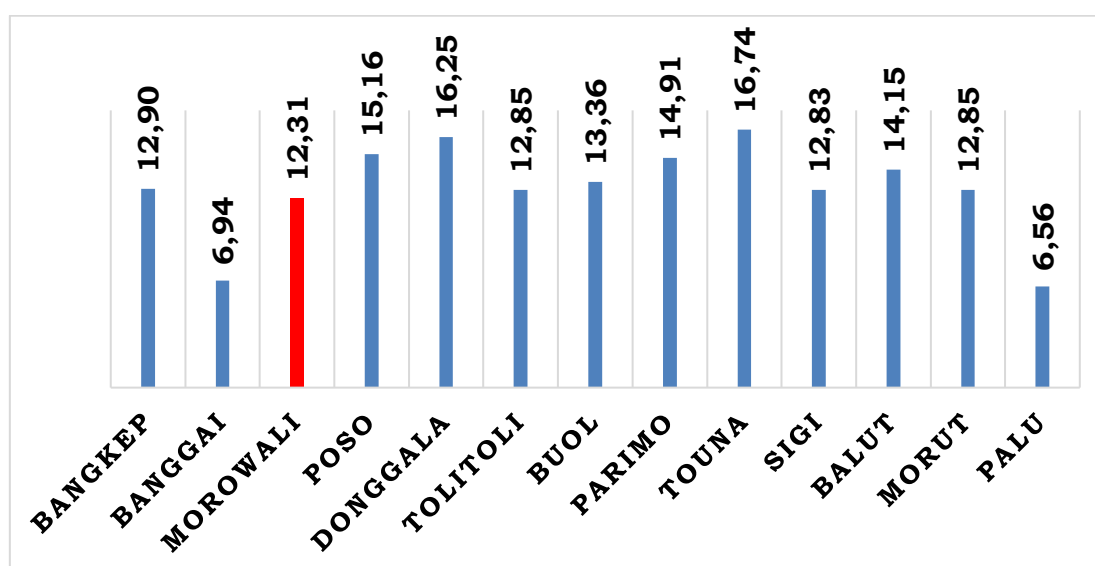


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kab. Moroawali Tahun 2019-2023

Pada tahun 2024 berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan antara lain Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Sebanyak 3.284 Orang, Insentif Petugas

Keagamaan, Bantuan Jaminan Kesehatan Sebanyak 41.533 Orang, Bantuan Jaminan Persalinan Sebanyak 3782 Orang, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Sebanyak 444 Unit, Bantuan Jaminan Hidup Santri Sebanyak 945 Orang, Bantuan Permakanan Bagi Fakir Miskin dan Penyandang Disabilitas Sebanyak 1.678 Orang, Bantuan Benih/Bibit Ternak, Bantuan Pupuk Dan Sarana maupun Prasarana Pertanian, Insentif Petugas Persampahan 413 Orang, Bantuan bagi pelaku UMKM, Bantuan BPJS Nelayan Sebanyak 9.200 Orang, Bantuan Sarana Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan hasil Perikanan Sebanyak 300 Unit, Bantuan BPJS bagi Petani, Bantuan Bajak Sawah dan Bantuan Panen Gratis, dengan keseluruhan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.327.050.074,20 dengan rincian aspek Mengurangi Beban Pengeluaran sebesar Rp. 140.684.444.735,00, aspek Meningkatkan Pendapatan sebesar Rp. 112.316.468.397,00 dan aspek Meminimalkan Kantong Kemiskinan sebesar Rp. 85.326.136.942,20. Pada tahun 2023 menurut data BPS dalam Buku Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2024 persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali berada diperingkat ke-3 (tiga) terendah se-Sulaweswi Tengah Setelah Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

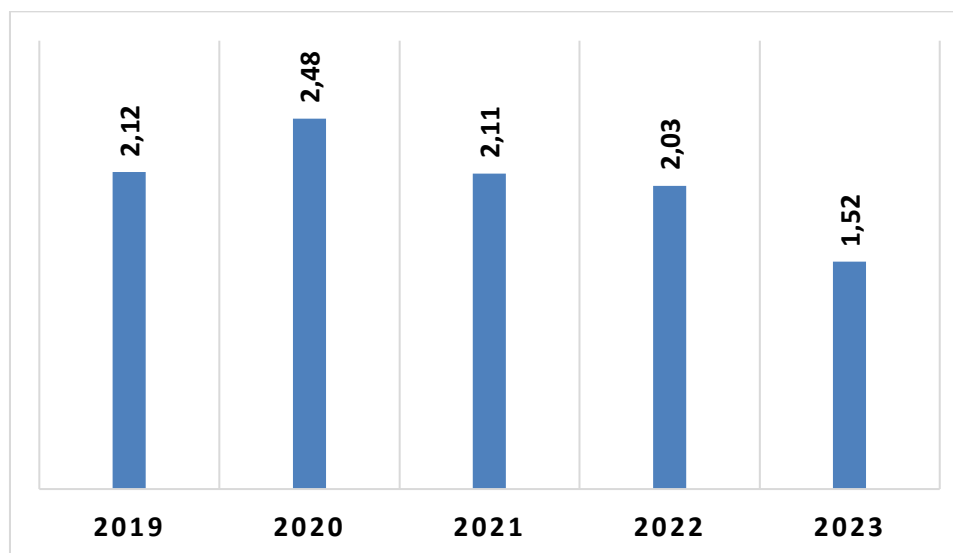


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.2
Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Se-Sulteng Tahun 2023

Adapun upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2024 untuk menurunkan angka kemsikinan antara lain Optimalisasi Anggaran Untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan meningkatkan Koordinasi Dengan berbagai pihak terkait Validasi Data Kemiskinan khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem untuk menuju Zero Miskin Ekstrem Tahun 2024. Indikator kemsikinan ini didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran strategis yaitu :

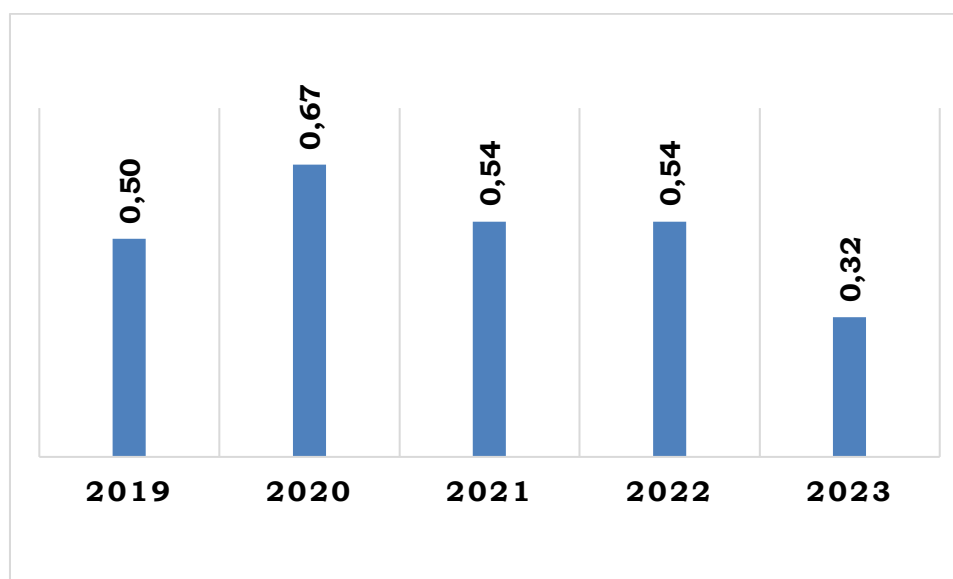
- Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 1,90 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 1,52 persen atau mencapai 125,00 persen realisasi. walaupun demikian pemerintah daerah tetap melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan indeks kedalaman kemiskinan, grafik dibawah ini menunjukkan kondisi kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2023) :



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Morowali
Tahun 2019-2023

- Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 0,52 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 0,32 persen atau mencapai 162,50 persen realisasi. walaupun demikian pemerintah daerah tetap melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan indeks keparahan kemiskinan, grafik dibawah ini menunjukkan kondisi keparahan kemiskinan Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2023) :

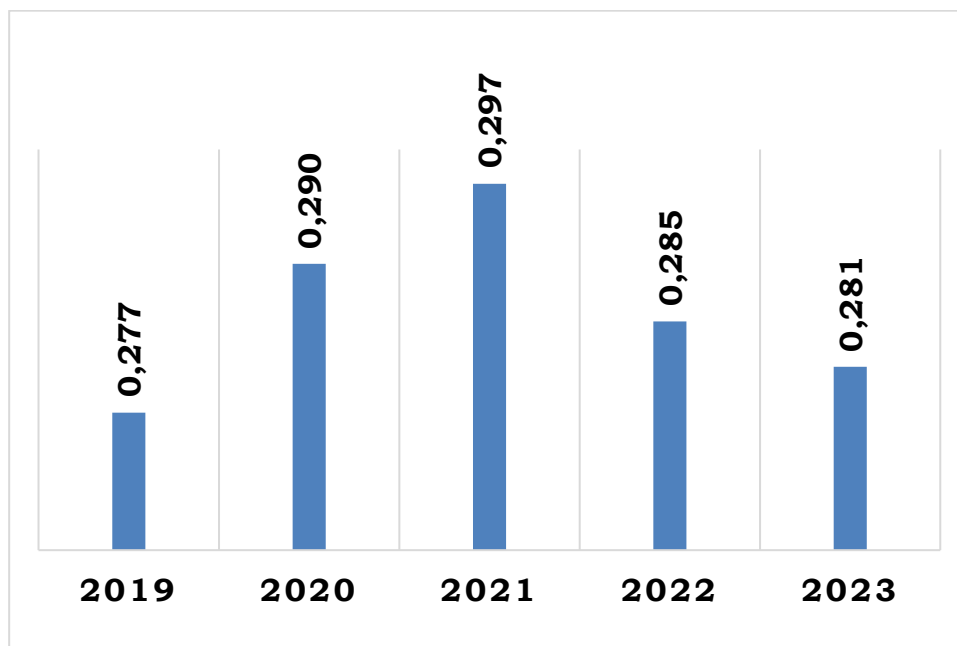


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.4
Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Morowali
Tahun 2019-2023

- Gini Ratio, merupakan menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi disutu wilayah. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidak merataan atau ketimpangan sama sekali. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 0,265 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 0,281 persen atau mencapai 94,31 persen realisasi. dengan demikian

pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan angka indeks gini kabupaten Morowali pada tahun 2024, grafik dibawah ini menunjukkan kondisi Indeks Gini Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2023) :



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.5

Indeks Gini Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan I Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan I RPD Tahun 2024

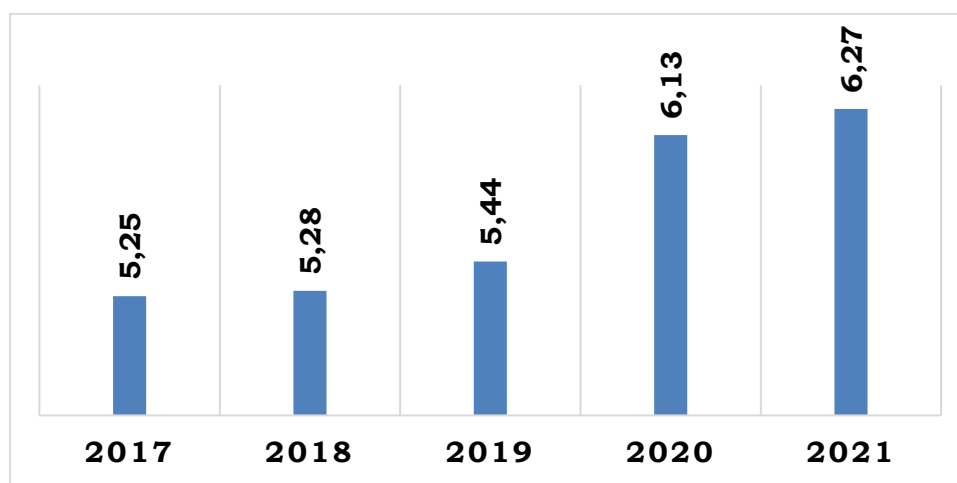
TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI (2023)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata	Angka Kemiskinan			Person	13,75	13,43	13,75	12,58	10,47	12,31 (*)	85,05	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah	Semua OPD
			Indeks Kedalaman Kemiskinan	Person	2,12	2,84	2,11	2,03	1,9	1,52 (*)	125		
		Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	Person	0,50	0,67	0,54	0,54	0,52	0,32 (*)	162,5		
			Gini Ratio	Person	0,277	0,290	0,297	0,285	0,265	0,281 (*)	94,31		

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

➤ **Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dengan target 6 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target 74,39 persen. Jika melihat kinerja pemerintah daerah pada indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sesuai hasil pengukuran indeks yang dikeluarkan oleh Bappenas kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 indikator ini mengalami peningkatan secara signifikan.

Peningkatan IPEI ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi perbaikan dalam distribusi manfaat pembangunan ekonomi, dimana lebih banyak masyarakat dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung inklusivitas, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan akses terhadap pasar kerja. Pada grafik dibawah ini menunjukkan kondisi Indeks Pembangunan Ekonmi Inklusif (IPEI) Kabupaten Morowal kurun waktu 2017-2021 :

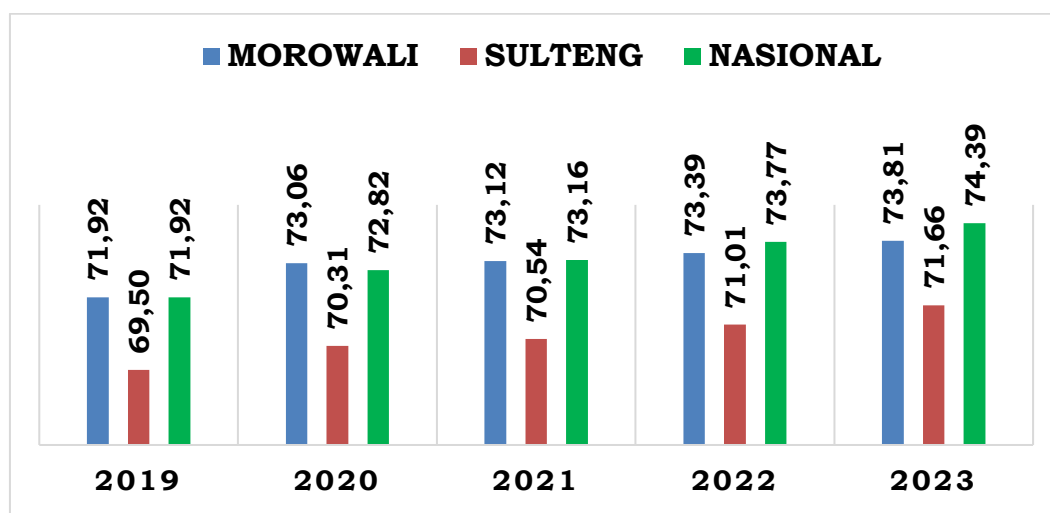


Sumber : Bappenas tahun 2024

Grafik. 2.6
IPEI Kabupaten Morowali Tahun 2017-2021

Sementara itu, untuk indikator Indeks Pembangunan Manasai (IPM) di Kabupaten Morowali juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, IPM itu

sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM adalah salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Pada grafik dibawah ini menunjukkan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Morowal kurun waktu 2019-2023 :

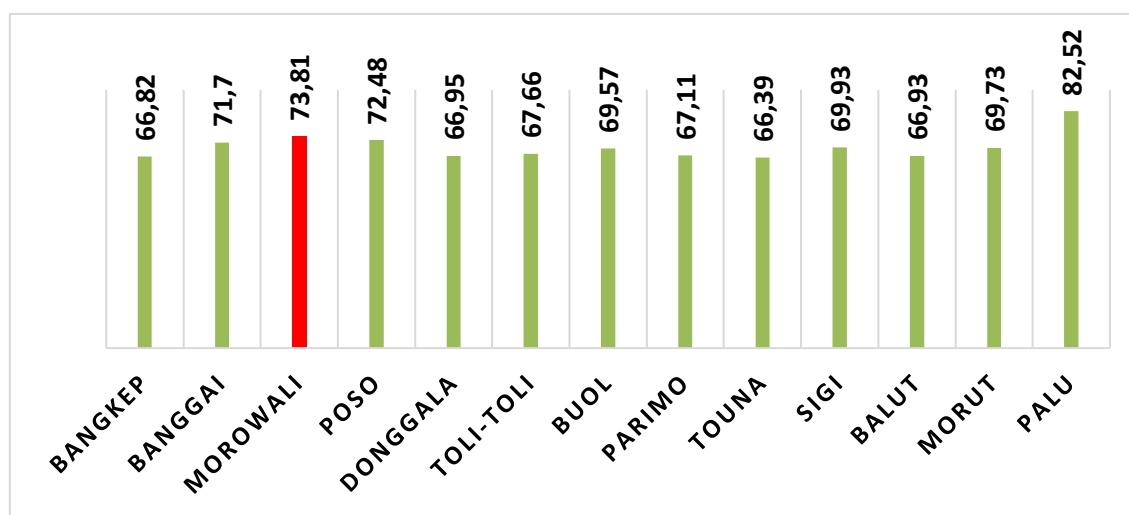


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.7
IPM Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

Pada tahun 2023 IPM kabupaten Morowali berada pada urutan kedua tertinggi se-Sulawesi tengah setelah kota palu, walaupun demikian pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan IPM di Kabupaten Morowali hal ini disebabkan karena Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali pada tahun 2023 masih berada pada angka 13,38 persen ini mengartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,38 tahun atau baru setara dengan Diploma I, disamping itu Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali pada tahun 2023 berada pada angka 9,37 persen ini berarti rata-rata tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali adalah setara kelas tiga SMP/Sederajat. Dari capaian ini menunjukkan bahwa secara umum,

sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali telah sepenuhnya tuntas pendidikan dasar sembilan tahun. Sementara untuk Usia Harapan Hidup Kabupaten Morowali tahun 2023 berada diangka 69,37 persen artinya capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Morowali rata-rata memiliki harapan hidup sampai dengan usia 69,37 tahun. Grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

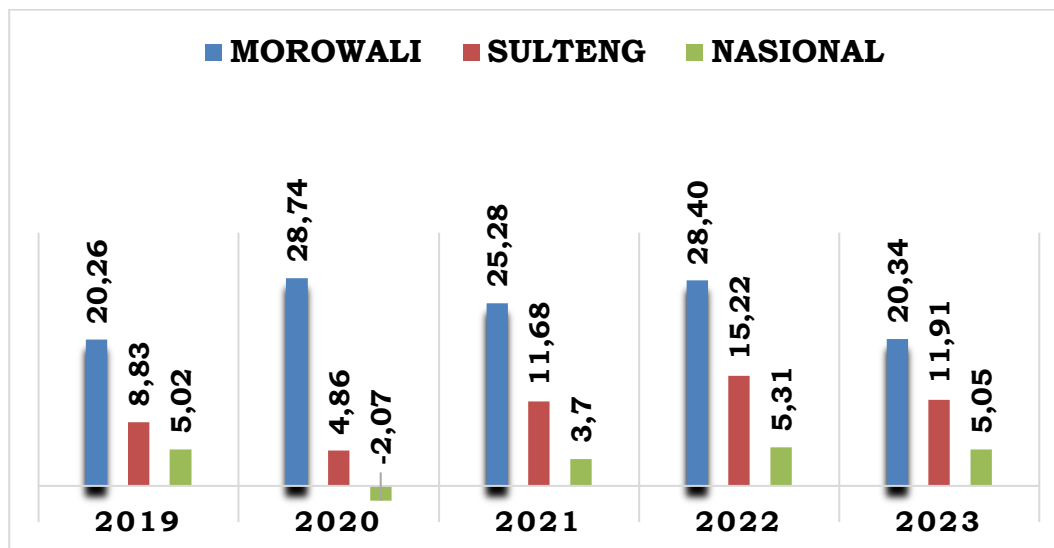


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.8
IPM Menurut Kab./Kota Se-Sulteng Tahun 2023

Pada tahun 2024 pemerintah daerah akan berupaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Morowali hal ini dibuktikan dengan mengalokasikan dana spending mandatory untuk kesehatan sebesar 21,92 persen atau sebesar Rp. 460.424.630.632,00 dari Total APBD setelah dikurangi belanja gaji. Alokasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 18,01 persen. Sementara itu untuk pendidikan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran mandatory sebesar 20,23 persen atau sebesar Rp. 508.169.737.666,00 dari Total APBD. Alokasi ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 20,01 persen. Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah didukung oleh 9 (sembilan) indikator sasaran strategis yaitu :

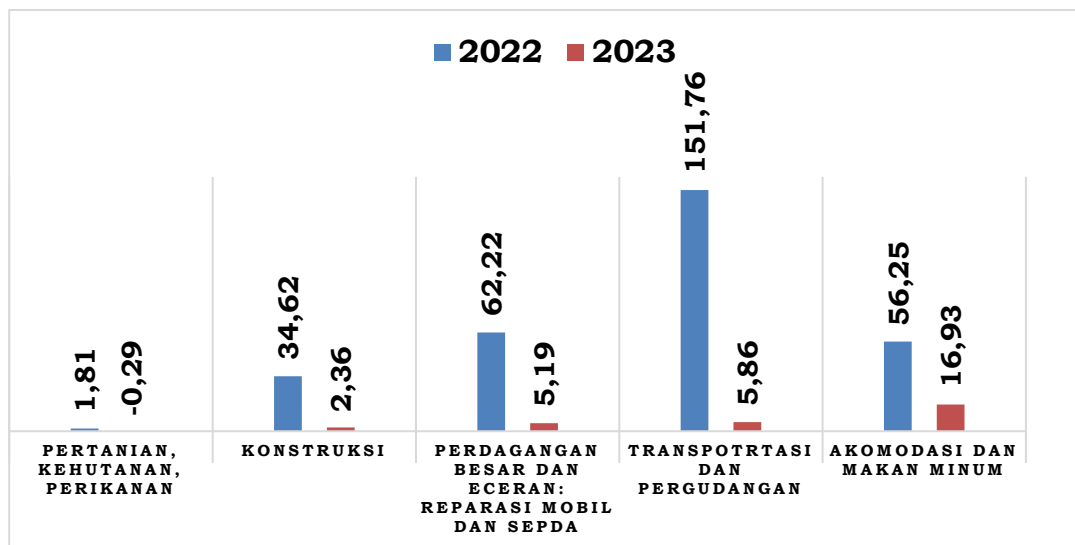
- Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali pada tahun 2023 berada pada angka 20,34 persen, angka pertumbuhan ini menemptakan Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Morowali Utara, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 27,50 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 20,34 persen atau mencapai 73,96 persen realisasi. dengan demikian pertumbuhan ekonomi masih menjadi perhatian khusus pemerintah daerah karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian maupun industri pengolahan yang mencapai 25,29 persen, sementara untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan sektor penggerak ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan mencapai angka (0,29) persen. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi pertumbuhan Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2023).



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

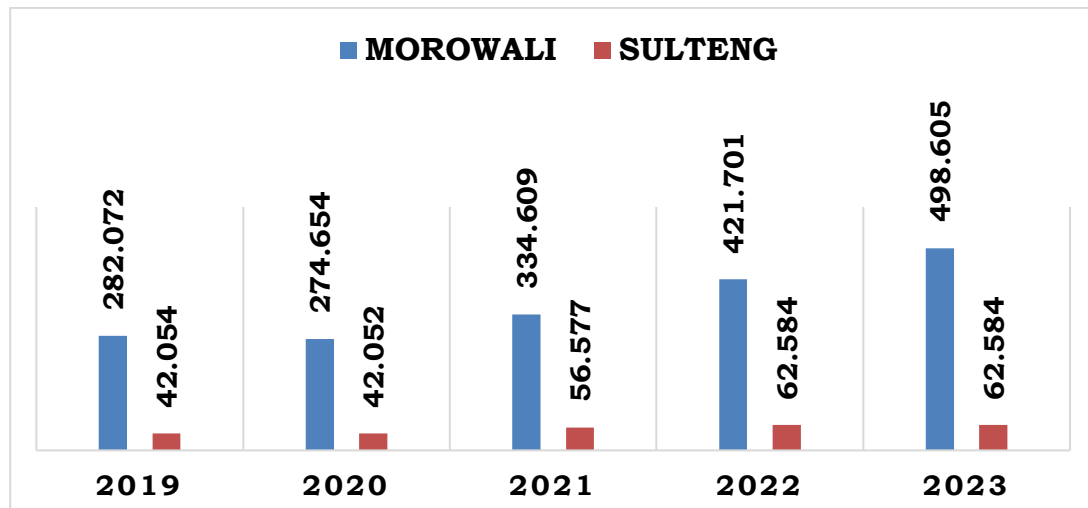
Sementara itu untuk melihat sektor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2023 dan perbandingan dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Persektor Kab. Morowali
Tahun 2022-2023

- Pendapatan Perkaapita Kabupaten Morowali pada Tahun 2023 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Berada pada angka Rp. 498 Juta Rupiah, angka ini menempatkan Kabupaten Morowali berada pada urutan Pertama Se-Sulawesi Tengah dengan Pendapatan Perkapita tertinggi. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 400 Juta, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 498 Juta Rupiah atau mencapai 124,50 persen realisasi. Namun demikian pemerintah daerah masih tetap berupaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita di Kabupaten Morowali hal ini disebabkan kaeran masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Morowali yang mengartikan bahwa pendapatan perkapita yang tinggi namun belum merata sampai ke lapisan masyarakat paling bawah atau masyarakat miksin. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi pertumbuhan Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2023).

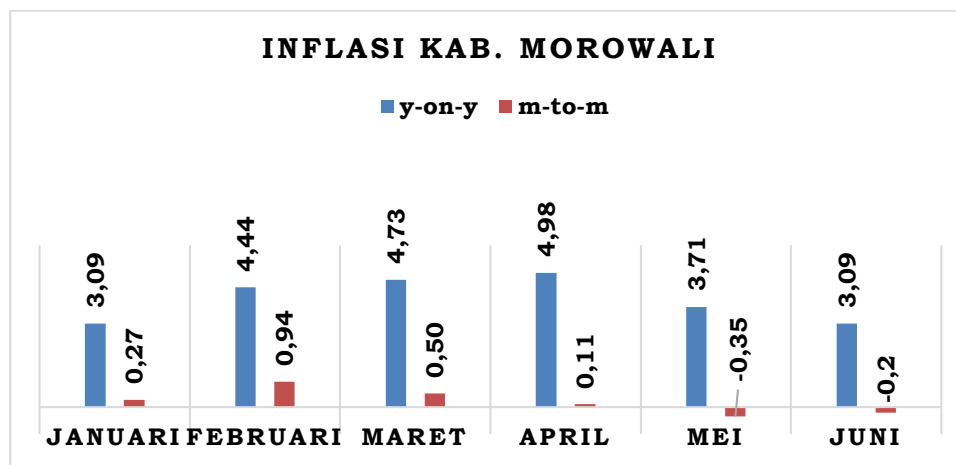


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.11
Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali
Tahun 2019-2023

- Infansi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, pada tahun 2024 ini untuk pertama kalinya Kabupaten Morowali masuk dalam Perhitungan Inflasi Oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 3,00 Persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 4,98 persen atau hanya mencapai 60,24 persen realisasi. Walaupun kurun waktu bulan januari s/d april 2024 Inflasi secara y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Tolitoli namun inflasi kabupaten morowali juga mengalami peningkatan secara signifikan. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2024, antara lain: beras, tomat, cabai rawit, Sigaret Kretek Mesin (SKM), emas perhiasan, telur ayam ras, kontrak rumah, bawang merah, bawang putih, Sigaret Kretek Tangan (SKT), gula pasir, Sigaret Putih Mesin (SPM), cabai merah, ikan katamba, kue basah, nasi dengan lauk, tarif parkir, udang basah, jagung manis dan ayam goreng. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah Gerakan Menanam Cabai Seluas 1,5 Ha, Dengan Estimasi Produksi Cabe Perbulan 500 Kg, Dan 6 Ton/Tahun, Panen Gratis Dengan Total Produksi 26.940,49 Ton, Dengan

Produktivitas 4,9 Ton/Ha, melakukan Kerja Sama Dengan Kab. Baggai Kepulauan Tentang Pemasaran Produksi Perikanan serta Kerja Sama Dengan Kabupaten Poso Tentang Fasilitas Perdagangan Dan Pemasaran Hasil Peternakan Dan Hasil Pertanian. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi Infalsi Kabupaten Morowali Tahun 2024 (Januari s/d April).

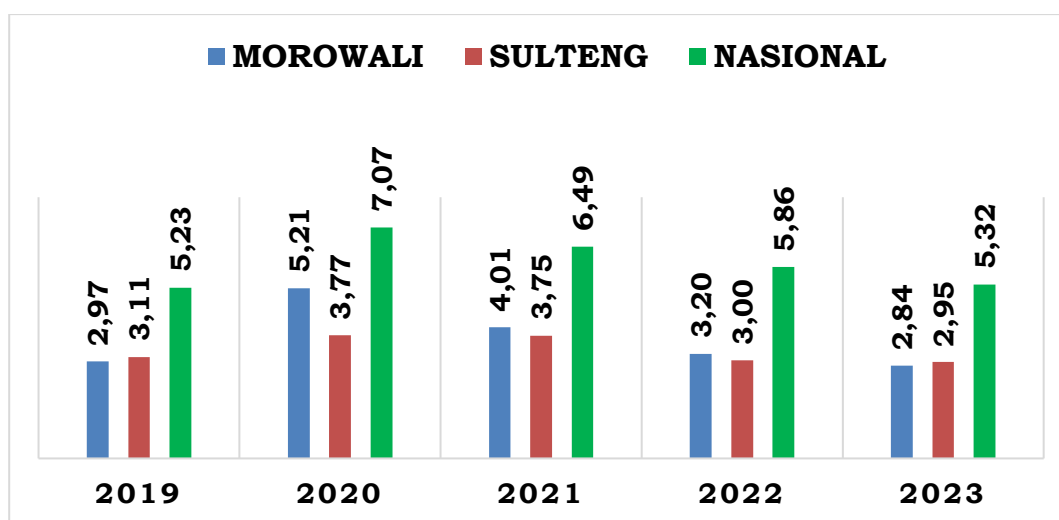


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.12
Inflasi Kabupaten Morowali (Januari s/d Juni)
Tahun 2024

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, oleh sebab itu untuk mendapatkan angka TPT diukur dengan menggunakan persentase anatar jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali berada pada angka 2,84 persen atau berada pada urutan keenam tertinggi Se-Sulawesi Tengah. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 3,00 Persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 2,84 persen atau mencapai 105,63 persen realisasi. Walaupun kurun waktu lima tahun terakhir pemerintah daerah telah berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran secara persentase namun jika melihat data BPS tahun 2023 jumlah penganggur Kabupaten Morowali berjumlah 2.077 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 278 jiwa jika dibandingkan tahun 2022, hal ini terjadi karena angkatan kerja perempuan juga mengalami

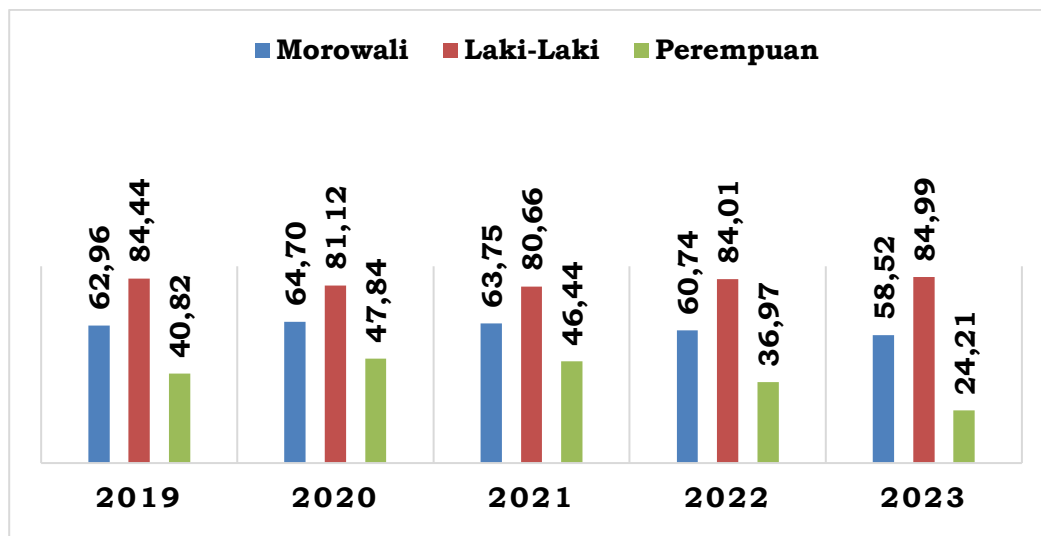
peningkatan, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka antara lain dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk usai kerja agar dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi sehingga dapat bersaing dipasar tenaga kerja, selain itu pada tahun 2024 ini pemerintah daerah juga melakukan telah melakukan kerja sama dengan kementerian perindustrian melalui pendidikan vokasi baik ditingkat D-1 maupun sampai dengan D-III. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi TPT Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 :



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.13
TPT Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023

Selain Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan karena Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami penurunan dan pada tahun 2023 TPAK Perempuan hanya berada pada angka 24,21 persen. Sehingga upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi perempuan. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi TPAK Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 :

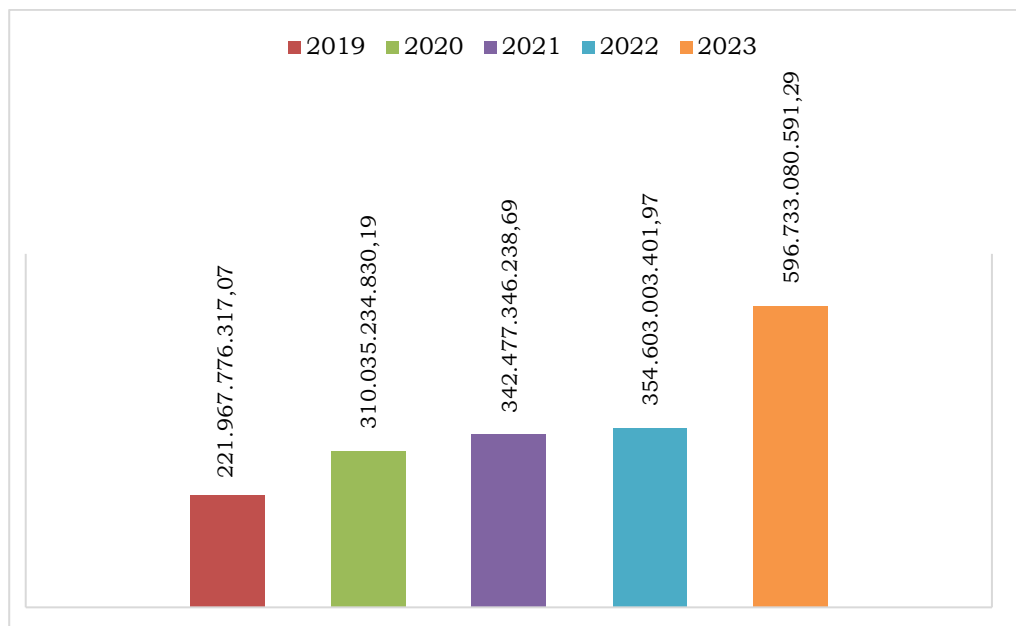


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.14
TPAK Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023

➤ Persentase Kenaikan PAD

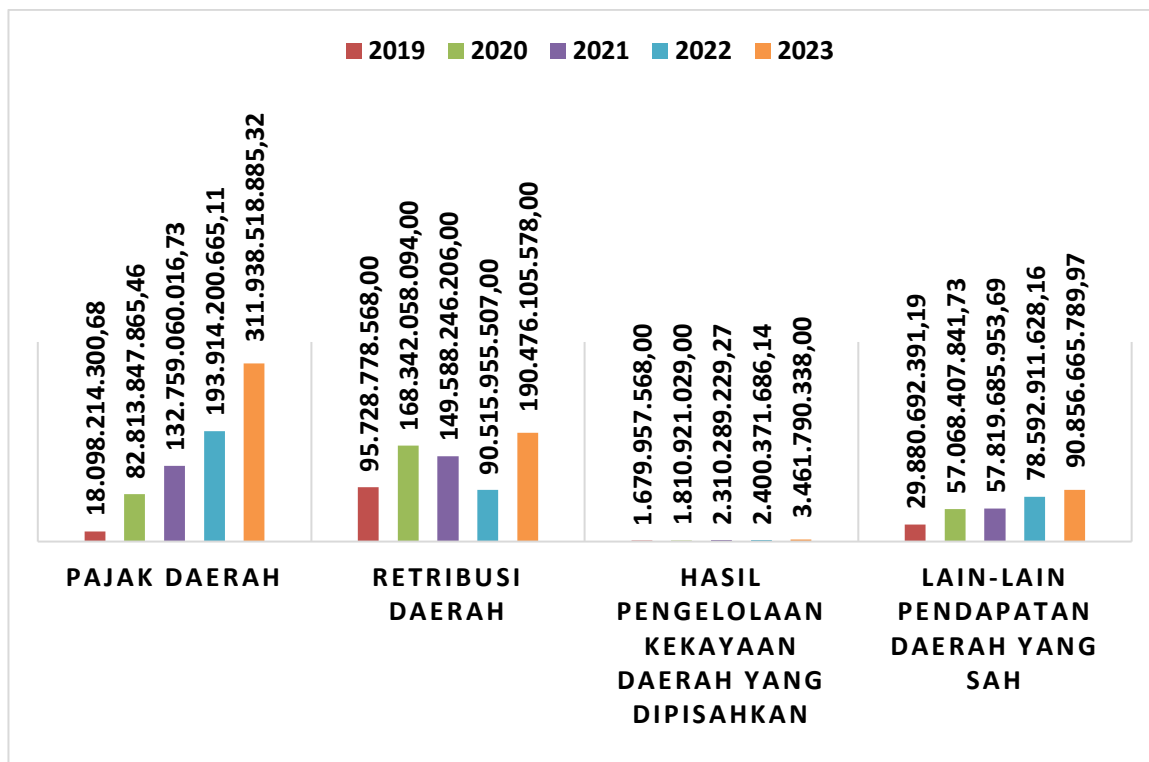
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 6,00 Persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 5,09 persen atau mencapai 84,83 persen realisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan yang signifikan dan realisasi PAD tertinggi adalah pada tahun 2023 mencapai Rp. 596.733.080.591,29 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 365.423.439.486,41 atau mengalami peningkatan sebesar 63,30 persen. Sementara untuk tahun 2024 sampai dengan bulan April 2024 realisasi PAD mencapai Rp. 183.320.496.363,14 atau sudah terealisasi 29,23 persen dari target PAD Tahun 2024 sebesar Rp. 627.115.662.509,00. grafik dibawah ini menunjukkan Realisasi PAD Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 :



Sumber : Dinas Pendapatan Kab. Morowali (Diolah Kembali)

Grafik. 2.15
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali
Tahun 2019 s.d 2023

Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari ke 4 (empat) rincian obyek PAD Kabupaten Morowali, Pajak Daerah memberikan kontribusi paling tinggi sebesar Rp. 311.938.518.885,00 atau 52,27 persen dari Total Realisasi PAD, sementara untuk Retribusi daerah sebesar Rp. 190.476.105.578,00 atau 31,92 persen. Pada tahun 2024 realisasi PAD untuk pajak daerah sebesar Rp. 98.329.883.000,64 atau 15,68 persen dari Total PAD dan Retribusi daerah terealisasi sebesar Rp. 68.411.647,093,00 atau 10,91 persen dari Total PAD. grafik dibawah ini menunjukkan Realisasi PAD per rincian Obyek Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023

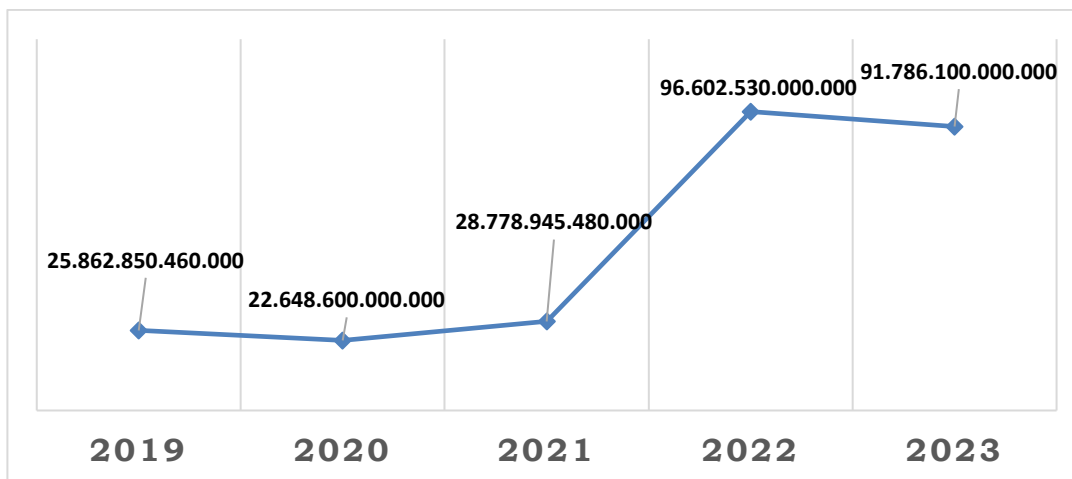


Sumber : Dinas Pendapatan Kab. Morowali (Diolah Kembali)

Grafik. 2.16
Rincian Obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali
Tahun 2018-2023

➤ Nilai Investasi

Kinerja pemerintah daerah menumbuhkan investasi di kabupaten Morowali patut mendapatkan apresiasi yang luar biasa, hal ini dapat dilihat dari realisasi investasi Kabupaten Morowali yang mengalami kenaikan disetiap tahun. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 70 Triliun, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 91.786 Triliun atau mencapai 131,12 persen realisasi. Walaupun pada tahun 2023 realisasi Investasi mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022 namun secara umum realisasi Investasi Kabupaten Morowali masih menempati urutan pertama se-Sulawesi Tengah. grafik dibawah ini menunjukkan Realisasi Investasi Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 :

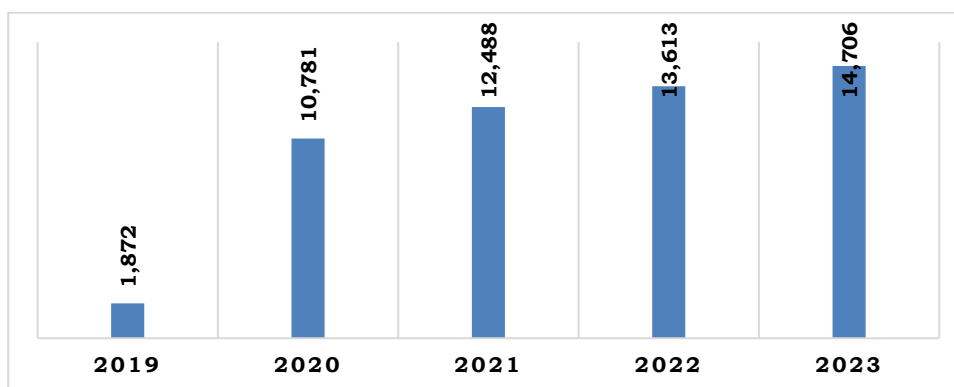


Sumber : DPMPTSP Kab. Morowali (Diolah Kembali)

Grafik. 2.17

Realisasi Investasi Kabupaten Morowali tahun 2019 s.d 2023

Peningkatan investasi di Kabupaten Morowali juga salah satunya dapat diukur melalui peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika melihat data BPS dalam Buku Morowali dalam Angka Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan PMTB Kabupaten Morowali mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2020 s/d tahun 2023, walaupun pada tahun 2020 mengalami dampak dan pemulihan dari Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara nasional namun tidak mempengaruhi kondisi investasi di kabupaten morowali. Adapun data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Kab. Morowali Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.18

**PMTB Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023
(dalam Milyar Rupiah)**

- Indeks Kesehatan, indikator ini merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi nilai indeks pembangunan manusia oleh United National Development Programme (UNDP), Menurut Bloom et al., (2010) kesehatan adalah sumber kesejahteraan manusia dan juga sebagai instrumen dalam meningkatkan pendapatan. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 0,43 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 0,76 persen atau mencapai 176,74 persen realisasi. pencapaian ini merupakan kategori sangat tinggi mengingat berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Morowali antara lain Penjaminan Kesehatan Gratis melalui BPJS Kesehatan pada tahun 2024 sebanyak 33.087 jiwa dengan alokasi anggaran Rp. 16.698.360.000,00 atau meningkat sebesar 11,39 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp. 14.991.480.000,00. dan menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, sampai dengan tahun 2024 tenaga kesehatan yang ada sebanyak 1.598 orang yang terdiri dari dokter spesialis 31 orang, dokter umum 54 orang, perawat 593 orang, bidan 611 orang, Kesmas 122 orang dan sisanya Kesling 27 orang, Apoteker 72 Orang, Nutrisionis 40 orang dan Analis LAB 62 orang. Dengan pencapaian ini bukan berarti pemerintah daerah tidak mendapatkan hambatan dan kendala salah satu tantangan yang dihadapi saat ini yaitu dengan tingginya pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan dan penyediaan obat-obatan, sehingga masih perlu upaya dan kerja keras dari pemerintah daerah dalam menangani hal ini.
- Angka Stunting atau stunting adalah keadaan saat balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan usia dan jenis kelamin yang diukur dengan standar pertumbuhan anak dari WHO. Masalah stunting di kabupaten morowali merupakan masalah kesehatan yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah daerah, hal tersebut dibuktikan dengan prevalensi stunting kabupaten morowali pada tahun 2022 mencapai 23,30 persen atau hanya

mengalami penurunan sebesar 5,6 persen dari angka stunting tahun sebelumnya sebesar 28.9 persen. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 20,00 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 23,30 persen atau mencapai 85,84 persen realisasi. Capaian ini masih menggunakan data sementara sambil menunggu data hasil survey Gizi Indonesi (SSGI) yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan RI. Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp. 141.340.473.604,00 yang terdiri dari intervensi spesifik sebesar Rp. 2.141.798.882 dan intervensi sensitif sebesar Rp. 139.288.674.782,00. Adapun upaya atau langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal menurunkan angka stunting di kabupaten morowali adalah penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insetntif), Pembangunan Jamban Lokus Stunting, Bantuan Pangan Non Tunai. pemberian makanan tambahan pada balita selama 90 hari dan pendampingan balita stunting dan keluarga beresiko stunting. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan II Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan II RPD
Tahun 2024

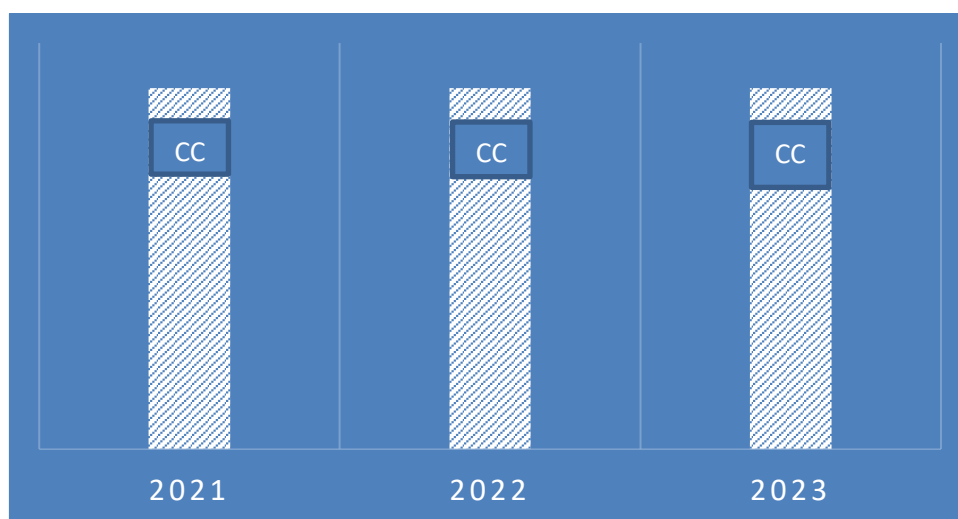
TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			Persen	4,55	6,13	6,27	6,27 *	6	6,27 *	104,5	Dinas Perikanan Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Semua OPD
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	20,26	28,74	25,28	28,40	27,5	20,34 *	73,96		
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	282	274	334	421	400	498 *	124,5		
			Inflasi	Persentase	NA	NA	NA	NA	3	4,98	60,24		
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	2,97	5,21	4,01	3,20	3	2,84 *	105,63	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah	Semua OPD

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
		Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	Persen	22,48	39,68	10,46	3,54	6	68,28*	84,83	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Semua OPD
			Nilai Investasi	Triliun Rupiah	25.862	22.648	28.778	96.602	70.000	91.786*	131,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Semua OPD
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	71,92	73,06	73,12	73,39	74,39	73,81*	99,22		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,751	0,756	0,757	0,757	0,43	0,759*	176,74	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua OPD
			Stunting (SSGI)	Persen	NA	NA	28,09	23,30	20	26,00	76,92		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	31,83	31,83	31,88	31,91	55	31,98*	58,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua OPD

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

➤ **Tujuan 3 : Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan target B. Jika melihat kinerja pemerintah daerah pada indikator ini masih kategori rendah dengan capaian CC atau realisasi 85,48 persen. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan gambaran sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintah yang telah dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan Publik yang berkualitas. Pemerintah daerah melakukan upaya untuk menaikkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), salah satunya yaitu dengan dioperasikannya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dimasyarakat secara efektif dan efisien, sampai dengan tahun 2024 Mall Pelayanan Publik telah membuka 27 gerai layanan yang terdiri dari 20 gerai layanan perangkat daerah teknis dan 7 gerai layanan bagi instansi vertikal. grafik dibawah ini menunjukkan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :

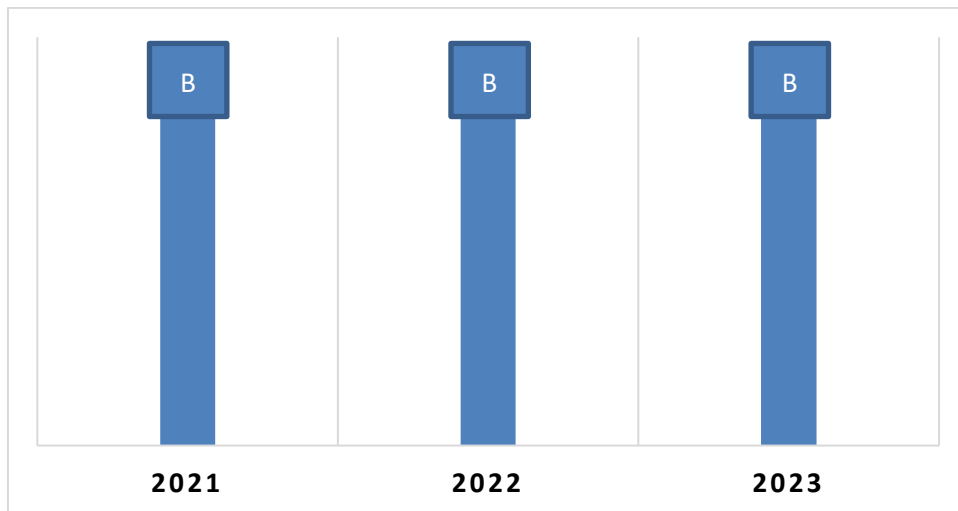


Sumber : Kementerian PAN RB RI Tahun 2024

Grafik : 2.19
IRB Kabupaten Morowali tahun 2021-2023

Jika berdasarkan grafik 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator pada misi 1 belum mencapai target RKPD, IRB Kabupaten Morowali pada tahun 2023 hanya mencapai nilai 55,56 atau kategori CC. tercapainya indikator tujuan III ini ditunjang oleh 7 (Tujuh) indikator sasaran yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, penilaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kabupaten Morowali dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pelayanan kependudukan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berkaitan dengan pelayanan perizinan. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 80,00 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 88,19 persen atau mencapai 110,24 persen realisasi namun pencapaian ini masih perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Untuk sektor pelayanan perizinan pada tahun 2023 telah mengeluarkan izin sebanyak 2.299 Izin dan pada tahun 2024 sampai dengan Bulan April telah mengeluarkan 774 izin yang terdiri dari Izin Non OSS-RBA 125 Izin, Izin Usaha Online (OSS-RBA) 528 Izin, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 98 Izin dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 21 Izin. grafik dibawah ini menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Morowali terhadap pelayanan publik Tahun 2021 s/d 2023 :

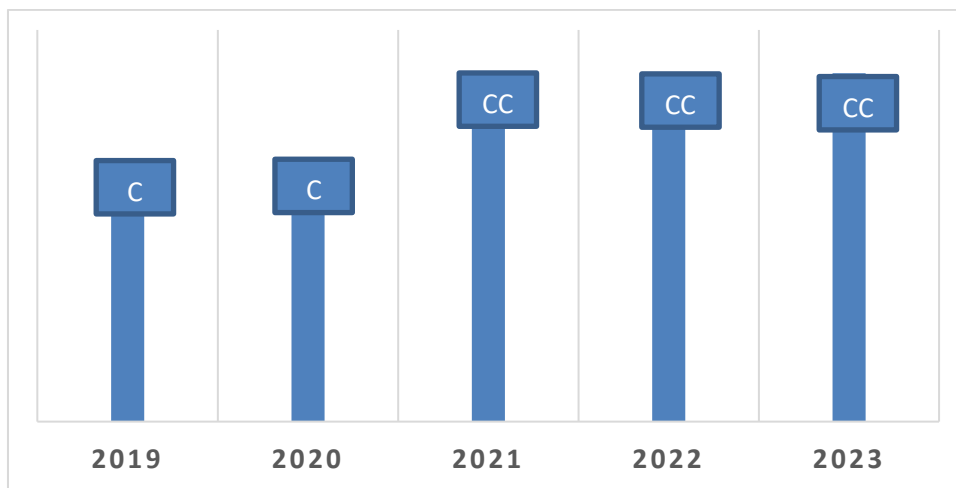


Sumber : Dukcapil dan DPMPTS Kab. Morowali tahun 2024

Grafik : 2.20

IKM Kabupaten Morowali tahun 2021-2023

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) kabupaten Morowali pada tahun 2021-2023 masih dengan Capaian CC, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah B, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 masioh CC atau mencapai 85,71 persen realisasi. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai SAKIP antara lain Komitmen Pimpinan dalam hal perjanjian kinerja dan penyerapan anggaran dimasing-masing perangkat daerah, pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan evaluasi secara berkala baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan Sumber Daya Aparatur. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai SAKIP Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :

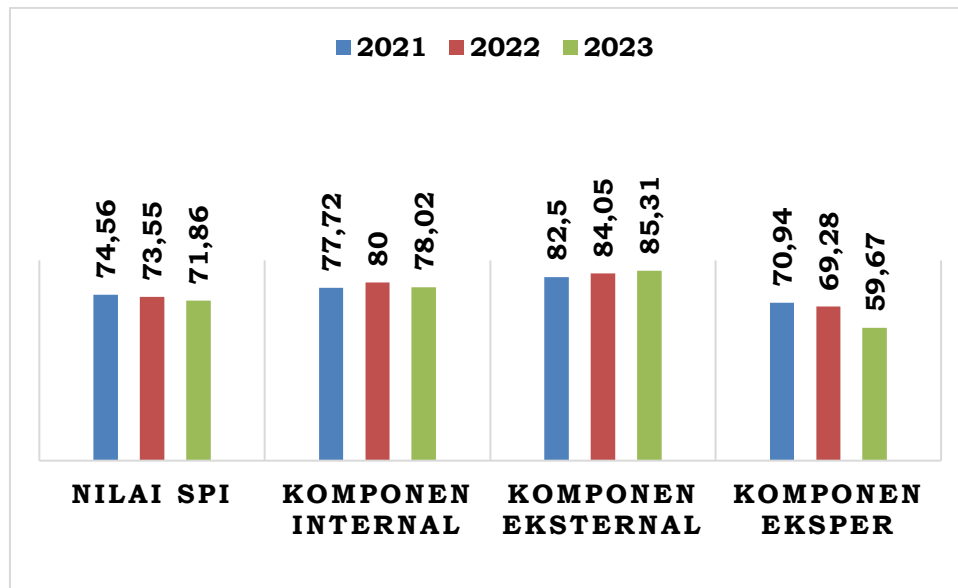


Sumber : Kementerian PAN RB Tahun 2024

Grafik : 2.21

SAKIP Kabupaten Morowali tahun 2019-2023

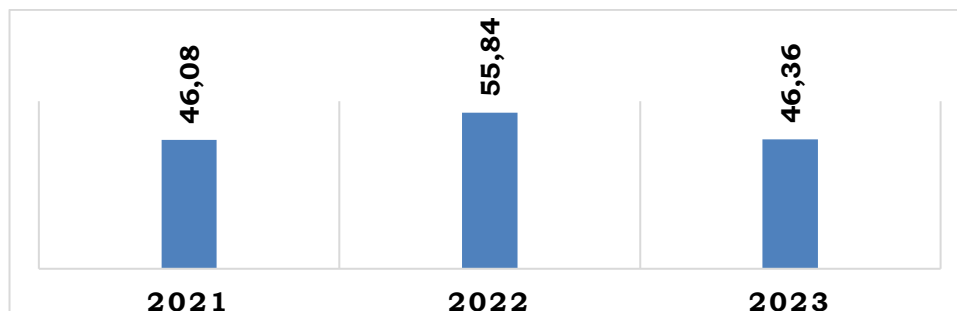
- Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Pada tahun 2023, Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 73,70 (Waspada), sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 71,68 (Rentan) atau 97,50 persen realisasi. Pada tahun 2023 Nilai SPI Kabupaten Morowali berada pada angka 71,86 atau mengalami penurunan dari tahun 2021 dan tahun 2022, penurunan ini disebabkan karena komponen Internal mengalami penurunan dan penurunan yang sangat signifikan terjadi pada Komponen Eksper. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai SPI dan Komponen Perhitungan Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :



Sumber : <https://www.jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=ae068786>

Grafik : 2.22
Nilai SPI dan Komponen PERhitungan Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2023

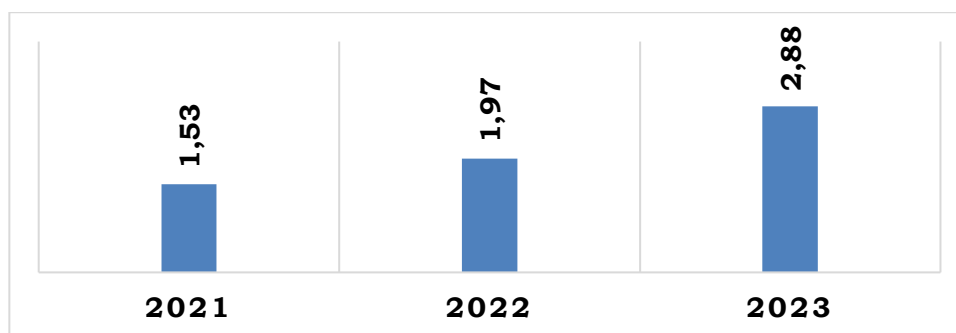
- Indeks Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 37,50 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 46,36 persen atau 123,57 persen realisasi. Pencapaian ini menempatkan kabupaten Morowali sebagai Kabupaten terinovatif ke-3 se-sulawesi tengah dan peringkat 175 terinovatif secara nasional. Pada tahun 2023 pemerintah daerah telah melakukan penginputan Inovasi kedalam aplikasi Innovative Government Award (IGA) sebanyak 24 inovasi, yang terdiri dari 16 inovasi dengan nilai kematangan 111, 1 inovasi dengan nilai kematangan 108, 1 inovasi dengan nilai kematangan 103, 1 inovasi dengan nilai kematangan 91,00, 1 inovasi dengan nilai kematangan 108, 1 inovasi dengan nilai kematangan 86, 1 inovasi dengan nilai kematangan 80 dan 2 inovasi dengan nilai kematangan 73. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023



Sumber : Bid. Litbang Bappelitbangda Kab. Morowali

Grafik : 2.23
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2023

- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nilai SPBE Kabupaten Morowali pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 1,75 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 2,88 persen atau 164,57 persen realisasi. Berbagai upaya yang dilakukan, grafik dibawah ini menunjukkan Nilai SPBE Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :



Sumber : Dinas Kominfo Kab. Morowali

Grafik : 2.24
Nilai SPBE Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2023

- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola

keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 68,96 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 60,97 persen atau 88,41 persen realisasi. Pemerintah daerah setiap tahunnya telah berupaya untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Morowali salah satunya dengan cara meningkatkan akuntabilitas keuangan dan Aset daerah dengan mempertahankan Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang sejak 2019 sampai dengan 2022 mendapatkan opini BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). grafik dibawah ini menunjukkan hasil Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 :

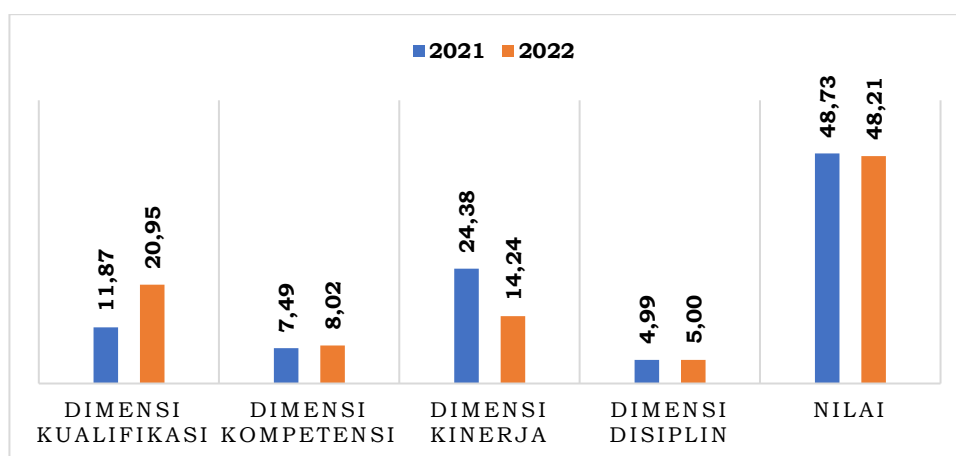


Sumber : BPKAD Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.25
Opini BPK atas LHP Keuangan Kabupaten Morowali
Tahun 2019-2023

- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. IP ASN Kabupaten Morowali pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,07 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021, ini mengartikan bahwa ada kompnonen penilaian yang mengalami penurunan dalam pengukuran IP ASN Tahun 2022. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) Dimensi yaitu Dimensi Kualifikasi merupakan Riwayat jenjang pendidikan formal

terakhir yang dicapai oleh PNS dengan bobot 25 persen, Dimensi Kompetensi merupakan Riwayat pengembangan kompetensi dengan bobot 40 persen, dimensi kinerja merupakan Riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dengan bobot 30 persen dan dimensi disiplin merupakan Data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima dengan bobot 5 persen. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 71,00 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 48,21 persen atau 67,90 persen realisasi. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai Indesk Profesionalitas ASN Kabupaten Morowali Tahun 2021 dan masih dalam kategori rendah.



Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Grafik : 2.26
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2022

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Dimensi Kinerja mengalami Penurunan sangat signifikan sementara dimensi ini memberikan bobot 30 persen dari penilaian IP ASN. Untuk meningkatkan dimensi Kinerja pada tahun 2024 pemerintah daerah telah menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20 Persen dari tahun 2023. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan III Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan III RPD

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Predikat	NA	NA	CC	CC	B	CC *	85,48		
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	Persen	NA	NA	B	B	80	88,19 *	110,24	Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah, DPMPTSP, Bappelitbangda Kab. Morowali, Dinas Perpustakaan Daerah, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, Semua Kecamatan	Semua OPD
			Nilai Sakip	Nilai	C	C	CC	CC	B	CC *	85,71		
			Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	NA	NA	74,56	73,55	73,70 (Waspada)	71,68 * (Rentan)	97,5		
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	NA	NA	46,08	55,84	37,5	46,36 *	123,57		
			Nilai SPBE	Nilai	NA	NA	1,53	1,97	1,75	2,88 *	164,57		

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	NA	NA	NA	60,97	68,96	60,97*	88,41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Semua OPD
			Indeks Profesionalitas ASN	Persen	NA	NA	48,73	48,21	71	48,21*	67,9	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua OPD

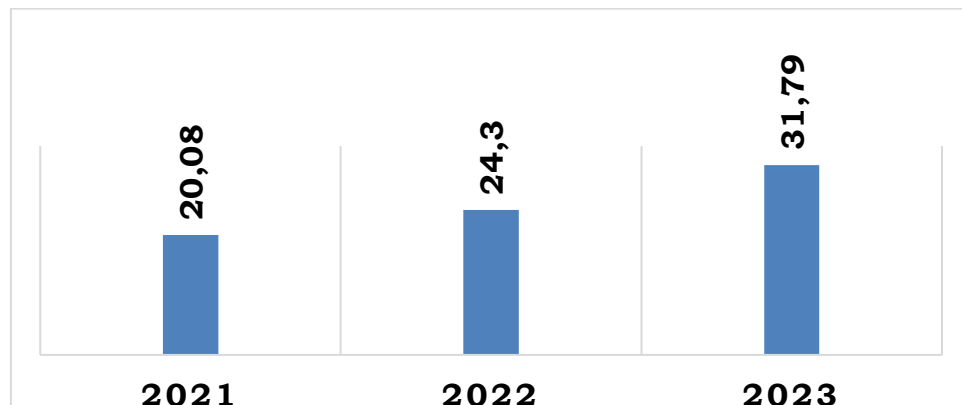
Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

➤ **Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 50 Persen. Kulaitas Layanan Infrastruktur (KLI) adalah data dan informasi dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Dalam memperoleh pelayanan infrastruktur. Untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) terdapat 10 (sepuluh) indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilannya yaitu jalan dan jembatan, irigasi, taman kota/RTH, drainase, PJU, AMPL, rambu dan penunjuk jalan, persampahan, sanitasi, dan halte. Sampai dengan tahun 2024 semester I Pemerintah Daerah belum melakukan pengukuran untuk Indikator ini, namun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Infastruktur dengan mengalokasikan anggaran spending mandatory untuk infrastruktur sebesar Rp. 832.232.533.710 atau 37,04 persen dari total APBD tahun 2024. Untuk lebih mengefisienkan pencapaian dalam indikator tujuan IV ini ditunjang oleh 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

- Persentase Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, sementara target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 24,50 persen, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 31,79 persen atau 129,76 persen realisasi. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kondisi jalan pada tahun 2024 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 85.351.279.600,00 yang terdiri dari Pembangunan Jalan Rp. 13,100,343,984, Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Rp. 1,050,000,000, Rekonstruksi Jalan sebesar Rp. 69,638,015,116, Pemeliharaan Berkala Jalan Rp. 1.100.000.000 dan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan

Rp. 462,920,500. grafik dibawah ini menunjukkan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :



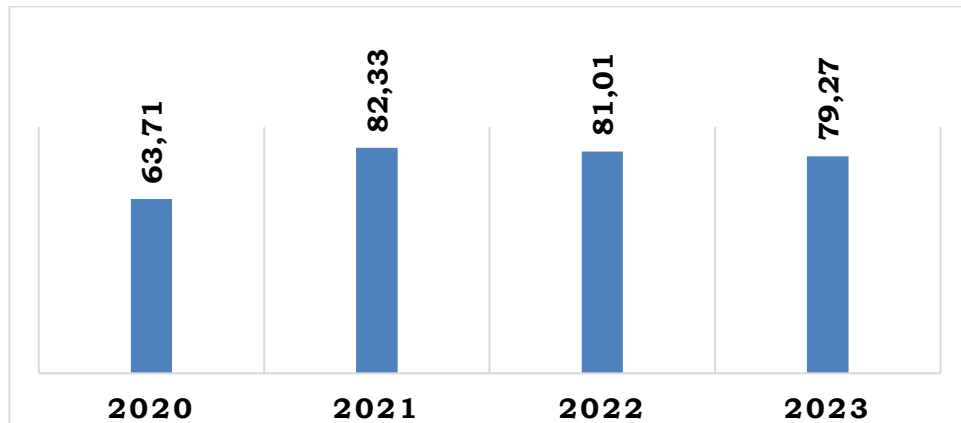
Sumber : Dinas PUPR Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.27
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2023

- Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun tahun 2022, sementara target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 55,00 persen, Sampai dengan tahun 2024 semester I Pemerintah Daerah belum melakukan pengukuran untuk Indikator ini, namun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memenuhi tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.349.517.000,- yang terdiri dari Penilaian Perwujudan (Monev) RTRW Kab. Morowali Rp. 250.419.000,00 Peninjauan Kembali (PK) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Morowali Rp. 300.018.000 dan Revisi RTRW Kab. Morowali Rp. 799.080.000,00. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan PERDA RTRW Kabupaten Morowali tahun 2019 yang sudah harus direvisi pada tahun 2024. Disamping melakukan Revisi RTRW Tahun 2019 Pemerintah Daerah juga pada tahun 2024 melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan aloaksi anggaran Rp. 1.750.457.000,00 yang terdiri dari Penyelesaian RDTR Wosu dan sekitarnya Rp. 650.842.000,-Penyusunan RDTR Bahonsuai

dan Sekitarnya Rp. 999.641.000,- dan Penyelesaian RDTR Perkotaan Bahodopi dan RDTR Lantula Jaya Rp. 99.974.000.

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, sementara target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 80,54 persen, Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 79,27 persen atau 98,42 persen realisasi, pada tahun 2024 selain penangana sampah di ibukat bungku, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan persampahan di kawasan industri bahodopi dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 17.572.545.088,00 dengan rincian belanja untuk Honorarium petugas kebersihan sebanyak 88 orang sebesar Rp. 2.207.040.000 dan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan TPST Kec. Bahodopi sebesar Rp. 15.365.505.088 yang terdiri dari Pengadaan Arm Roll 12 Unit, Pengadaan Dum Truck 10 Unit, Pengadaan Motor Roda Tiga 26 unit, Pengadaan Kontener Sampah 34 unit dan Pembangunan TPS Kec. Bahodopi 1 paket. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai IKLH Kabupaten Morowali Tahun 2020-2023 :



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup daerah Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.28
IKLH Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan IV Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan IV RPD
Tahun 2024

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			Persen	NA	NA	NA	NA	50-60 (Tidak Baik)	NA	NA		
		Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	NA	NA	20,08	24,30	24,5	31,79 *	129,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Semua OPD
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persen	NA	NA	NA	NA	55	NA	NA	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Semua OPD

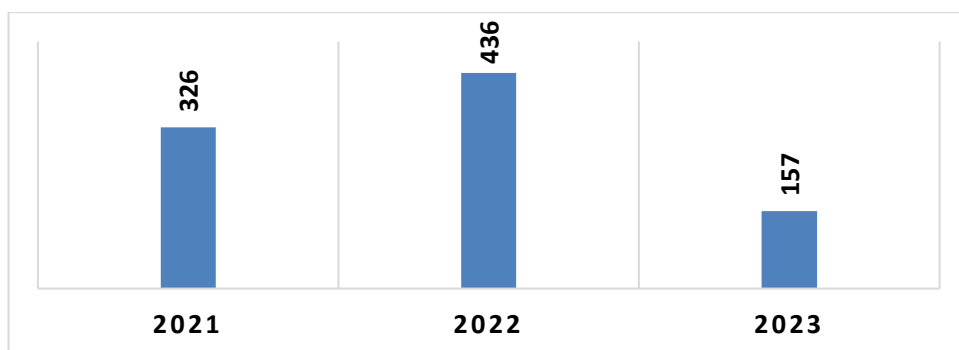
TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	NA	63,71	82,33	81,01	80,54	79,27 *	98,42	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Semua OPD

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

➤ **Tujuan 5 : Menciptakan Tatahan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Rasa Aman dengan target 70 persen. Untuk capaian sampai dengan semester I tahun 2024 indikator ini belum dilakukan pengukuran. Adapun upaya yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain meningkatkan koordinasi dengan Forkopimda dan Forkopimcam dan seluruh instansi vertikal di daerah secara berkala, Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dan Mengaktifkan Tim Penanganan Konflik Sosial. Untuk lebih mengefisienkan pencapaian dalam indikator tujuan V ini ditunjang oleh 4 (empat) indikator sasaran yaitu :

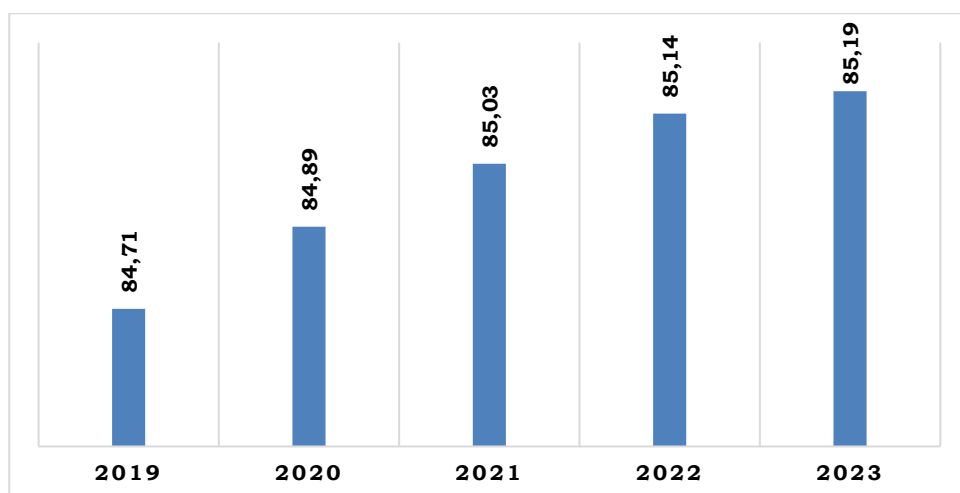
- Angka Kriminalitas, pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 17,50 persen, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 9,21 persen atau 190,01 persen realisasi. Berdasarkan data BPS dalam Buku Kabupaten Morowali dalam Angka tahun 2024 volume 20, Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Morowali, 2021-2023 mengalami penurunan setiap tahunnya. grafik dibawah ini menunjukkan Jumlah Tindak Pidana Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023 :



Sumber : BPS Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.29
Jumlah Kriminal Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI), dengan ketentuan Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data IPG Kabupaten Morowali pada tahun 2023 yang berada pada angka 85,19 persen atau dikategorikan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 85,00 persen, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 mencapai 85,19 persen atau 100,22 persen realisasi. grafik dibawah ini menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023 :

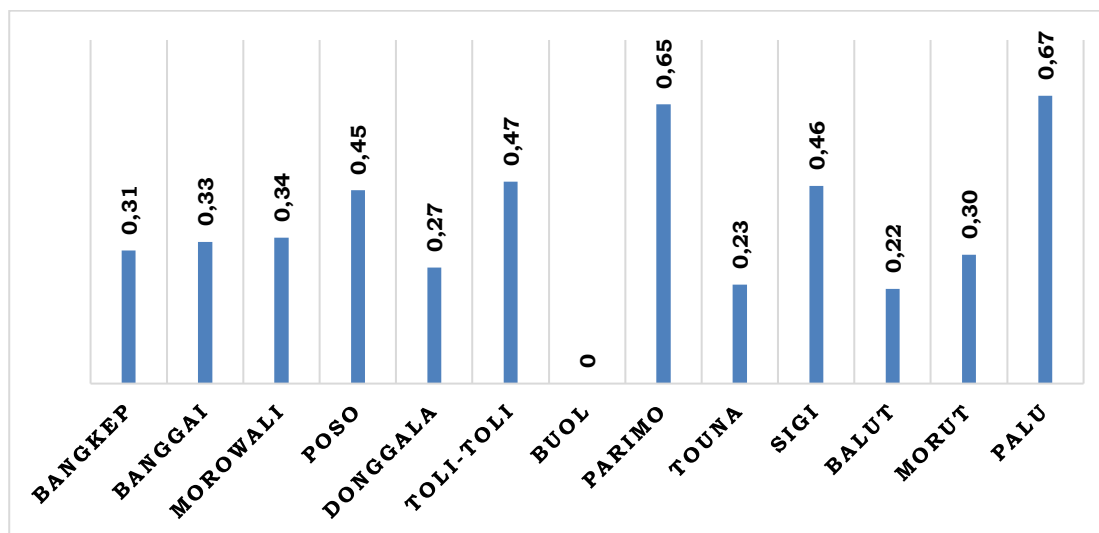


Sumber : BPS Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.30
IPG Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023

- Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan, hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRB, pada tahun 2023 IKD Kabupaten Morowali berada pada

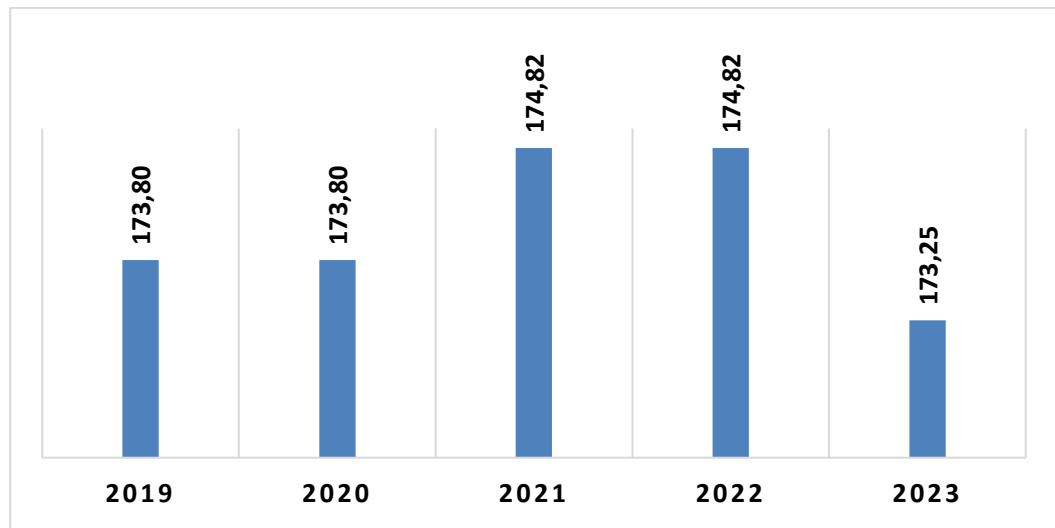
angka 0,34 persen. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah Level 2, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 juga berada pada level 2 atau 100 persen realisasi. grafik dibawah ini menunjukkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana Kabupaten Morowali Tahun 2023 :



Sumber : BPBD Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.31 **IKD Kabupaten Morowali Tahun 2023**

Sementara itu, untuk Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Morowali mengalami penurunan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, namun demikian angka IRB 173,25 tersebut masih termasuk dalam kategori tinggi untuk Indeks resiko bencana. Adapun untuk indesk resiko bencana per ancaman adalah bencana banjir dengan dengan skor 12 atau kategori sedang, bencana gempa bumi dengan skor 32,40 atau kategori tinggi, bencana Tsunami dengan skor 19,20 atau kategori tinggi, bencana kebakaran hutan dan lahan denga skor 24,00 atau kategori tinggi, bencana tanah longsor dengan skor 24,00 atau kategori tinggi, bencana gelombang ekstreme dan abrasi dengan skor 36,00 atau ketegory tinggi, kekeringan dengan skor 16,00 atau kategori tinggi, Cuaca Ekstrem dengan skor 13,60 atau ketegori tinggi, grafik dibawah ini menunjukkan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023 :



Sumber : Buku IRBI BNPB Volume 01, Nomor 01, Januari 2023

Grafik : 2.32
IRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

- Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi, pada tahun 2023 IDM Kab. Morowali mencapai 0,6871. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini adalah 0,6178, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2024 juga berada pada 0,6871 atau 111,22 persen realisasi. Namun pencapaian ini hanya berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2024 secara umum indikator ini masih perlu upaya dan kerja keras pemerintah daerah karena jika melihat data tahun 2023 capaian persentase desa maju masih berada pada angka 24,60 persen atau 31 desa dari 126 yang ada di kabupaten morowali dan sisanya 22 desa kategori mandiri, 49 desa berkembang dan 24 desa tertinggal. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan V Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan V RPD
Tahun 2024

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
Menciptakan Tatahan kehidupan wilayah yang aman, tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah	Indeks Rasa Aman			Indeks	NA	NA	NA	NA	70	NA	NA		
		Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis	Angka Kriminalitas	Persen	25,00	28,00	19,42	19,42	17,5	9,21 *	190,01	Satuan Polisi Pamongpraja	Semua OPD
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,71	84,89	85,03	85,14	85	85,19 *	100,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua OPD

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	%	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022					
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan kemajuan pembangunan Desa	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	Indeks	NA	NA	NA	NA	Level 2	Level 2 *	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Semua OPD
			Indeks Desa Membangun	Indeks	NA	0,6147	0,6261	0,6528	0,6178	0,6871 *	111,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua OPD

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

2.2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja berdasarkan urusan dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Morowali pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Perubahan RPJMD dapat dicapai. Pada RKPD tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Morowali juga menetapkan target kinerja daerah terkait penyelenggaraan urusan Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan indikator berdasarkan urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali tahun 2023 sebagai berikut :

2.2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat ada beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah yaitu Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan Fokus Seni Budaya dan Olahraga. Penurunan produksi ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah mengingat tingginya alih fungsi lahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, hal ini terkait dengan kondisi Kabupaten Morowali sebagai daerah industri tambang yang semakin padat penduduk dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang masuk dari berbagai daerah sehingga kebutuhan ketersediaan pangan juga semakin meningkat. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang dan kesempatan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Morowali. Produksi tanaman perkebunan dengan pencapaian kategori rendah adalah kelapa sawit dan kategori sangat rendah adalah produksi kakao. Kondisi yang terjadi ini sama dengan penurunan yang dialami oleh produksi tanaman pangan yaitu tingginya alih fungsi lahan yang terjadi di kabupaten morowali.

Sementara itu untuk kasus Balita Gizi Buruk mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan jumlah balita Gizi buruk sebanyak 23 orang. Kondisi ini terjadi karena masih kurangnya asupan yang benutrisi sesuai kelompok masing-masing kelompok usia anak. Hal ini patut mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah mengingat tren balita gizi buruk pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan. Uraian indikator dan target kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1.1.1	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (%)	28,21	156,72	29	20,43
1.1.2	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan dengan Migas (%)	28,21	188,07	49	20,43
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	146.599,32	201,25	150.000,00	158.046,43
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	146.599,32	201,25	150.000,00	158.046,43
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	70.515,62	128,66	75.000,00	84.987,24
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	70.515,62	128,66	75.000,00	84.987,24
1.1.7	Laju inflasi (Persen)	3	100	3	4,35
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)				
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	876,42	199,71	835	927,23
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	421,7	127,72	425	498,6
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	20,65	215,83	15	15,42
1.1.9	Indeks Gini	0,285	95	0,27	0,281
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	- Garis Kemiskinan (000)	507.523,00	108,6	525.000,00	568.248,00
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	15,86	129,19	13	15,75
	- Persentase Kemiskinan (%)	12,58	98,09	11	12,31
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,03	82,27	2	1,52
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,54	83,33	0,5	0,32
1.1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,55	98,71	73	73,02
1.1.11	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	87,42	99,73	89	90,75
1.2.	Kesejahteraan Sosial				
1.2.1	Angka Melek Huruf	100	102,04	100	98,91
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,35	95,6	9,36	9,37
1.2.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,36	100,45	13,37	13,38
1.2.4	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	69,23	99,25	69,25	69,37
1.2.5	Balita Gizi Buruk	2	200	2	23
1.2.6	Prevalensi Angka Stunting	5,2	36,13	20-17	6,7
1.2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	41,83	90,76	43	41,83
1.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,74	91,49	63	58,52
1.2.9	Tingkat pengangguran terbuka	3,2	93,75	3	2,84
1.2.10	Rasio Penduduk yang Bekerja	96,8	100,21	97	97,16
1.2.11	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan				
	- PDRB ADHB	269.687,30	130,56	270.000,00	269.687,30
	- PDRB ADHK	129.722,07	93,34	130.000,00	129.722,07
1.2.11	Persentase PAD terhadap pendapatan	26,93	93,36	27,5	32,6
1.2.12	Opini BPK	WTP	100	WTP	WTP
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten				
	- PDRB ADHB	1,6	80,81	2	1,55
	- PDRB ADHK	2,05	101,77	2,5	2,05
1.2.14	Kontribusi sektor Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB Kabupaten				
	- PDRB ADHB	0	0	0,05	0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	- PDRB ADHK	0,11	110	0,12	0,11
1.2.15	Produksi Tanaman Pertanian				
	Padi	42.583,00	110,8	42.000,00	26.940,00
	Jagung	4.937,22	421,3	2.000,00	684,7
	Ubi Kayu	5.070,48	83,91	4.200,00	3.677,57
	Ubi Jalar	778,44	78,61	800	648,7
	Kacang Tanah	55,12	85,6	60	45,07
	Kacang Kedelai	267,3	48,39	130	352
1.2.16	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	0,45	68,18	0,5	0,45
	- PDRB ADHK	0,66	75,86	0,7	0,66
1.2.17	Produksi Tanaman Perkebunan				
	Kelapa	1.025.949	63,62	1.000,00	1.025,95
	Kelapa Sawit	76.096,25	62,57	78.000,00	47.922,95
1.2.18	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	0,05	83,33	0,06	0,05
	- PDRB ADHK	0,08	114,29	0,09	0,08
1.2.19	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	17,29	111,98	18	17,29
	- PDRB ADHK	21,11	101,73	22	21,11
1.2.20	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	0,06	66,67	0,1	0,06
	- PDRB ADHK	0,07	77,78	0,09	0,07
1.2.21	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	0,7	66,04	1,2	0,7
	- PDRB ADHK	0,81	102,53	1,1	0,81
1.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	1,25	132,98	1,35	1,25
	- PDRB ADHK	1,48	180,49	1,5	1,48
1.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	73,19	70,82	72	72,72

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	- PDRB ADHK	67,31	69,88	68	67,31
1.2.24	Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	NA	NA	3,5	NA
	- PDRB ADHK	NA	NA	2,5	NA
1.2.25	Pertumbuhan Industri	NA	NA	0,03	NA
1.2.26	Nilai ICOR	3,51	70,2	3,4	3,51
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga				
1.3.1	Seni Budaya				
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	17	100	17	17
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1	100	1	1
1.3.2	Olahraga				
	Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	14	100	20	14
	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	391	100	394	391

Sumber : Data diolah Bappelitbangda Kab. Morowali Tahun 2024 (* Data Sementara)

2.2.2.2 Aspek Pelayanan Umum

Indikator kinerja dalam aspek pelayanan umum yang merupakan gambaran kinerja pelayanan pemerintahan Kabupaten Morowali yang menjadi acuan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang terkait dengan pelayanan umum pemerintahan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024
Aspek Pelayanan Umum

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
2	ASPEK PELAYANAN UMUM				
2.1.	Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar				
2.1.1	Pendidikan				
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Murid TK	43,86	111,09	45	38,4
	Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	13,75	104,43	14	11,68
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	109,4	103,05	100	96,86
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	99,41	98,09	100	95,01
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	98,22	121,63	100	89,15
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)				
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	100	100	100	100
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	100	100	100	100
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	100	100	100	100
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	93,67	97,18	95	93,69
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	73,13	95,93	75	74,53
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	70,62	100,17	71	79,34
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah				
	- Tingkat SD/MI	97,78	98,77	99	99
	- Tingkat SMP/MTs	94,51	98,02	95	106
	- Tingkat SMA/SMK/MA	90,06	98,49	95	90,06
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah				
	- Tingkat SD/MI	0,29	96,67	0,2	0,3
	- Tingkat SMP/MTs	0,18	100	0,1	1
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,48	100	0,4	5'10
2.1.1.7	Angka Kelulusan				
	- Tingkat SD/MI	100	100	100	100
	- Tingkat SMP/MTs	100	100	100	100
	- Tingkat SMA/SMK/MA	100	100	100	100
2.1.1.8	Angka Yang Melanjutkan				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,71	99,71	100	100
	Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	76,41	99,23	80	79
2.1.1.9	Fasilitas Pendidikan				
	- Tingkat SD/MI	162	109,46	164	149
	- Tingkat SMP/MTs	51	89,47	52	58
	- Tingkat SMA/SMK/MA	26	100	26	26
2.1.1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah				
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	0,1	92,51	0,11	0,1

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs	0,07	56,53	0,08	0,15
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MI	0,03	85,09	0,05	0,03
2.1.1.11	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	11,39	113,09	11,5	10
2.1.1.12	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	12,73	111,7	13	10,14
2.1.1.13	Rasio guru/murid per kelas				
	- Tingkat SD/MI	0,13	252,97	0,15	0,05
	- Tingkat SMP/MTs	0,03	64	0,05	0,05
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,05	100	0,1	0,05
2.1.2.	Kesehatan				
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	0,61	67,21	0,5	0,0141
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1,53	76,47	0,84	2,2
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	0,61	3,023	0,5	11,9
2.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0,29	86,21	0,25	0,013
2.1.2.3	Rasio posyandu per satuan balita	8,13	110,04	10	11,2
2.1.2.4	Rasio puskesmas, poliklinik, Poskesdes dan pustu per satuan penduduk				
	Rasio Sarana Kesehatan	0,255	94,57	0,28	0,089
	Rasio Puskesmas	0,074	147,52	0,08	0,062
	Rasio Poliklinik	0,045	50,44	0,05	0,079
	Rasio Pustu	0,136	54,47	0,17	0,022
2.1.2.5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	0,017	85,11	0,18	0,011
2.1.2.6	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	0,437	63,32	0,5	0,77
2.1.2.7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	5,96	82,03	6	9,69
2.1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	103,09	100	107
2.1.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
2.1.2.10	Persentase Balita Yang Pernah diimunisasi campak	155,5	155,5	100	119
2.1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Jumlah)	197	60,43	100	269
2.1.2.12	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	969,11	513,65	450	251

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
2.1.2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	176	262,69	100	100
2.1.2.14	Penderita Diare Yang Ditangani	2911	210,67	2000	2858
2.1.2.15	Angka kejadian Malaria (Per 100.000 Penduduk)	10,78	62,85	8	10
2.1.2.16	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,02	-89,79	0,02	0,04
2.1.2.17	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0	100	0,55	0
2.1.2.18	Cakupan puskesmas	100	100	100	100
2.1.2.19	Cakupan Puskesmas Pembantu	18,05	92,3	20	29
2.1.2.20	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	82,18	89,49	85	65
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	0,18	80,02	0,2	0,32
2.1.3.2	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	0,01	89,59	0,04	0,004
2.1.3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	24,3	126,91	25	24,49
2.1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	71,8	86,63	75	71,8
2.1.3.5	Rasio jaringan Irigasi	0,87	117,32	0,9	0,61
2.1.3.6	Persentase penduduk berakses air minum	91,91	102,43	93	75
2.1.3.7	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	1,91	83,5	2,5	1,91
2.1.4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;				
2.1.4.1	Rumah layak huni	81,71	90,79	82	82,78
2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;				
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	825	84,56	830	825
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	5	62,5	10	14
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7	82,74	7	14
2.1.6.	Sosial				
2.1.6.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	51.030,48	100	51.030,48	52411
2.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	116,34	100	100	89,03

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
2.1.6.3	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	7	100	7	0
2.1.6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100	100	100	100
2.2.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
2.2.1.	Tenaga Kerja				
2.2.2.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (orang)	35	205,88	30	38
2.2.2.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3	15,12	151,08	16	15,12
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11,74	111,94	12	10,59
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	1	25	5	1
	Rasio KDRT	0,15	37,9	0,1	0,21
2.2.2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	36,34	85,47	39	43,15
2.2.2.4	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,06	104,21	1,02	1,03
2.2.2.5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,87	83,74	0,95	1,03
2.2.2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,01	83,64	1,12	1,18
2.2.3.	Ketahanan Pangan				
2.2.3.1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	132,32	75,71	150	235,63
2.2.3.2	Ketersediaan Energi	4.014,00	130,22	4100	4.014,00
2.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	82,13	84,03	85	44,98
2.2.5.	Lingkungan Hidup				
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada	100	Ada	Ada
2.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	100	Ada	Ada
2.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	100	Ada	Ada
2.2.5.4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak Ada	100	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.5.5	Penetapan MHA	Tidak Ada	100	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	100	Tidak Ada	Tidak Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
2.2.6.	Kependudukan dan Catatan Sipil				
2.2.6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	132.824,27	79,4	133.000	183.957
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	23.497,00	93,7	25.000	22253
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	179	92,77	100	158
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Ada	100	Ada	Ada
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	100	Ada	Ada
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100	100	100	100
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143	100	143	143
2.2.7.3	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100
2.2.7.4	Posyandu aktif	153	99,35	153	149
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	4,96	229	5	5,05
2.2.8.2	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	87,34	105,51	88	72,18
2.2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	68,71	79,29	69	72
2.2.8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17,54	41,04	18	25,41
2.2.8.5	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100
2.2.9.	Perhubungan				
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	18.851,00	95,47	19000	32400
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	12	51,19	13	36
2.2.9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	100	10	3
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	57	13,41	60	198
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,33	669,3	0,35	0,38
2.2.9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun				
	Angkutan Laut				
	Jumlah Penumpang Turun	9.676,72	93,16	9700	11.604,00
	Jumlah Penumpang Naik	9.718,62	97,48	9800	10.692,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	214.033,55	96,92	220000	6.684,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	Jumlah barang muat (ton)	500.409,20	101,61	510000	5.964,00
	Angkutan Udara				
	Jumlah Penumpang Datang	31.271,00	52,35	32000	56.092,00
	Jumlah Penumpang Berangkat	21.973,00	132,54	22000	50.431,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	244.256,00	193,26	250000	450.705,00
	Jumlah barang muat (ton)	99.202,00	234,14	100000	280.291,00
2.2.10.	Komunikasi dan Informatika				
2.2.10.1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet			0,15	
2.2.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	39,1	135,87	40	40,12
2.2.12.	Penanaman Modal				
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	87	174	90	70
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	101.146.180.000.000,00	336,67	150.000,00	70.929.530.
2.2.13	Kepemudaan dan Olahraga				
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda).	95,04	98,85	95,5	95,04
2.2.14.	Statistik				
2.2.14.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Ada	100	Ada	Ada
2.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	100	Ada	Ada
2.2.14.3	Buku PDRB	Ada	100	Ada	Ada
2.2.15.	Persandian				
2.2.16.	Kebudayaan				
2.2.17.	Perpustakaan				
2.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	2.508,00	52,78	2,600,00	5105
2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar				
2.3.1.	Pariwisata				
2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	3.624,00	57,57	4000	3516
2.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	3	100	3	3
2.3.2.	Pertanian				
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pertanaian				
	- PDRB ADHB	1,98	100	2	1,98
	- PDRB ADHK	2,01	100	2,5	2,01
2.3.2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	0	0,76	0,01	0
	- PDRB ADHK	0,11	114,47	0,11	0,11

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB				
	- PDRB ADHB	0,45	67,48	0,8	0,45
	- PDRB ADHK	0,66	96,98	0,9	0,66
2.3.2.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar				
	Padi	4,567	90,11	46	4,9
	Jagung	1,581	19,13	23	4,1
	Ubi Kayu	29,069	84,77	290,69	25,544
	Ubi Jalar	20,395	82,5	203,95	12,974
	Kacang Tanah	1,077	87,78	10,77	1,06
	Kacang Kedelai	2,082	103,63	20,82	1,1
	Kacang Hijau	0,66	49,25	0,66	1
2.3.3.	Kehutanan				
2.3.3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	37,2	100	37,2	37,2
2.3.4.	Energi dan Sumberdaya Mineral				
2.3.4.1	Rumah tangga pengguna listrik	99,94	105,2	99,99	99,94
2.3.4.2	Daya Terpasang (Kwh)	43.968.432,00	102,25	43.968.432,00	44.289.732,00
2.3.5.	Perdagangan				
2.3.4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	37.654,87	83,31	38.000,00	37.654,87
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan				
2.3.5.1	Produksi Perikanan (ton)				
	Produksi Perikanan Laut (ton)	33.420,80	88,21	34.350,00	37755
	Produksi Perikanan Darat (Ton)	2.981,00	168,5	3.000,00	3463
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.220,32	11,35	2.500,00	34292
2.3.5.2	Konsumsi Ikan Perkapita	57,3	110,45	58	52,33
2.3.5.3	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	1,04	100	1,04	1,04
2.4.	Fokus Layanan Urusan Penunjang				
2.4.1	Perencanaan Pembangunan				
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	100	Ada	Ada
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	100	Ada	Ada
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	100	Ada	Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	100	Ada	Ada
2.4.2	Keuangan				
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	100	WTP	WTP
2.4.2.2	Persentase SILPA	1,01	98,99	1	14,54
2.4.2.3	Persentase belanja langsung	80,25	153,38	80	78,65
2.4.2.4	Persentase belanja belanja tidak langsung	19,75	41,42	20	21,35
2.4.2.5	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.3	Kepegawain serta Pendidikan dan Pelatihan				
2.4.4	Penelitian dan Pengembangan				
2.4.5	Pengawasan				
2.4.6	Sekretariat Dewan				
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	100	Ada	Ada
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada	100	Ada	Ada
2.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	100	Ada	Ada

Sumber : Data diolah Bappelitbangda Kab. Morowali Tahun 2024 (* Data Sementara)

2.2.2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Ada beberapa indikator yang dapat mengukur Aspek daya saing daerah salah satunya Fasilitas Wilayah/Infrastruktur untuk lebih jelasnya uraian indikator dan target kinerja Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tahun 2024
Aspek Daya Saing Daerah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN 2022		TAHUN 2024	
		REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI (*)
3	DAYA SAING DAERAH				
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah				
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	NA	NA	25	NA
3.1.2	Produktivitas Total Daerah	1.204,02	100	1250	1.404,47
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	0,05	100	0,05	0,05
3.2.2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun				
	Angkutan Laut				
	Jumlah Penumpang Turun	10.387,45	100	10500	11.604,00
	Jumlah Penumpang Naik	9.970,24	100	10500	10.692,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	220.826,10	100	230000	166.840,00
	Jumlah barang muat (ton)	492.496,40	100	500000	596.400,00
	Angkutan Udara				
	Jumlah Penumpang Datang	59.739,04	100	60000	56.092,00
	Jumlah Penumpang Berangkat	16.577,64	100	17000	50.431,00
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	126.388,48	100	130000	450.705,00
	Jumlah barang muat (ton)	42.367,92	100	60000	280.291,00
3.2.3	Jenis dan jumlah bank dan cabang				
	Bank Umum	19	111,76	19	19
	Bank Perkreditan Rakyat	4	100	4	4
3.2.4	Jumlah Restoran/Rumah Makan				
	- Jumlah Rumah Makan	75	250	75	253
3.2.5	Jumlah Penginapan/Hotel	40	100	40	40
3.2.6	Persentase RT Berakses Air bersih	91,91	102,43	92	91,88
3.2.7	Rumah tangga pengguna listrik	99,94	105,2	99,99	98,3
3.3.	Fokus Iklim Berinvestasi				
3.3.1	Angka Kriminalitas	24,74	54,17	17	9,21
3.3.2	Jumlah Demonstrasi	8	75	6	17
3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia				
3.4.1	Tingkat Ketergantungan				
	- Rasio Ketergantungan	43,38	99,93	43	34,61

Sumber : Data diolah Bappelitbangda Kab. Morowali Tahun 2024 (* Data Sementara)

2.3 Realisasi APBD Semester I Tahun 2024

✓ Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.028.965.078.636 atau mengalami peningkatan sebesar 12,83 persen dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.798.260.416.252,00. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024, realisasi pendapatan daerah adalah sebesar atau mencapai 12,73 persen dari Target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 258.239.309.094,58 dengan rincian pendapatan daerah sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024 sebesar Rp. 335.390.779.881,04 atau mencapai 54,22 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 618.565.103.333,00, Prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran diperkirakan sebesar Rp. 797.574.000.000,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 171.654.791.347,02 atau mencapai 32,25 persen dari target sebesar Rp. 346.381.103.333,00. Retribusi Daerah sebesar Rp. 108.539.158.761,00 atau mencapai 53,23 persen dari target sebesar Rp. 203.924.000.000,00. Sementara itu untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah belum ada realisasi dari target yang ditetapkan.
- Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024 sebesar Rp. 549.679.146.281,00 atau mencapai 39,21 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.401.849.416.127,00. Prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran diperkirakan sebesar Rp. 1.407.480.915.911,00. Realisasi Pendapatan Transfer ini bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dana perimbangan sebesar Rp. 530.940.720.286,00 atau sebesar 39,76 persen, sementara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer

Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp. 18.738.426.013,00 atau sebesar 28,13 persen.

- Realisasi Lain-lain PAD yang SAH Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024 belum ada realisasi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.550.559.176,00 Untuk jelasnya Realisasi Pendapatan Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.14 dibawah ini :

Tabel 2.14
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Kabupaten Morowali Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.028.965.078.636,00	885.069.926.162,04	43,62
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	618.565.103.333,00	335.390.779.881,04	54,22
4.1.01	Pajak Daerah	346.381.103.333,00	171.654.791.347,02	49,56
4.1.02	Retribusi Daerah	203.924.000.000,00	108.539.158.761,00	53,23
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.860.000.000,00	55.196.829.773,02	83,81
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	618.565.103.333,00	335.390.779.881,04	54,22
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.401.849.416.127,00	549.679.146.281,00	39,21
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.335.243.090.000,00	530.940.720.268,00	39,76
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.606.326.127,00	18.738.426.013,00	28,13
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	66.606.326.127,00	18.738.426.013,00	28,13
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.401.849.416.127,00	549.679.146.281,00	39,21
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.550.559.176,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.550.559.176,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.550.559.176,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.028.965.078.636,00	885.069.926.162,04	43,62

Sumber : BPKAD Kab. Morowali April 2024 (Diolah Kembali)

✓ **Realisasi Belanja Daerah**

Belanja Daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.512.361.332.727,00 atau mengalami peningkatan sebesar 16,81 persen dari tahun 2023 sebesar Rp. 2.150.817.432.038,00 Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024, realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp. 761.869.497.628,88 atau mencapai 30,32 persen dari total belanja yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali pada tahun 2024 Prognosis sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 2.850.693.713.398,00 adapun rincian belanja daerah sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Morowali sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp. 552.178.460.083,65 atau mencapai 35,18 persen dari total belanja operasi sebesar Rp. 1.569.790.149.638,00 Prognosis sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 1.646.480.403.014,00. Realisasi Belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 262.763.238.308,00 atau mencapai 40,73 persen dari total belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 221.861.452.871,79 atau mencapai 27,85 persen dari total belanja barang dan jasa, Realisasi Belanja Bunga Rp. 590.868.903,86 atau mencapai 35,51 persen dari total belanja bunga, Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 64.409.400.000,00 atau mencapai 76,12 persen dari total belanja hibah dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.553.500.000,00 atau mencapai 6,10 persen dari total belanja bantuan sosial.
- Realisasi Belanja Modal Kabupaten Morowali sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp. 118.729.331.982,23 atau mencapai 18,50 persen dari total belanja modal sebesar Rp. 641.760.981.956,00. Realisasi Belanja Modal ini terdiri dari Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 15.576.927.900,00 atau mencapai 14,54 persen dari total belanja tanah, realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 42.483.414.139,00

atau mencapai 34,58 persen dari total belanja modal peralatan dan mesin, Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 33.022.024.773,23 atau mencapai 15,28 persen dari total belanja gedung dan bangunan, realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 27.531.965.170,00 atau mencapai 14,34 persen dari total belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, realisasi belanja Modal Aset lainnya sebesar Rp. 115.000.000,00 atau mencapai 20,09 persen dari target belanja Modal Aset lainnya. Sementara itu untuk belanja Aset Tetap Lainnya belum ada realisasi dari target yang ditetapkan.

- Realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan semester I tahun 2024 belum ada realisasi dari target yang ditetapkan. Prognosis sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 35.000.000.000,00
- Realisasi belanja transfer sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp. 90.961.705.563,00 atau mencapai 34,22 persen dari total belanja transfer pada tahun 2024, Prognosis sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 283.711.090.799,00. realisasi belanja bantuan keuangan daerah sebesar 90.961.705.563,00 atau mencapai 43,13 persen dari total belanja bantuan keuangan daerah pada tahun 2024. Sementara untuk Realisasi belanja transfer Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa belum ada realisasi dari target yang ditetapkan dan Lebih jelasnya Realisasi belanja daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.15 dibawah ini :

Tabel 2.15
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Kabupaten Morowali Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.512.361.332.727,00	761.869.497.628,88	30,32
5.1	BELANJA OPERASI	1.569.790.149.638,00	552.178.460.083,65	35,18
5.1.01	Belanja Pegawai	645.110.197.979,00	262.763.238.308,00	40,73
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	796.558.764.689,00	221.861.452.871,79	27,85

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.1.03	Belanja Bunga	1.664.000.000,00	590.868.903,86	35,51
5.1.05	Belanja Hibah	84.610.261.970,00	64.409.400.000,00	76,12
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	41.846.925.000,00	2.553.500.000,00	6,10
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.569.790.149.638,00	552.178.460.083,65	35,18
5.2	BELANJA MODAL	641.760.981.956,00	118.729.331.982,23	18,50
5.2.01	Belanja Modal Tanah	107.144.601.000,00	15.576.927.900,00	14,54
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.844.272.154,00	42.483.414.139,00	34,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	216.081.285.242,00	33.022.024.773,23	15,28
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192.010.404.546,00	27.531.965.170,00	14,34
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.107.904.214,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	572.514.800,00	115.000.000,00	20,09
	JUMLAH BELANJA MODAL	641.760.981.956,00	118.729.331.982,23	18,50
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	35.000.000.000,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	35.000.000.000,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	265.810.201.133,00	90.961.705.563,00	34,22
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	54.915.510.333,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	210.894.690.800,00	90.961.705.563,00	43,13
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	265.810.201.133,00	90.961.705.563,00	34,22
	JUMLAH BELANJA	2.512.361.332.727,00	761.869.497.628,88	30,32
	SURPLUS/DEFISIT	(483.396.254.091,00)	123.200.428.533,16	(25,49)

Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali

✓ Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Morowali sampai dengan semester I Tahun 2024, realisasi Pembiayaan daerah adalah sebesar Rp. 312.255.299.934,93 atau mencapai 64,60 persen dari total pembiayaan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali yaitu sebesar Rp. 483.396.254.091,00. Prognosis sampai

dengan akhir tahun adalah sebesar Rp. 638.327.306.803,00 Adapun rincian Pembiayaan daerah sebagai berikut :

- Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah pada sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 312.890.783.301,60 atau mencapai 63,02 persen dari target Penerimaan Pembiayaan daerah sdalam APBD kabupaten Morowali sebesar Rp. 496.458.872.641,00 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya.
- Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah sampai dengan semester I tahun 2024 belum terdapat realisasi dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 13.062.618.550,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 1.500.000.000 dan Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat sebesar Rp. 11.562.618.550,00. Lebih jelasnya Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.9 dibawah ini :

Tabel 2.16
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
Kabupaten Morowali Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH	483.396.254.091,00	312.255.299.934,93	64,60
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	496.458.872.641,00	312.890.783.301,60	63,02
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	496.458.872.641,00	312.890.783.301,60	63,02
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	496.458.872.641,00	312.890.783.301,60	63,02
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.062.618.550,00	635.483.366,67	4,86
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.562.618.550,00	635.483.366,67	5,50
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.062.618.550,00	635.483.366,67	4,86
	PEMBIAYAAN NETTO	483.396.254.091,00	312.255.299.934,93	64,60

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	435.455.728.468,09	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali Tahun 2024 (data Diolah Kembali)

2.4 Capaian Kinerja Indikator Program.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali untuk periode tahun 2024 merinci besaran proyeksi Kapasitas Riil Keuangan yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Besaran nilai Kapasitas Riil Keuangan sangat menentukan besaran anggaran untuk membiayai setiap program prioritas, olehnya penganggaran terhadap sejumlah program sudah memperhitungkan Kapasitas Riil Keuangan dengan mempertimbangkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika komponen pada Belanja Tidak Langsung (BTL) dan komponen Belanja Langsung (BL).

Evaluasi kinerja perangkat daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengevaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Perangkat daerah sebagai pelaksana program memiliki peran penting dalam pencapaian visi misi pembangunan daerah Kabupaten Morowali. Untuk itu evaluasi terhadap kinerja urusan/perangkat daerah dilakukan untuk memberikan gambaran capaian perangkat daerah sekaligus dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pejabat kepala daerah terhadap kinerja perangkat daerah di Kabupaten Morowali. Evaluasi perangkat daerah Kabupaten Morowali periode pembangunan daerah tahun 2024 dilakukan perbandingan capaian indikator program dan realisasi keuangan perangkat daerah Kabupaten Morowali. Hasil evaluasi kinerja OPD di Kabupaten Morowali dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.17
Evaluasi Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Pengelolaan Satuan Pendidikan	%	187.750.239.833	96	15.141.070.370	24	8,064 %	0,003 %	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Kurikulum Yang dikembangkan	%	751.392.890	98.00	0	0	0 %	0 %	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikat Pendidik	%	6.621.926.400	100	139.948.000	25	2,113 %	0,003 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	247.112.832.230	100	43.707.435.961	25	17,687 %	0,003 %	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Daerah yang di Kembangkan	%	4.125.595.500	97	38.846.099	25	0,942 %	0,003 %	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	1.360.969.200	65	17.345.000	20	1,274 %	0,003 %	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda budaya dan seni yang dilestarikan	%	1.912.595.000	75	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Orang	10.104.504.814	183 (APBD)	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	.	139.150.578.823	BB (APBD)	28.156.283.963,79	18 %	20,234 %	0 %	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.02.0.00.0.00.02.0002	Rumah Sakit Pratama									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	Persen	9.097.367.863	100 (APBD)	0	0	0 %	0 %	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang ditingkat Sumber dayanya	Persen	477.842.000	14 (APBD)	74.200.000	2,17	15,528 %	14,286 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	23.664.856.968	100 (APBD)	2.887.551.685	12	12,202 %	12 %	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	AKB	0	15.7	0	2,8	0 %	0,001 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
		Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	AKI	68.772.430.210	183	5.070.327.798	2,8	7,373 %	0 %	
		Angka Kesakitan	-	0	35	0	2,8	0 %	0,001 %	
		Prevalensi Wasting	-	0	1.6	0	2,8	0 %	0,013 %	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang ditingkatkan Sumber dayanya	%	843.295.500	36	0	0	0 %	0 %	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan Mamin yang memenuhi standar	%	314.130.850	100	0	25	0 %	0,003 %	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kebijakan Berwawasan Kesehatan	Kebijakan	26.326.500	13	0	3	0 %	0,002 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	103.063.242.208	100	25.262.251.667	10,20	24,511 %	0,001 %	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kepadatan Penduduk	%	329.025.266	40	0	0	0 %	0 %	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	Angka	0	18	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
		Cakupan Peserta KB Aktif	%	3.732.723.911	60	0	0	0 %	0 %	
		Total Fertility Rate (TFR)	Angka	0	1	0	0	0 %	0 %	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	%	1.356.135.572	70.00	0	0	0 %	0 %	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	%	41.370.219.969	15.68	2.021.720.448	2,51	4,887 %	0,001 %	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	4.531.554.957	86.38	109.820.000	3	2,423 %	0 %	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	8.556.355.190	70.52	1.545.000.000	0	18,057 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	58.485.475.136	87.90	7.545.695.840	15	12,902 %	0,002 %	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	110.955.266.333	38.68	3.796.730.100	1	3,422 %	0 %	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	18.5	0	0	0 %	0 %	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	414.456.570	3.5	0	0	0 %	0 %	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	%	4.073.056.900	19.00	471.877.087	13,11	11,585 %	0,007 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	16.436.218.372	100	4.991.144.426	30,37	30,367 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan									
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	Unit	1.076.536.000	400	0	0	0 %	0 %	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	34.311.231.066	41.50	0	0	0 %	0 %	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	59.918.684.001	70.00	7.178.494.905	8,38	11,98 %	0,001 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	7.052.672.159	100	1.879.329.799	27,05	26,647 %	0,003 %	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan	%	100.689.225.000	70	1.112.994.600	1,10	1,105 %	0 %	
		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilakukan	%	0	100	0	1,10	0 %	0 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase penanganan pasca bencana	%	0	100	0	5	0 %	0,001 %	
		Presentase penanganan pra bencana	%	7.105.882.413	100	360.114.230	5	5,068 %	0,001 %	
		Presentase penanganan tanggap darurat bencana	%	0	100	0	5	0 %	0,001 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	6.046.145.186	100	1.014.923.774	16	16,786 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamongpraja									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	%	645.655.960	100	71.100.000	7,39	11,012 %	0,001 %	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	0	100	0	7,39	0 %	0,001 %	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kasus kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	%	82.172.303	100	0	0	0 %	0 %	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	menit	0	30	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	21.178.487.363	100	8.101.529.263	37,63	38,254 %	0,004 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial									
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang di berdayakan	%	348.833.754	6,10	0	0	0 %	0 %	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase terhadap jumlah PPKS	%	6.703.717.040	19.66	1.593.861.000	12,7	23,776 %	0,006 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)	%	8.032.000.235	98.30	1.204.364.500	46,62	14,995 %	0,005 %	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan penanganan	%	352.012.298	85	0	13,7	0 %	0,002 %	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	%	64.340.250	71.60	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	6.237.593.119	100	2.575.047.985	41,94	41,283 %	0,004 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah									
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan yang Menyusun RTK	%	149.827.000	63.50	0	0	0 %	0 %	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi dan LPTKS yang dibina	%	1.862.527.486	50.90	25.968.700	5,90	1,394 %	0,001 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	758.049.908	62.20	144.745.397	13,56	19,094 %	0,002 %	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	573.410.100	71.80	33.418.900	30,70	5,828 %	0,004 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	%	6.668.095.499	100	1.087.819.388	11,39	16,314 %	0,001 %	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	%	667.383.775	100	20.955.000	0	3,14 %	0 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	157.374.450	100.00	0	0	0 %	0 %	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan tertangani	%	26.929.850	35.50	0	0	0 %	0 %	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	26.487.600	35.00	0	0	0 %	0 %	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	0	90	0	0	0 %	0 %	
		persentase peningkatan produktivitas peternakan	%	0	0	0	0	0 %	0 %	
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	0	0	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Pengembangan Infratraktur Pertanian/Perkebunan	%	3.294.104.600	76.00%	0	0	0 %	0 %	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	260.874.700	100	0	0	0 %	0 %	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan/Kelompok Tani yang Dibina	%	6.575.279.398	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	20.190.501.887	100	3.790.200.294	19	18,772 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah									
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	%	661.332.000	85	29.423.350	0	4,449 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan	%	394.000.140	75.00	29.547.496	0	7,499 %	0 %	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	767.898.604	16.00	166.100.000	3,5	21,63 %	0,002 %	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Pengelolaan Limbah B3	%	283.475.830	100.00	14.593.238	5,14	5,148 %	0,001 %	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	%	60.980.000	78.00	8.500.000	1,11	13,939 %	0 %	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup yang memperoleh penghargaan	%	0	0	0	0	0 %	0 %	
		Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan	%	0	0	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	%	160.063.000	100	29.038.530	0	18,142 %	0 %	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota	%	27.983.245.175	18.18	1.395.998.500	0	4,989 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	6.821.955.223	100	831.190.471	12,18	12,184 %	0,001 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah									
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan KTP-el	%	0	100	0	13	0 %	0,001 %	
		Persentase anak memiliki KIA per satuan anak	%	0	100	0	13	0 %	0,001 %	
		Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	%	181.468.000	100	19.255.000	13	10,611 %	0,001 %	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	%	0	100	0	24	0 %	0,002 %	
		Rasio bayi ber-Akta Kelahiran	%	0	89	0	24	0 %	0,003 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
		Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah	%	262.518.000	100	32.080.000	24	12,22 %	0,002 %	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	%	273.120.000	100	0	0	0 %	0 %	
		Penerapan KTP-el berbasis NIK	%	0	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	7.113.368.004	100	563.749.333	58	7,925 %	0,006 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.13.2.08.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan	%	166.580.000	100	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0	0	0	7	0 %	∞ %	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera	%	76.660.000	52.50	40.310.000	25	52,583 %	0,005 %	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase Data anak Dan Gender	%	0	100	0	0	0 %	0 %	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian klaster Kabupaten Layak Anak	%	349.908.245	100	77.131.429	22	22,043 %	0,002 %	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase korban yang mendapatkan layanan	%	286.524.400	100	31.446.800	10	10,975 %	0,001 %	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	%	0	100	0	0	0 %	0 %	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama	%	142.974.000	84.90	20.286.138	23	14,189 %	0,003 %	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	1.374.061.000	100	101.734.669	13	7,404 %	0,001 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	%	2.528.554.862	77.00	28.079.484	0,1	1,11 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	7.559.692.063	100	2.271.351.863	25	30,046 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan Daerah									
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	5.400.699.935	100	22.148.000	10	0,41 %	0,001 %	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan Sarana, Informasi, Korodinas dan Disiplin Angkutan Penyebrangan	%	7.411.411.013	65.50	83.399.000	5	1,125 %	0,001 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	7.052.262.666	100	1.898.636.076	30	26,922 %	0,003 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah									
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	%	2.085.797.395	65	200.044.801	20.00	9,591 %	0,003 %	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	25.00	0	20.00	0 %	0,008 %	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	0	0	25.00	0	20.00	0 %	0,008 %	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	ndeks SPBE Kabupaten Morowali hasil Evaluasi dan Pemantauan Tahun oleh	%	4.217.598.150	2.20	422.674.161	100	10,022 %	0,455 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
		Kempan-RB								
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan kandomain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	%	0	100	0	100	0 %	0,01 %	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi kan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	0	100	0	100	0 %	0,01 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	6.661.383.042	100	1.803.599.409	25	27,075 %	0,003 %	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	0	100	0	100	0 %	0,01 %	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks SPBE Kabupaten Morowali pada Domain Manajemen SPBE	Indeks	521.533.270	1	71.251.738	1	13,662 %	0,01 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	Persentase Koperasi yang Aktif	%	109.938.500	32.50	68.075.853	7,0	61,922 %	0,002 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
	KOPERASI									
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	119.979.500	4.38	0	0	0 %	0 %	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	177.997.790	70.00	0	0	0 %	0 %	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	149.938.000	6.41	31.799.500	22,53	21,208 %	0,034 %	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	7.328.043.841	1.46	34.291.071	0	0,468 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	14.116.262.551	100	922.678.953	21,9	6,536 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase PMDN yang mendapat fasilitas / insentif kemudahan penanaman modal	%	327.000.000	100	0	0	0 %	0 %	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN) di kabupaten/kota	%	506.338.650	5.00	8.360.000	34,31	1,651 %	0,068 %	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	%	358.733.500	100	35.100.000	10,89	9,784 %	0,001 %	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Realisasi Penanaman Modal	%	479.384.000	100	0	0	0 %	0 %	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)	%	0	100	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	9.843.431.127	100	2.066.407.137	32,59	20,993 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata									
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam berwirausaha	%	1.376.050.565	68	14.250.000	0,5	1,036 %	0 %	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing olahraga	%	32.294.056.233	10	162.688.000	0	0,504 %	0 %	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi Kepramukaan yang dikembangkan	%	235.343.626	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	8.324.984.070	100	1.845.807.646	10	22,172 %	0,001 %	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA	Persentase objek wisata yang	%	221.877.000	23	6.710.000	0	3,024 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
	TARIK DESTINASI PARIWISATA	dikelola								
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	presentase objek wisata yang dipromosikan	%	448.259.400	9.43	8.360.000	2	1,865 %	0,002 %	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	%	4.604.003.694	29.41	831.654.950	13	18,064 %	0,004 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan Daerah									
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan di Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	1.021.846.135	90	56.904.250	6	5,569 %	0,001 %	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi hasil pelestarian naskah kuno	koleksi	42.810.800	1050	17.560.000	525	41,018 %	0,005 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	5.669.056.390	100	620.371.076	25	10,943 %	0,003 %	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD/ yang menerapkan arsip secara baku	%	481.089.220	35	55.063.069	11	11,446 %	0,003 %	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase penyelamatan arsip	%	0	90	0	23	0 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan Daerah									
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	Ton	33.422.667.775	38,000	1.978.320.000	11.447	5,919 %	0,003 %	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	2.510.064.191	30,000	98.355.000	4.056	3,918 %	0,001 %	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunannya Illegal Fishing	%	0	20	0	7	0 %	0,003 %	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan	Ton	2.824.404.049	6,878	127.678.000	2.439	4,521 %	0,004 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	9.016.630.146	100	3.750.866.610	25	41,599 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
	BIDANG XX									
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian									
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	89.954.500	28.00	4.250.000	1,32	4,725 %	0 %	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	259.630.500	30.00	16.022.336	1,85	6,171 %	0 %	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	1.111.218.600	100	432.011.067	38,87	38,877 %	0,004 %	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang tera ulang	%	223.939.000	55	37.323.800	9,16	16,667 %	0,002 %	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentases Produk Dalam Daerah yang di Promosikan Di luar	%	84.570.500	33.50	39.094.000	15,48	46,227 %	0,004 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	32.890.000	100	0	27,17	0 %	0,003 %	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten	%	5.405.608.639	35	923.261.251	5,97	17,08 %	0,001 %	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi dan dipantau	%	66.936.000	22.00	573.000	0,18	0,856 %	0 %	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	%	134.391.250	37.80	24.430.000	6,87	18,178 %	0,002 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	5.236.470.612	100	1.432.099.997	0	27,349 %	0 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Administrasi Pembangunan									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	1.420.356.350	100 (APBD)	339.752.700	24	23,92 %	24 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	1.210.880.970	100 (APBD)	119.495.198	37	9,868 %	37 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	544.741.000	100% (APBD)	40.270.000	7	7,393 %	7 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	%	833.258.410	100% (APBD)	487.472.872	59	58,502 %	59 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Hukum									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan	%	3.208.939.000	100 (APBD)	834.215.517	40	25,997 %	40 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	1.138.699.580	100 (APBD)	414.063.880	50	36,363 %	50 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Kesejahteraan Rakyat									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Belum menginput indikator program								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Belum menginput indikator program								
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Organisasi									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.933.209.173	3 (APBD)	418.260.286	1	21,636 %	33,333 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Tata Pemerintahan									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan	Persen	1.609.505.375	100 (APBD)	71.117.700	5,56	4,419 %	5 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	847.913.405	100 (APBD)	142.899.224	7,08	16,853 %	7 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	1.632.191.000	100% (APBD)	370.848.000	35	22,721 %	35 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	%	718.789.200	100% (APBD)	212.547.530	23	29,57 %	23 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan administrasi umum Pemerintah Daerah yang berjalan dengan baik dan lancar	Bulan	4.586.264.104	12 (APBD)	1.992.416.025	3	43,443 %	25 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Umum									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Belum menginput indikator program								
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah									
4.02	SEKRETARIAT DPRD									
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	10.204.475.750	100	2.982.917.890	29,23%	29,231 %	0,003 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	31.735.559.268	100	7.837.797.676	26,46%	24,697 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah									
5.01	PERENCANAAN									
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	3.336.090.350	80	263.653.000	50	7,903 %	0,006 %	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	2.461.496.150	100	285.316.000	95	11,591 %	0,01 %	
		Indeks Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	0	100	0	95	0 %	0,01 %	
		Indeks Kualitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0	100	0	95	0 %	0,01 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	12.492.584.002	100	1.593.082.764	27	12,752 %	0,003 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan yang diimplementasikan	%	1.524.426.720	85	55.045.000	15	3,611 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah									
5.02	KEUANGAN									
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Opini BPK atas LKPD	-	0	15	0	15	0 %	0,01 %	
		Kemandirian Keuangan & Fleksibilitas	-	0	2.00	0	15	0 %	0,075 %	
		Kesesuaian Nomenklatur dan Pagu Program RKPD, KUA-PPAS dan APBD	-	306.553.650.623	4.00	4.577.736.968	15	1,493 %	0,038 %	
		Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD yang bersifat Mandatory	-	0	4.00	0	15	0 %	0,038 %	
		Persentase Penyerapan Anggaran Belanja dalam APBD	-	0	4.00	0	15	0 %	0,038 %	
		Sovabilitas	-	0	4.00	0	15	0 %	0,038 %	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN	Indeks Manajemen Pengelolaan Aset	%	1.489.110.750	65	158.027.500	33	10,612 %	0,005 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
	BARANG MILIK DAERAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	74.576.316.191	100	4.282.514.331	50	5,742 %	0,005 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah									
5.02	KEUANGAN									
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Jumlah SPPT yang Tertagih	%	0	91.5	0	30.14	0 %	0,003 %	
		Persentase objek pajak yang ditetapkan berdasarkan potensi pajak	%	0	100	0	30.14	0 %	0,003 %	
		Persentase objek pajak yang tertagih	%	0	100	0	30.14	0 %	0,003 %	
		Persentase peningkatan potensi pajak	%	4.328.340.602	100	296.067.113	30.14	6,84 %	0,003 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	31.898.476.095	100	1.820.835.842	25	5,708 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
5.03	KEPEGAWAIAN									
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Jabatan Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0	46.70	0	19,36	0 %	0,004 %	
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	3.954.945.000	9.94	225.279.313	19,36	5,696 %	0,019 %	
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0	77.82	0	19,36	0 %	0,002 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	5.840.049.836	100	1.110.537.609	20	19,016 %	0,002 %	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	%	4.327.222.000	88.24	34.975.703	67,11	0,808 %	0,008 %	
		Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	%	0	73.83	0	67,11	0 %	0,009 %	
		Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	%	0	37.13	0	67,11	0 %	0,018 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah									
6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	0	100	0	15	0 %	0,002 %	
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	%	0	65	0	15	0 %	0,002 %	
		Persentase penyelesaian Tindakanlanjutan hasil temuan BPK dan APIP	%	2.639.640.000	75	265.850.000	15	10,071 %	0,002 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	LEVEL 3	1.687.031.000	3,10	110.556.000	3,10	6,553 %	0,01 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	%	17.475.186.805	100	5.141.634.345	28	29,422 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bahodopi									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	41.062.000	78.20	9.372.250	0	22,825 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bahodopi	%	641.969.350	10	48.530.000	0	7,56 %	0 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bahodopi	%	16.656.000	100	3.826.000	0	22,971 %	0 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	58.165.000	100	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bahodopi	%	0	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	7.137.915.455	100	796.080.793	16,4	11,153 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Bumi Raya									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	59.617.500	73	59.070.000	99.1	99,082 %	0,014 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bumi Raya	%	563.017.036	10	20.550.000	3.6	3,65 %	0,004 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bumi Raya	kasus	14.800.000	100	0	20	0 %	0,002 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	122.512.500	100	13.400.000	10.9	10,938 %	0,001 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bumi Raya	%	190.233.000	100	30.502.000	16.0	16,034 %	0,002 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	5.981.805.248	100	823.053.186	13.8	13,759 %	0,001 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Bungku Barat									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	315.821.650	75	0	0	0 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Barat	%	149.897.750	10	16.503.000	5	11,01 %	0,005 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kecamatan Bungku Barat	%	151.115.500	100	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Barat	%	12.700.000	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	3.877.943.090	100	565.623.882	16,73	14,586 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Bungku Pesisir									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	7.800.000	75	7.800.000	0	100 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Pesisir	%	419.762.360	10	55.660.000	7.10	13,26 %	0,007 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Pesisir	%	15.540.000	100	0	0	0 %	0 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	123.025.000	100	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Pesisir	%	3.420.000	100	6.840.000	100	200 %	0,01 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	3.475.818.051	100	956.240.441	28.28	27,511 %	0,003 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Bungku Selatan									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	5.700.000	79	0	0	0 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Selatan	%	580.931.100	10	57.480.000	9,89	9,894 %	0,009 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Selatan	%	0	100	0	0	0 %	0 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Selatan	%	80.630.000	100	12.345.000	14,94	15,311 %	0,001 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	4.270.812.104	100	1.218.383.196	24,35	28,528 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Bungku Tengah									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	856.418.560	78.50	4.100.000	0,48	0,479 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Tengah	%	43.335.750	100	6.635.750	15,31	15,312 %	0,002 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Tengah	%	0	0	0	0	0 %	0 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Tengah	%	0	0	0	24,46	0 %	∞ %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	10.670.406.433	100	2.687.691.273	25,19	25,188 %	0,003 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0001	Kelurahan Bungi									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	%	638.489.210	100 (APBD)	103.477.960	16	16,207 %	16 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan	%	361.142.250	100 (APBD)	29.521.040	8	8,174 %	8 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0002	Kelurahan Lamberea									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA APBD KELURAHAN LAMBEREA	%	718.019.672	100 (APBD)	77.435.880	10,78	10,785 %	10 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	%	281.954.535	100 (APBD)	34.523.820	12,24	12,244 %	12 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0003	Kelurahan Matano									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada APBDKelurahan dan APBDesa	%	655.819.103	100 (APBD)	17.436.000	2,65	2,659 %	2 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	%	344.178.560	100 (APBD)	64.348.050	18,6	18,696 %	18 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0004	Kelurahan Marsaole									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Tengah	%	730.379.300	100 (APBD)	117.734.800	16,11	16,12 %	16 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	%	269.620.700	100 (APBD)	80.619.600	29,90	29,901 %	29 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0005	Kelurahan Tofoiso									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan Tofoiso	%	611.608.328	100 (APBD)	38.360.000	6,27	6,272 %	6 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	388.387.524	100 (APBD)	20.275.000	5,22	5,22 %	5 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.06.0006	Kelurahan Mendui									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Tengah	%	620.409.710	100 (APBD)	66.781.000	10,76	10,764 %	10 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	%	379.590.290	100 (APBD)	29.789.900	7,85	7,848 %	7 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Bungku Timur									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	%	723.956.450	78	0	0	0 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Timur	%	67.272.000	10	28.180.000	42	41,89 %	0,042 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	1.181.452.941	100	0	0	0 %	0 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Timur	%	23.280.000	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	2.951.725.960	100	408.752.659	14	13,848 %	0,001 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Menui Kepulauan									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	13.500.000	75.00	0	0	0 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Sombori Kepulauan	%	176.214.500	10	0	0	0 %	0 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Menui Kepulauan	%	41.000.000	100	0	0	0 %	0 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kecamatan Menui Kepulauan	%	662.514.650	100	0	0	0 %	0 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Menui Kepulauan	%	89.300.000	100	0	0	0 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	6.772.072.885	100	1.140.964.099	0	16,848 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.08.0007	Kelurahan Ulunambo									
7.01	KECAMATAN									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kenaikan Indeks Desa Membangun	%	646.546.728	75 (APBD)	73.600.000	11,38	11,384 %	14,667 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan	%	353.453.164	90 (APBD)	40.849.000	11,56	11,557 %	12,222 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wita Ponda									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN	%	830.837.597	75	0	0	0 %	0 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Wita Ponda	%	63.022.500	100	25.472.500	60	40,418 %	0,006 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	5.670.867.767	100	457.068.690	57	8,06 %	0,006 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Sombori Kepulauan									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	%	489.971.550	75	0	0	0 %	0 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Sombori Kepulauan	%	280.993.000	10	22.250.000	7,91	7,918 %	0,007 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Sombori Kepulauan	%	0	0	0	0	0 %	0 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	0	0	0	0	0 %	0 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Sombori Kepulauan	%	54.000.000	100	0	0	0 %	0 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	9.432.302.195	100	646.823.132	6,85	6,858 %	0,001 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah									
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	%	0	100	0	7,22	0 %	0,001 %	
		Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	%	1.523.232.750	100	109.982.000	7,22	7,22 %	0,001 %	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik.	%	36.819.614.036	100	136.665.200	0,37	0,371 %	0 %	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase pengurus Ormas yang aktif	%	321.986.900	78.00	52.637.140	16,35	16,348 %	0,002 %	

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
				Pagu APBD	Kinerja RENSTRA	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Predikat
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan.	%	727.851.960	40.00	96.659.100	13,52	13,28 %	0,003 %	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah Rawan Konflik	%	17.620.242.000	88.00	97.269.000	0,55	0,552 %	0 %	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	%	4.528.272.097	100	982.121.179	21,69	21,689 %	0,002 %	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									

Berdasarkan tabel 2.17 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja perangkat daerah masih sangat rendah hal ini disebabkan antara lain karena proses pelaksanaan penyerapan anggaran perangkat daerah yang masih tergolong rendah sehingga dapat mempengaruhi capaian indikator kinerja program, kegiatan maupun sub kegiatan pada perangkat daerah. Selain itu proses pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi yang belum optimal sehingga dapat mempengaruhi penyerapan anggaran di beberapa perangkat daerah. Dengan demikian diharapkan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan penyerapan anggaran di masing-masing perangkat daerah.

2.5. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil capaian pembangunan dan evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 sampai dengan semester I, maka ditetapkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Prioritas I Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme, penetapan prioritas ini dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjawab tujuan pembangunan daerah Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata dengan indikator Menurunnya Angka Kemiskinan, Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin dengan Indikator Indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Gini Ratio, seperti kita ketahui bahwa hasil evaluasi berdasarkan target RKPD semua indikator telah mencapai target bahkan melebihi realisasi, namun demikian tetap menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah daerah hal ini untuk menjadikan Kabupaten Morowali Zero kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, hingga saat ini berdasarkan SK Bupati Morowali

Nomor : 100.3.3.2/KEP.0083/Bappelitbangda/2024 hasil validasi jumlah miskin Ektrem Kabupaten Morowali sebanyak 688 Jiwa.

2. Prioritas II yaitu Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja, penetapan prioritas ini dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjawab tujuan pembangunan daerah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dengan indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kenaikan PAD, Nilai Investasi, Indeks Kesehatan, Stunting dan Indeks Pendidikan. Dari semua indikator tersebut diatas, ada beberapa yang menjadi catatan berdasarkan hasil evaluasi dan perlu dilakukan upaya oleh pemerintah daerah antara lain :

- Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi tapi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal karena pertumbuhan hanya terjadi pada sector pertambangan dan penggalian maupun industri pengolahan.
- Inflasi yang mengalami peningkatan baik secara year to year maupun month to month sehingga dapat mengakibatkan kurangnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan persentase secara umum mengalami penurunan namun berdasarkan jiwa pada tahun 2023 TPT mengalami peningkatan sebesar 2.077 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 1.799, selain TPT yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan pada tahun 2023.

- Indeks Pendidikan, indikator ini masih belum mencapai target RPKD berdasarkan hasil evaluasi hal ini berdampak pada Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali sampai dengan tahun 2023 baru mencapai 9 tahun atau belum menuntaskan wajib belajar 12 tahun, dan rata-rata lama sekolah masih setara D-1.
3. Prioritas III yaitu Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar, penetapan prioritas ini dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjawab tujuan pembangunan daerah Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata,
4. Prioritas IV yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, penetapan prioritas ini dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjawab tujuan pembangunan Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dimana beberapa indikator belum mencapai target antara lain :
- Indeks Reformasi yang masih berada pada angka CC sehingga perlu upaya yang keras dari pemerintah daerah untuk meningkatkan Nilai IRB Kabupaten Morowali
 - Nilai Sakip Pemerintah Daerah masih pada poin CC sehingga diperlukan pula upaya oleh pemerintah daerah untuk menaikkan nilai SAKIP Pemda dari semua komponen Penilaian yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum mencapai bobot maksimal.
 - Indeks Profesionalitas ASN masih sangat rendah dan mengalami penurunan pada tahun 2022 jika dibandingkan pada tahun 2021. Hal ini juga terjadi penurunan komponen Kinerja Pegawai, walaupun kenaikan TPP secara signifikan

namun belum berdampak terhadap peningkatan Kinerja ASN.

- Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) yang masih berada pada angka 71,68 atau masih dalam kategori Waspada.
- 5. Prioritas V Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana, penetapan prioritas ini dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjawab tujuan pembangunan Menciptakan Tataan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah, yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana kabupaten Morowali yang masih sangat tinggi dan indeks desa membangun yang masih rendah, sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menangani hal ini.
- 6. Prioritas IV yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024 untuk menjawab prioritas ini berkaitan dengan tingginya angka kriminalitas menginta kabupaten Morowali yang setiap harinya jumlah penduduk mengalami peningkatan secara signifikan

2.6. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.4.1 Urusan Pendidikan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Aspek keterjangkauan dan aksesibilitas kewilayahan terutama pada daerah terpencil dan terisolir.
2. Distribusi dan jumlah sebaran guru yang tidak merata.
3. Kesiapan anak usia sekolah dasar untuk mengikuti pendidikan dasar terutama di pedesaan belum optimal.
4. Kemampuan penyediaan layanan PAUD relatif masih rendah.

5. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, termasuk buku dan peralatan belajar-mengajar.
6. Ketersediaan Guru Berdasarkan Bidang Keahlian

2.4.2 Urusan Kesehatan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana kesehatan belum optimal dan jaringannya masih kurang memadai.
2. Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan
3. Tingginya Angka Stunting
4. Ketersediaan Obat Yang Belum Merata
5. Usia Harapan Hidup masih dibawah usia harapan nasional
6. Angka Kematian Ibu masih tinggi
7. Angka Kematian Bayi masih tinggi
8. Status Gizi balita masih rendah.

2.4.3 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antar Wilayah
2. Belum Optimalnya infrastruktur di sektor pariwisata.
3. Belum Optimalnya ketersediaan air bersih, listrik di daerah kepulauan

2.4.4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya rumah yang kondisinya tidak layak huni.
2. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin termasuk air bersih dan sanitasi.
3. Belum adanya data base lingkungan permukiman perumahan, jamban keluarga, dan air buangan.

2.4.5 Urusan Sosial

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan sosial adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin dan penyandang disabilitas.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai.
3. Terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi PMKS dan Pemberdayaan sosial bagi PMKS.
4. Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS.

2.4.6 Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pengangguran (TPT) dan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA).
2. Belum tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan.
3. Belum tersedianya data yang akurat tentang ketenagakerjaan.
4. Kompetensi tenaga kerja lokal yang masih rendah sehingga masih sulit bersaing dengan tenaga kerja asing.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi;

2.4.7 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal peran serta penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Belum tersedianya pusat pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

2.4.8 Urusan Pangan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pangan adalah sebagai berikut :

1. Masih Banyaknya desa rawan pangan di sebabkan oleh akses pangan dan ketersediaan pangan.
2. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, dan berimbang.
3. Rendahnya kemampuan daya beli disebabkan kemiskinan khususnya di wilayah kepulauan.

2.4.9 Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Jumlah armada kebersihan tidak sebanding dengan jumlah perkembangan penduduk
2. Ketersediaan TPA dan TPS yang belum sebanding dengan jumlah desa dan volume sampah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan segala fasilitas sarana prasarana persampahan.
4. Tidak adanya teknologi pengelolaan sampah/limbah yg dihasilkan masyarakat.

2.4.10 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan dokumen administrasi kependudukan (KTP-El, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Nikah) belum memadai yakni jaringan yang sering terganggu, server (alat perekam) perlu perawatan setiap tahunnya serta mobil pelayanan Adminduk.

2. Gedung Kantor yang tidak memadai untuk mendukung proses pelayanan diantaranya ruangan perekaman dan data yang kurang representatif.

2.4.11 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah sebagai berikut :

1. BUMDES yang sudah terbentuk belum berjalan optimal.
2. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat.
3. Belum optimalnya pemberdayaan desa baik perencanaan maupun pengawasan dalam menggunakan dana desa.
4. Indesk desa membangun yang amsih rendah.

2.4.12 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Belum mencukupinya tenaga penyuluh KB untuk menjangkau seluruh wilayah penduduk Kabupaten Morowali.
2. Peran keikut sertaan KB masih perlu di optimalkan upaya untuk meningkatkan jumlah peserta KB

2.4.13 Urusan Perhubungan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
2. kebutuhan akan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, guradrail dan LPJU yang belum dapat optimal dipenuhi
3. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan berlalu lintas.

2.4.14 Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Koperas, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan dan pertanian (agribisnis) yang di kelola oleh koperasi masih sangat terbatas.
2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.
3. Terbatasnya akses modal dan informasi pasar
4. Masih minimnya pendampingan bagi UKM dan Koperasi
5. Masih terbatasnya koneksi UKM dengan kawasan perindustrian
6. Belum optimalnya sarana bagi UKM dan koperasi

2.4.15 Urusan Penanaman Modal

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan perizinan yang belum menggunakan sistem informasi teknologi
2. Sarana dan prasarana dalam menjalankan pelayanan perizinan belum memadai seperti ruang pelayanan dan perangkatnya.
3. Penanaman investasi pada kecamatan di luar lingkaran tambang belum maksimal.
4. Promosi potensi serta keunggulan daerah yang belum berjalan optimal.

2.4.16 Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Minat dan Kemauan dikalangan Pemuda dalam Kegiatan Organisasi

2. Kurangnya Minat dan Kesadaran kalangan pemuda dalam ikut serta kegiatan sosialisasi
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga
4. Pembinaan olahraga yang belum berjalan optimal.

2.4.17 Urusan Perpustakaan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Tingginya minat baca masyarakat namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti masih kurangnya gedung perpustakaan, literatur bacaan, serta ruang baca yang nyaman.
2. Aksesibilitas dalam pelayanan perpustakaan desa sangat sulit di jangkau.
3. Pelayanan pengunjung serta pengadministrasian buku belum berbasis informasi teknologi.

2.4.18 Urusan Kelautan Dan Perikanan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana prasarana perikanan bagi para nelayan maupun kelompok nelayan.
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian
3. Sarana prasarana perikanan yang belum berbasis teknologi atau belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
4. Keterbatasan modal usaha bagi para pelaku usaha perikanan.
5. Jaringan pemasaran dan produk perikanan masih kurang
6. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan

2.4.19 Urusan Pariwisata

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur pariwisata pada Destinasi Wisata sebagian besar belum tersedia.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta membantu mengembangkan objek wisata.
3. Belum optimalnya penarikan retribusi pada objek wisata.

2.4.20 Urusan Pertanian

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian
2. Modal usaha yang dimiliki oleh para petani belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Adanya alih fungsi lahan pertanian yang produktif.
4. Sarana prasarana pertanian yang belum memadai dan belum terdistribusi secara merata.
5. Masih kurangnya intensifikasi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna
7. Jaringan pemasaran produk pertanian masih kurang

2.4.21 Urusan Perdagangan

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

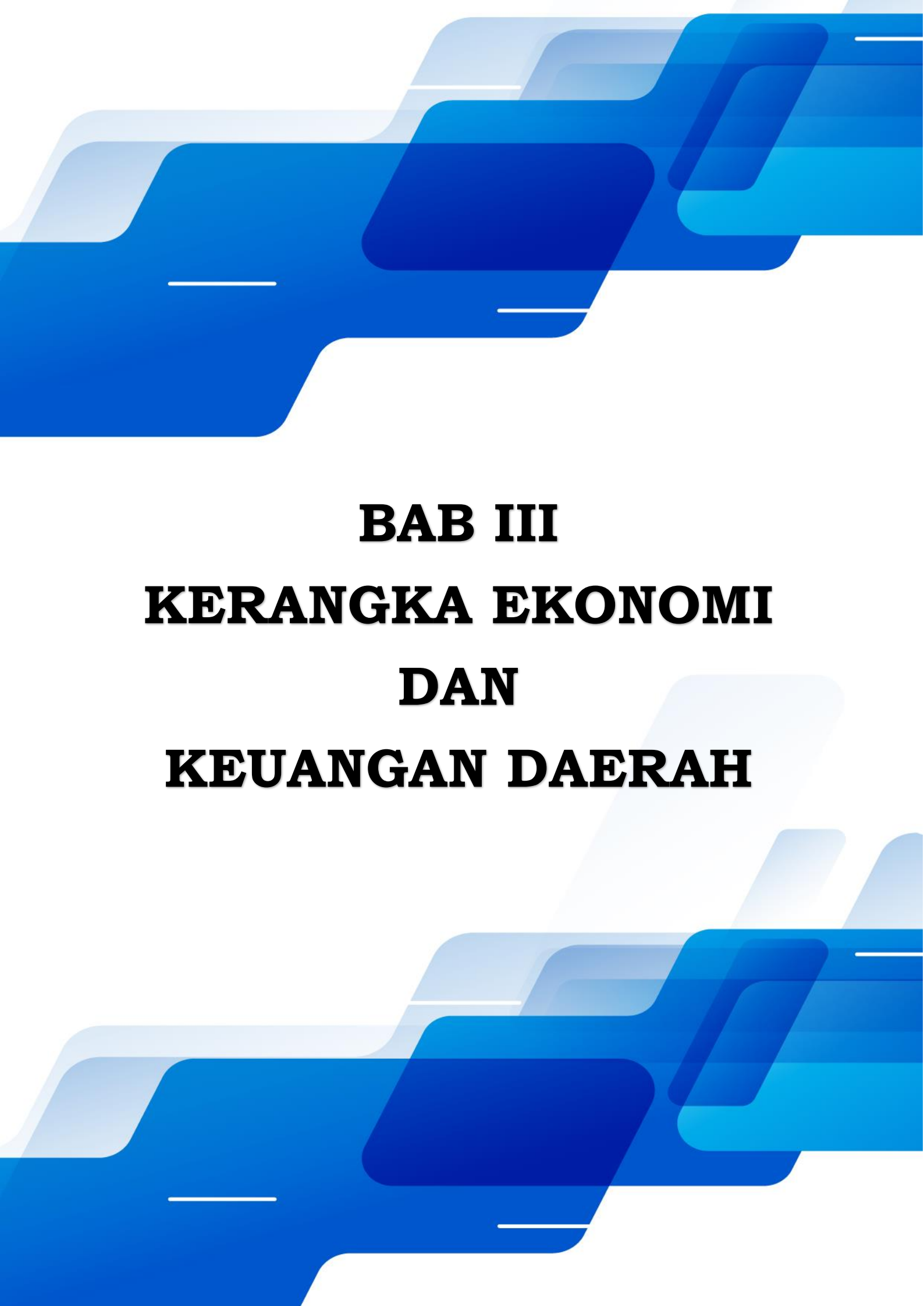
1. Masih rendahnya tata kelola perdagangan yang mengakibatkan rantai distribusi barang menjadi panjang
2. Sulitnya mengontrol peredaran barang keluar masuk daerah
3. Sulitnya mengawasi barang kadaluarsa dan tidak berizin di daerah-daerah yang jauh dari ibukota
4. Masih rendahnya fasilitas penunjang untuk pemenuhan kriteria pasar tradisional modern kabupaten

2.4.22 Urusan Perindustrian

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keterampilan manajemen usaha pelaku industri kecil dan menengah (IKM)

- 
2. Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna pelaku IKM.
 3. Masih rendahnya inovasi pelaku IKM dalam menembus pasar lokal dan regional.
 4. Masih rendahnya kerjasama antara pelaku IKM dengan industri besar yang ada.
 5. Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya alam pertanian dan kelautan Kab. Morowali sebagai bahan baku industri.

The background of the page is decorated with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue. These shapes, which resemble stylized chevrons or steps, are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, primarily concentrated in the top and bottom portions of the page.

BAB III

KERANGKA EKONOMI

DAN

KEUANGAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kabupaten Morowali untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (rasio gini). Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2024.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

3.1.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Data PDRB dapat menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki. Kondisi perekonomian Kabupaten Morowali saat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya. Kondisi ini ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, serta terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

Nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali pada Tahun 2019 sebesar Rp 34.085,70 miliar, meningkat hingga Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 43.947.504,40 juta dan ditahun 2022 nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp 70.515,62 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp 84.987,23 miliar. Dalam periode Tahun 2019-2023 pertambahan nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali sebesar Rp. 50.901,53 miliar. Data perkembangan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Nilai Sektor PDRB ADHK 2010 Tahun 2019-2023
Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun (%) – KONSTAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.437,27	1.397,64	1.442,50	1.468,63	1.464,38
B	Pertambangan dan Penggalan	7.676,33	10.317,36	12.701,49	14.888,97	16.985,39
C	Industri Pengolahan	21.289,18	28.893,19	35.981,45	47.464,37	59.604,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	1,71	1,76	1,96	2,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,94	3,94	4,30	4,40	4,48
F	Konstruksi	2.244,40	1.916,34	3.266,30	4.396,97	4.500,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	620,63	589,75	642,84	1.042,81	1.096,93
H	Transportasi dan Pergudangan	56,73	40,63	122,65	308,79	326,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,53	13,00	14,85	23,20	27,13
J	Informasi dan Komunikasi	182,45	195,38	214,59	265,16	282,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	106,95	121,10	130,65	138,39	138,79
L	Real Estat	107,00	107,16	111,20	143,15	172,06
M,N	Jasa Perusahaan	2,37	2,34	2,37	2,71	2,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	152,35	153,98	161,05	156,22	160,14
P	Jasa Pendidikan	85,32	85,17	85,80	86,21	90,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,72	68,12	70,88	72,45	77,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	40,88	40,70	46,56	51,24	50,60
Produk Domestik Regional Bruto		34.085,70	43.947,50	55.001,24	70.515,62	84.987,23

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai sektor lapangan usaha terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan dengan nilai sebesar Rp. 59.604,08 miliar, setelah itu Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar Rp. 16.985,39 miliar, serta Sektor Konstruksi sebesar Rp. 4.500,53 miliar. Ketiga sektor tersebut mencapai total Rp. 81.090,00 miliar, atau sebesar 95,41 persen. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp. 2,15 miliar dan Sektor

Jasa Perusahaan Rp. 2,99 miliar, serta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp. 4,48 miliar.

Sementara itu, di sisi PDRB ADHB juga mengalami peningkatan dalam kurun Tahun 2019-2023. Nilai PDRB ADHB Tahun 2019 sebesar Rp 45.244,72 miliar, dan meningkat terus hingga Tahun 2023 menjadi sebesar Rp 158.545,44 miliar. Data PDRB ADHB terdapat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Nilai Sektor PDRB ADHB Tahun 2019-2023
Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun (Rp) – BERLAKU				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.063,37	2.023,94	2.147,50	2.346,57	2.444,30
B	Pertambangan dan Penggalian	8.242,67	11.364,64	18.404,88	25.349,78	28.114,26
C	Industri Pengolahan	29.346,70	43.380,51	70.356,85	107.299,77	114.926,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,73	1,70	1,90	2,13	2,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,24	5,46	5,82	6,17	6,42
F	Konstruksi	3.480,35	3.096,96	5.543,21	7.880,45	8.490,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	960,77	949,45	1.065,44	1.832,17	1.996,08
H	Transportasi dan Pergudangan	81,34	59,90	183,05	496,71	546,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,35	19,04	22,75	39,19	546,10
J	Informasi dan Komunikasi	221,71	234,25	260,05	322,97	344,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	156,37	168,16	191,63	222,62	226,35
L	Real Estat	145,54	148,42	151,95	201,46	261,38
M,N	Jasa Perusahaan	3,77	3,74	3,82	4,40	5,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	254,34	261,51	278,72	277,91	293,12
P	Jasa Pendidikan	119,10	120,36	121,85	127,42	134,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,83	87,84	97,66	100,19	111,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	59,56	59,73	79,73	89,43	96,57
Produk Domestik Regional Bruto		45.244,7 2	61.985,6 3	98.916,8 1	146.599,3 2	158.545,4 4

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Melihat data Tabel 3.2 di atas menjelaskan PDRB ADHB Kabupaten Morowali, dapat diketahui nilai sektor lapangan usaha terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp114.926,06 miliar, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp28.114,26 miliar, serta Sektor

Konstruksi sebesar Rp8.490,79 miliar. Ketiga sektor tersebut jika ditotal mencapai sebesar Rp151.531,11 miliar atau sebesar 95,58 persen. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp2,38 miliar dan Sektor Jasa Perusahaan Rp5,05 miliar serta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai sebesar Rp6,42 miliar. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp2.444,30 miliar. Selanjutnya melihat data pada Tabel 2.23 di bawah, diketahui sektor yang berpengaruh besar dalam memajukan perkenomian Kabupaten Morowali. Yakni 2 (dua) sektor yang dominan yakni Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan dan Penggalan dengan kontribusi masing-masing sebesar 72,49 persen dan 17,73 persen, kemudian Sektor Kontruksi sebesar 5,36 persen. Serta Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,54 persen, menurun sangat signifikan. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian dan tenaga kerja pada sektor tersebut.

Kondisi perekonomian dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2024 yang diharapkan makin membaik. Adapun target dan proyeksi PDRB di tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

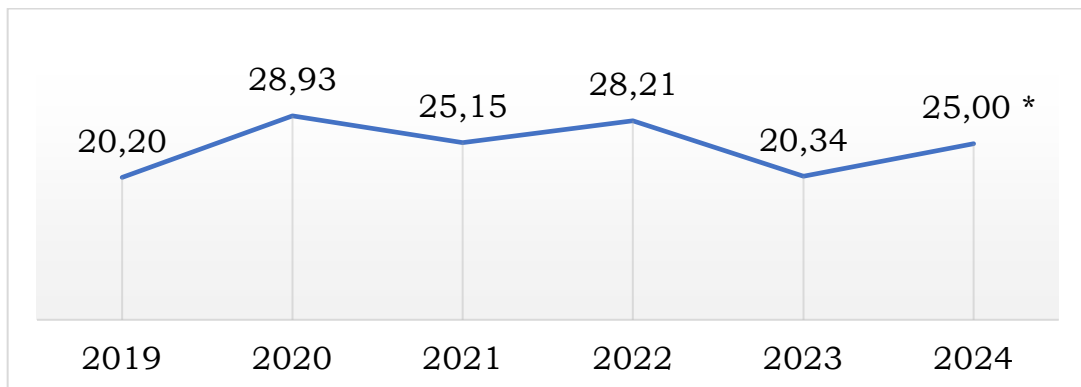
Tabel 3.3
Perubahan Target Indikator Makro Nilai PDRB ADHK dan ADHB
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD	Target RKPD Perubahan
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (juta)	75.000	75.000
2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (juta)	150.000	150.000

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Indikator makro lainnya yang digunakan untuk melihat kinerja nyata ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* bagi proses pembangunan di suatu wilayah melalui perluasan kesempatan kerja,

meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.1
Perkembangan LPE (%) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023 dan
Proyeksi Tahun 2024

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga konstan 2010, mulai tahun 2019 hingga 2023 selalu mengalami fluktuasi dari ke tahun. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yang menyumbang 24,88 persen. Adapun Target LPE dalam RKPD Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD	Target RKPD Perubahan
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	25,00 – 30,00	25,00

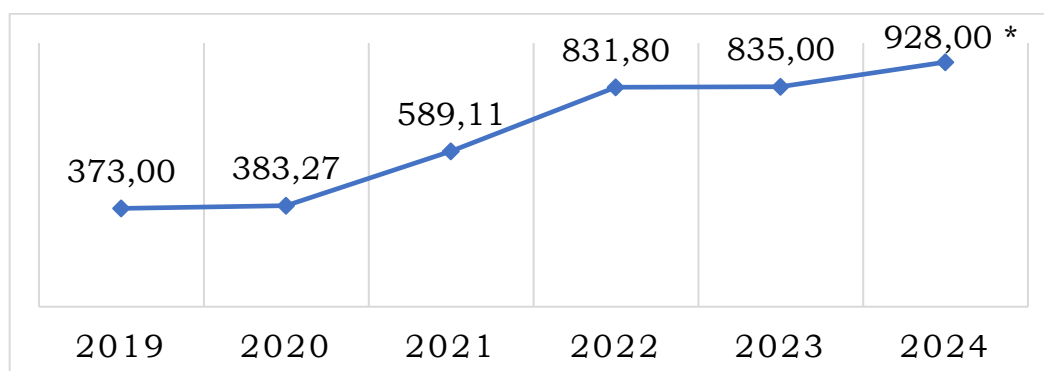
3.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per

Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2018-2022, nilai PDRB per kapita Kabupaten Morowali atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.5). Pada tahun 2018 nilai PDRB perkapita Kabupaten Morowali tercatat sebesar 313,16 juta rupiah sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 831,8 juta rupiah. Di prediksi pada tahun 2023 dan tahun 2024 nilai PDRB Per kapita naik menjadi 835 juta rupiah.

Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini:



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.2
PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2019-2022 dan Prediksi PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2023-2024 (juta rupiah)

Berdasarkan analisis terhadap PDRB Perkaapita yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, mulai tahun 2019 hingga 2023 selalu mengalami penigkatan setiap tahun. Pada tahun 2023, PDRB Perkaapita Kabupaten

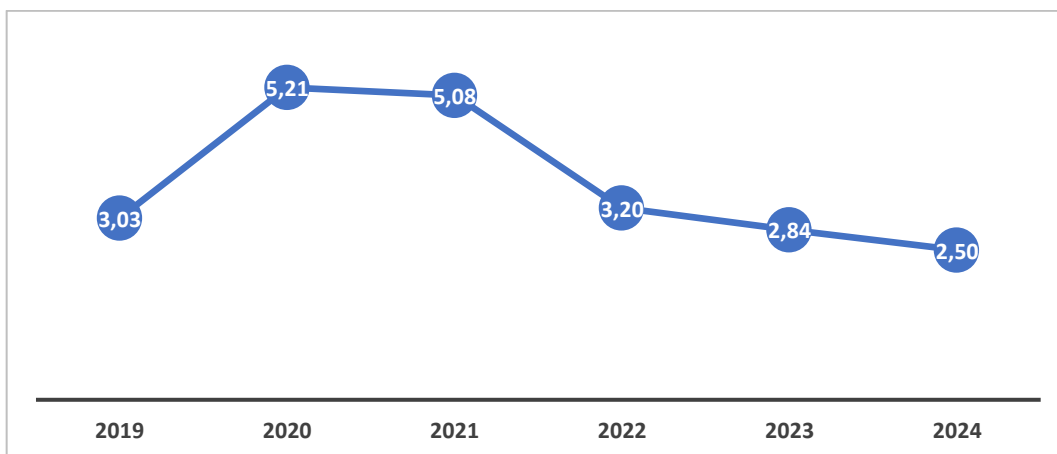
Morowali tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Target PDRB Perkaapita dalam RKPD Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Target Indikator Makro PDRB Perkaapita
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD	Target RKPD Perubahan
1.	PDRB Perkaapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	425,00	498,90
2.	PDRB Perkaapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	835,00	928,00

3.1.4. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Morowali periode 2019-2022 menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat dan selalu berada di bawah TPT Provinsi Sulawesi Tengah maupun TPT Nasional. Angka TPT Morowali mengalami peningkatan menjadi 3,03 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mencapai 5,21 persen. Sejalan dengan proyeksi terjadinya pemulihan ekonomi Kabupaten Morowali, maka diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan pada tahun 2023.



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

*) Tahun 2024 hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Morowali (%) 2018-2022 dan
Proyeksi Tahun 2023-2024

Dengan berbagai upaya pemerintah daerah maka pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,50 persen.

Tabel 3.6
Target Indikator Makro Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

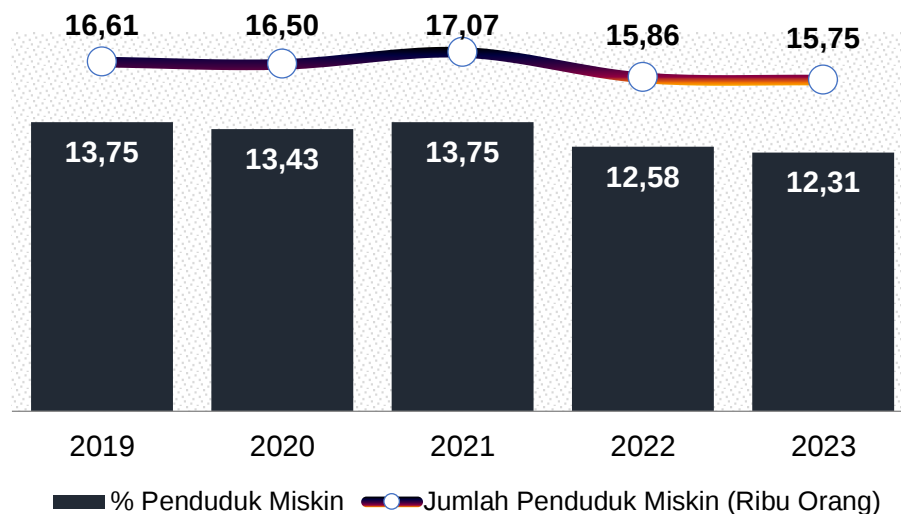
No.	Indikator Makro	Target RKPD	Target RKPD Perubahan
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,00	2,50

3.1.5. Kemiskinan

Penduduk miskin (*poverty people*) merupakan masalah utama yang terjadi di setiap daerah. Sementara itu, pembangunan dimaksudkan sebagai suatu proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata, sehingga mereka keluar dari kondisi kemiskinan. Wujud nyata dari kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup (*basic needs*), yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat (*consumption society*). Oleh karena itu, berbagai upaya dan usaha telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk, melalui peningkatan kinerja perekonomian daerah, maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kemiskinan (*poverty*) adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Perkembangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Gambar 3.4
Jumlah (Ribuan Orang) dan persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

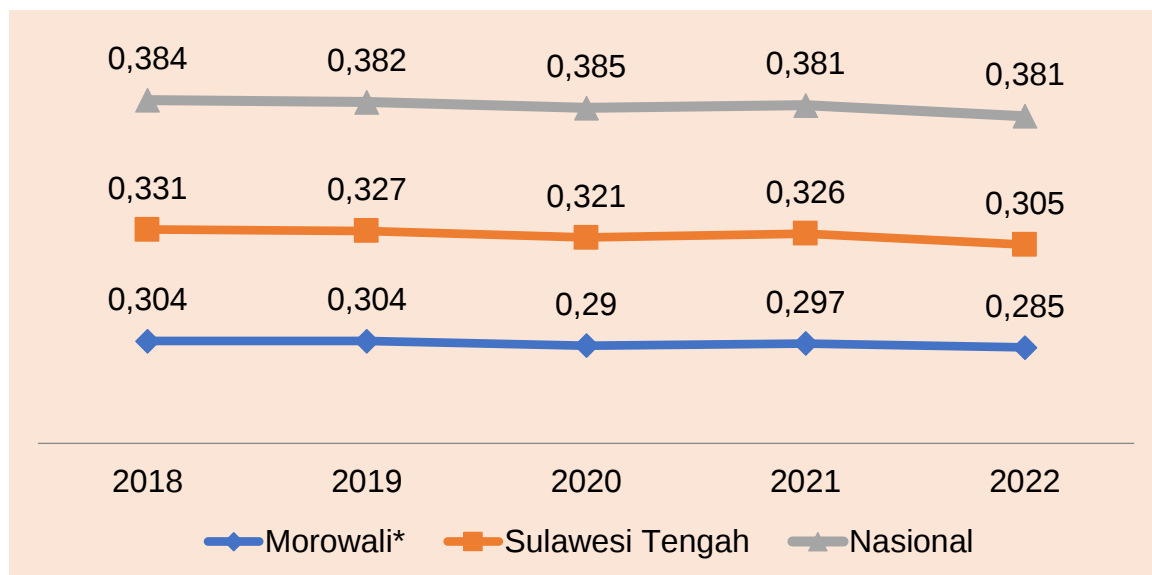
Merujuk pada Gambar 3.4 di atas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali mengalami penurunan kurun Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2019 penduduk miskin Morowali sebesar 13,75 persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin Tahun 2015 sebanyak 17,79 ribu jiwa, dan Tahun 2019 sebanyak 16,61 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali juga menurun sebesar 16,50 ribu jiwa atau sebesar 13,43 persen. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 13,75 persen atau sebanyak 17,07 ribu jiwa. Peningkatan terjadi akibat pandemic covid-19 yang terjadi. Tahun 2022, pandemic sudah dapat dikendalikan, berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang juga meningkat, sehingga penduduk miskin menurun cukup signifikan menjadi 12,58 persen atau sebanyak 15,86 ribu jiwa. Ditahun 2023 penduduk miskin menurun sebesar 12,31 persen atau sebanyak 15,75 ribu jiwa. Adapun Target penduduk miskin dalam RKPD Perubahan Tahun 2024 sebesar 11,30 Persen.

Tabel 3.7
Target Indikator Makro Persentase Penduduk Miskin
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD	Target RKPD Perubahan
1.	Penduduk Miskin Kab. Morowali	12,58 – 12,00	11,30

3.1.6. Ketimpangan Pendapatan

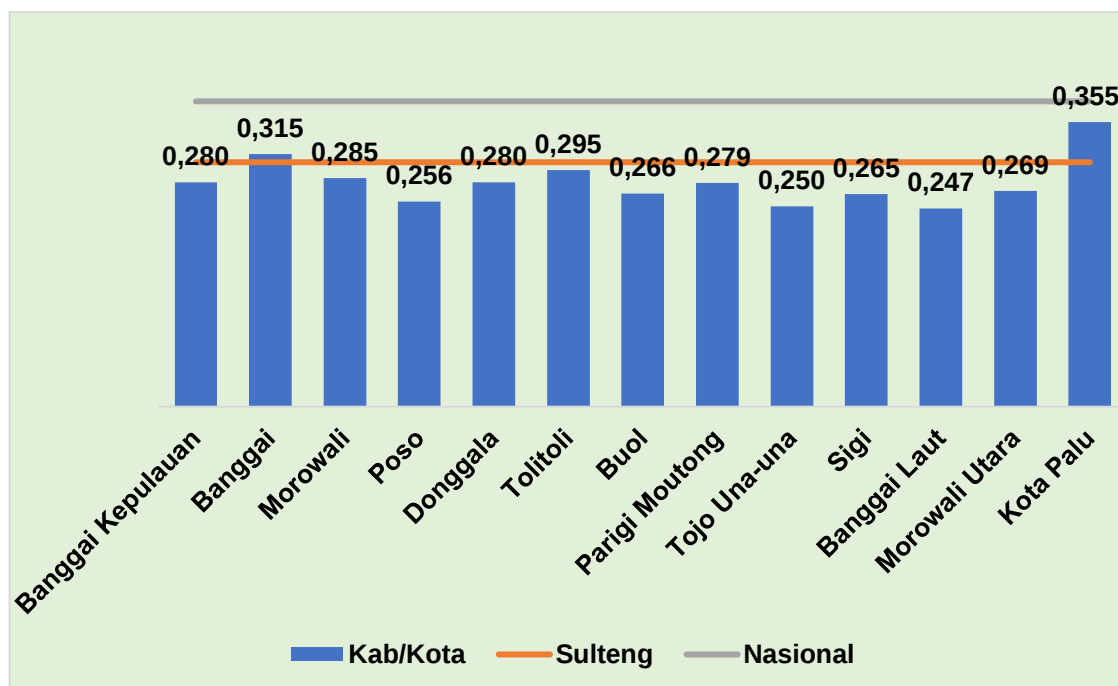
Koefisien Gini atau indeks Gini adalah satu indikator yang dapat digunakan untuk menghitung kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat. Indeks Gini mempunyai nilai dari nol (merata mutlak) hingga 1 (tidak merata mutlak). Indeks Gini dengan nilai nol menunjukkan semua penduduk di wilayah tersebut memiliki pendapatan yang sama. Sementara itu, jika indeks Gini memiliki angka 1. Hal ini menunjukkan semua pendapatan di wilayah tersebut hanya dinikmati oleh 1 (satu) orang penduduk. Dimana, indeks Gini dengan angka nol atau satu adalah hamper tidak pernah terjadi dalam suatu perekonomian hingga saat ini. Sehubungan dengan besarnya angka indeks Gini yang digunakan untuk menentukan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat, maka digunakan kriteria sebagai berikut: jika indeks Gini berada pada: 1). 0 sampai dengan 0,3, maka memiliki tingkat kesenjangan rendah, 2). di atas 0,3 sampai dengan 0,4, maka memiliki tingkat kesenjangan moderat, dan 3). lebih besar dari 0,4 memiliki tingkat kesenjangan tinggi. Data perkembangan indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada Gambar 3.5 sebagai berikut.



Sumber: BPS Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 3.5
Indeks Gini Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Pada Gambar 3.5 di atas disajikan besarnya indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah dan Nasional Tahun 2018-2022. Selama kurun waktu tersebut indeks Gini Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada Tahun 2018 indeks Gini Kabupaten Morowali sebesar 0,304 mengalami penurunan Tahun 2020 menjadi sebesar 0,290. Pada tahun 2022 kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,305 dan rata-rata Nasional sebesar 0,381. Dengan besarnya angka-angka indeks Gini Kabupaten Morowali tersebut masuk dalam range 0-0,30 yakni 0,285, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan rendah. Selanjutnya, jika dilihat menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, indeks Gini Kabupaten Morowali tertinggi keempat. Sedangkan, terendah pertama adalah Kabupaten Banggai Laut dan terendah kedua Kabupaten Tojo Una-Una. Sebaliknya, daerah dengan indeks Gini tertinggi adalah Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Data mengenai perbandingan indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 3.6 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 3.6

Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Adapun Target Indeks Indeks Gini pada RKPD Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target Indikator Makro Indeks Gini pada RKPD Perubahan Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD 2024	Target RKPD Perubahan
1.	Indeks Gini	0,285 - 0,280	0,280

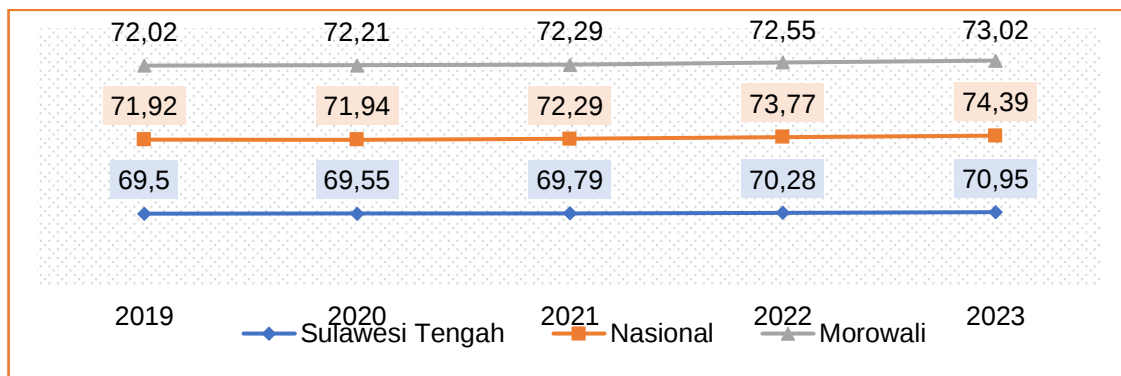
3.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh antara lain pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru Tahun 2014 dan melakukan *backcasting* Tahun 2010. Selanjutnya, IPM merupakan salah satu alat



untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), penge-tahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai mini-mum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali ditunjukkan melalui IPM mengalami peningkatan periode Tahun 2019-2023. Kondisi ini ditunjukkan Tahun 2019 dimana IPM sebesar 72,02, terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi sebesar 73,02. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2023 masuk kategori **tinggi**. Dimana, capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 74,39, sedangkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,95 yang ditampilkan pada Gambar 3.8 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 3.8

IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
dan Nasional Tahun 2019-2023

Selanjutnya untuk perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2023 menunjukan Kota palu dengan IPM tertinggi yakni sebesar 82,52 masuk kategori **sangat tinggi**. Sedangkan, Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Banggai Kepulauan yang disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut ini.

Tabel 3.9
IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah,
dan Nasional Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Banggai Kepulauan	65,13	65,42	65,61	66,08	66,82
2.	Banggai	70,36	70,52	70,6	71,08	71,7
3.	Morowali	72,02	72,21	72,29	72,55	73,02
4.	Poso	71,40	71,28	71,45	71,93	72,48
5.	Donggala	65,49	65,56	65,72	66,25	66,95
6.	Toli-Toli	65,42	65,69	66,3	66,76	67,66
7.	Buol	67,69	67,82	68,25	68,72	69,57
8.	Parigi Moutong	65,47	65,44	65,82	66,26	67,11
9.	Tojo Una-Una	64,52	64,59	64,74	65,54	66,39
10.	Sigi	68,16	68,12	68,49	69,05	69,93
11.	Banggai Laut	65,27	65,43	65,65	66,22	66,93
12.	Morowali Utara	68,45	68,36	68,48	68,97	69,73
13.	Kota Palu	81,50	81,47	81,7	82,02	82,52
14.	Sulawesi Tengah	69,5	69,55	69,79	70,28	70,95
15.	Nasional	71,92	71,94	72,29	73,77	74,39

Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Adapun Target Indeks Indeks Gini pada RKPD Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Target Indikator Makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada RKPD
Perubahan Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Target RKPD 2024	Target RKPD Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,55 - 72,75	74,00

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan (Khusus). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. Sedangkan penerimaan daerah dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya.

Arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Morowali pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 meliputi :

1. Pendapatan Transfer menyesuaikan PMK;
2. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi Tahun anggaran 2024 dan perkembangan PAD sampai dengan bulan Juni 2024, serta prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali maka upaya yang dilakukan pemerintah daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
- c. Sosialisasi pajak/retribusi terhadap wajib pajak
- d. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
- e. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan
- f. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD.
- i. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD.
- j. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
- k. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian, proyeksi total pendapatan daerah diasumsikan bertambah sebesar Rp 184.640.396.451 dimana pada APBD Penetapan sebesar Rp 2.028.965.078.636 menjadi Rp 2.213.605.475.087. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari komponen Pajak Daerah dan komponen Retribusi Daerah, serta kenaikan pada Dana Transfer yakni pada komponen Transfer Antar-Daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan RKPD Tahun 2024 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2024

KOD E	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.028.965.078.636,00	2.213.605.475.087,00	184.640.396.451,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	618.565.103.333,00	797.574.000.000,00	179.008.896.667,00
4.1.1	Pajak Daerah	346.381.103.333,00	495.390.000.000,00	149.008.896.667,00
4.1.2	Retribusi Daerah	203.924.000.000,00	233.924.000.000,00	30.000.000.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	65.860.000.000,00	65.860.000.000,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.401.849.416.127,00	1.407.480.915.911,00	5.631.499.784,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.335.243.090.000,00	1.335.243.090.000,00	0,00
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	66.606.326.127,00	72.237.825.911,00	5.631.499.784,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.550.559.176,00	8.550.559.176,00	0,00
4.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	8.550.559.176,00	8.550.559.176,00	0,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan kebijakan perubahan pendapatan daerah dan adanya kenaikan pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 154.931.052.712, maka secara umum kapasitas kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 339.571.449.163,

dimana pada APBD penetapan sebesar Rp 2.525.423.951.277 menjadi Rp 2.864.995.400.440.

Perubahan kebijakan Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memfasilitasi kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas dan diseimbangkan dengan jumlah pendapatan daerah yang ada, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program strategis daerah. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mendorong pencapaian target pembangunan, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Morowali telah merumuskan kebijakan belanja daerah berdasarkan pagu indikatif kewilayahan dan pagu indikatif sektoral.

Kelompok Belanja mengalami perubahan antara lain : Belanja operasi pada APBD penetapan semula dianggarkan sebesar Rp. 1.646.480.403.014 naik sebesar Rp. 77.683.905.756, Belanja modal semula dianggarkan sebesar Rp. 917.932.641.641 naik sebesar Rp. 275.178.007.305, Belanja Transfer semula dianggarkan sebesar Rp. 265.810.201.133 naik sebesar Rp. 17.900.889.666 sedangkan pada Belanja tidak terduga mengalami perubahan atau pergeseran sebesar Rp 31.191.353.564. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.512.361.332.727,00	2.851.932.781.890,00	339.571.449.163,00
5.1	Belanja Operasi	1.568.796.497.258,00	1.646.480.403.014,00	77.683.905.756,00
5.1.1	Belanja Pegawai	645.110.197.979,00	657.084.389.684,00	11.974.191.705,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	795.565.112.309,00	846.875.455.770,00	51.310.343.461,00
5.1.3	Belanja Bunga	1.664.000.000,00	1.664.000.000,00	0,00

KOD E	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	84.610.261.970,00	97.553.057.560,00	12.942.795.590,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	41.846.925.000,00	43.303.500.000,00	1.456.575.000,00
5.2	Belanja Modal	642.754.634.336,00	917.932.641.641,00	275.178.007.305,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00	3.808.646.436,00	(31.191.353.564,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00	3.808.646.436,00	(31.191.353.564,00)
5.4	Belanja Transfer	265.810.201.133,00	283.711.090.799,00	17.900.889.666,00
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	54.915.510.333,00	72.816.399.999,00	17.900.889.666,00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	210.894.690.800,00	210.894.690.800,00	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(483.396.254.091,00)	(638.327.306.803,00)	(154.931.052.712,00)

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan di tahun 2024 dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Proyeksi penerimaan pembiayaan diasumsikan naik sebesar Rp 154.931.052.712 yaitu dari yang semula di APBD Penetapan 2024 sebesar Rp 496.458.872.641 menjadi Rp 651.389.925.353, kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada SILPA. Berikut adalah proyeksi pembiayaan tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2024

KOD E	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	496.458.872.641,00	651.389.925.353,00	154.931.052.712,00
6.1.1	SILPA	496.458.872.641,00	651.389.925.353,00	154.931.052.712,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	13.062.618.550,00	13.062.618.550,00	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	11.562.618.550,00	11.562.618.550,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00

KOD E	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	483.396.254.091,00	637.088.238.311,00	154.931.052.712,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Morowali pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Morowali juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan prioritas dan program pembangunan Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Morowali (P-RKPD) tahun 2024 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2024 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. P-RKPD tahun 2024 ini merupakan bagian dari tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka prioritas pembangunan daerah adalah menajamkan pencapaian tujuan dan sasaran

yang terfokus kepada prioritas strategis yang tercantum dalam arah kebijakan nasional, provinsi Sulawesi Tengah dan RPJPD Kabupaten Morowali 2005 – 2025. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 tidak terlepas dari hasil-hasil capaian pembangunan sampai pada triwulan kedua tahun 2024, memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi terutama yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan yaitu :
 - a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
 - b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
 - c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
 - d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
 - e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
 - f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
 - g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
 - h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
 - i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 telah menetapkan Visi Pembangunan adalah **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 9 (Sembilan) misi pembangunan daerah, yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
 - b. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM;
 - c. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
 - d. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
 - e. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
 - f. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama Manusia sebagai wujud Pembangunan Berkelanjutan;
 - g. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga;
 - h. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital;
 - i. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 telah menetapkan Visi pembangunan adalah **“Morowali Sejahtera Bertumpu pada Agribisnis”** untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 5 (Lima) Misi sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
 - b. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Berkeadilan;
 - c. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Hukum;
 - d. Melaksanakan Penataan Wilayah;
 - e. Meningkatkan Stabilitas Keamanan (*Security*) wilayah

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2024 dirumuskan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata.	1. Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin.
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat; 3. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja; 4. Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah; 5. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan; 6. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan.
3.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.	1. Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4.	Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.	1. Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik; 2. Meningkatnya Kualitas

NO.	TUJUAN	SASARAN
		Penataan Ruang; 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
5.	Menciptakan Tatahan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah.	1. Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis; 2. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan kemajuan pembangunan Desa.

4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Berbagai pendekatan perencanaan sebagaimana arahan nasional dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan antara level pemerintahan (Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional) dapat saling mendukung untuk mencapai pembangunan yang berkualitas. Berangkat dari permasalahan pembangunan, isu strategis pembangunan serta sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Morowali maka dalam menentukan sasaran dan prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali tidak terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan provinsi dan nasional.

4.2.1. Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Untuk mendukung keselarsan pencapaian tujuan pembangunan baik nasional, provinsi maupun kabupaten maka telah ditetapkan 5 (lima) indikator makro yang menjadi sasaran pembangunan setiap daerah. Target indikator makro pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2024

pada P-RKPD Kabupaten Morowali tahun 2024 beberapa indicator mengalami perubahan termuat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024

Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Morowali Tahun 2023	Tareget Tahun 2024			
			Nasional	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali	
					RKPD	P-RKPD
Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	20,34	5,7 – 6,0	13,70 - 15,30	25 - 30	25,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,84	3,6 – 4,3	2,61 - 2,84	3,2-3,0	2,50
Tingkat Kemiskinan	Persen	12,31	6,0 – 7,0	10,30 – 12,26	12,58 – 12,00	11,30
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,03	75,54	71,27 – 71,39	72,55- 72,75	74,00
Gini Ratio	Indeks	0,281	0,360 – 0,374	0,302 – 0,303	0,285- 0,280	0,280

Sumber Data BPS Diolah
Ket. * Angka Sementara

Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Morowali secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	TARGET 2024	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		RKPD	P-RKPD
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata	Angka Kemiskinan			Persen	13,50 - 12,00	11,30
		Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	2 - 1,90	1,90-152
			Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen	0,54 - 0,52	0,52- 0,32
			Gini Ratio	Persen	0,285- 0,280	0,280

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	TARGET 2024	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		RKPD	P-RKPD
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			Persen	6-7	6-7
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	25 - 30	25,00
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	370 - 400	498,90
			Inflasi	Persen	3,00 - 2,00	3,00 - 2,00
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,2-3,00	2,50
		Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	Persen	3,00 - 6,00	3,00 - 6,00
			Nilai Investasi	Rp	65 - 70 Triliun	70-90 Triliun
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	72,55-72,75	74,00
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,40 - 0,43	0,40 - 0,43
			Stunting (SSGI)	Persen	20-17	20-17
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	55,00 - 57,00	55,00 - 57,00
Meningkatkan Pelaksanaan	Indeks Reformasi Birokrasi			Predikat	B	B

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	TARGET 2024	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		RKPD	P-RKPD
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	(IRB)	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	Persen	75,00 - 80,00	75,00 - 80,00
			Nilai Sakip	Nilai	B	B
			Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)		73,7-77,4 (Waspada)	73,7-77,4 (Waspada)
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	32,50 - 37,50	37,50-40
			Nilai SPBE	Nilai	1,53 - 1,75	1,53 - 2,88
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	68,96	68,96
Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			Persen	50-60 (Tidak Baik)	50-60 (Tidak Baik)
		Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	Persen	23,50 - 24,50	23,50 - 24,50
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persen	50,00 - 55,00	50,00 - 55,00

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	TARGET 2024	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		RKPD	P-RKPD
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,54 - 81,00	80,54 - 81,00
Menciptakan Tatahan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah	Indeks Rasa Aman			Indeks	70,00 - 75,00	70,00 - 75,00
		Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis	Angka Kriminalitas	Persen	19,00 - 17,50	19,00 - 17,50
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,00 - 86,50	85,00 - 86,50
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan kemajuan pembangunan Desa	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	Indeks	Level 2	Level 2
			Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6528-0,6178	0,6528-0,6178

4.2.2. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Kabupaten Morowali

Prioritas dan Sasaran dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai berikut :

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasam industry dan talenta global;
2. **Pembangunan Infrastruktur**, melanjutkan pembangunan infratsruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. **Penyederhanaan Regulasi**, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. **Penyederhanaan Birokrasi**, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. **Transformasi Ekonomi**, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima arahan Presiden di atas kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/Prioritas Pembangunan dengan sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.4
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2020 - 2024

No	Prioritas	Sasaran
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
		2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1) Pengembangan Kawasan Strategis
		2) Pengembangan Sektor Unggulan
		3) Pengembangan Kawasan Perkotaan
		4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
		2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
		3) Terpenuhinya layanan dasar
		4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
		5) Terwujudnya pengentasan kemiskinan
		6) Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya

No	Prioritas	Sasaran
		2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
		3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
		4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
		5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
		6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
		2) Meningkatnya konektivitas wilayah
		3) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
		4) Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien
		5) Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan	1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan

No	Prioritas	Sasaran
	perubahan iklim	Iklim
		3) Pembangunan Rendah Karbon
7	Memperkuat stabilitas polhukhamkam dan transformasi pelayanan publik	1) Menguatnya Stabilitas Polhukhamkam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran dan prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024 juga diselaraskan untuk mendukung sasaran dan prioritas yang ditetapkan pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan prioritas yaitu :

1. Penguatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah;
2. Peningkatan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah berbasis kewilayahan yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat;
3. Konektivitas antar wilayah melalui pengembangan dan peningkatan infrastruktur daerah yang dapat memberikan stimulasi tumbuhnya investasi yang lebih berkualitas di daerah;
4. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan;
5. Percepatan Reformasi Birokrasi.

Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 diharapkan mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional. Tahun 2024 juga merupakan tahun awal dari pelaksanaan RPD Kabupaten Morowali tahun 2024–2026 sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan prioritas untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam pencapaian visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025.

Sehingga berdasarkan uraian diatas dan hasil evaluasi kinerja pembangunan di tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Morowali menetapkan prioritas pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstreme;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas;
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana;
4. Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar;
5. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja;
6. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024.

Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Pembangunan kabupaten terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2024 dan Prioritas Kabupaten Morowali Tahun 2024

NASIONAL	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2024 :		
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Ketahanan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Serta Pembangunan Berkelanjutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024 :		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah berbasis kewilayahan yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme
		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Konektivitas antar wilayah melalui pengembangan dan peningkatan infrastruktur daerah yang dapat memberikan stimulasi tumbuhnya investasi yang lebih berkualitas di daerah	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan daya Dukung Lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024

Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Program Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan	Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program pengendalian izin usaha industri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
Kerja	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program pemasaran pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program penyuluhan pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Perikanan Daerah

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Perikanan Daerah
	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Dinas Perikanan Daerah
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan Daerah
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program pengembangan umkm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program perencanaan tenaga kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
	Program penempatan tenaga kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
	Program hubungan industrial	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program pengendalian penduduk	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	(ks)	dan Keluarga Berencana
	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pengembangan kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pengembangan kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pengelolaan permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pembinaan perpustakaan	Dinas Perpustakaan Daerah
	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Dinas Perpustakaan Daerah
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
	Program perekonomian dan pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	SEMUA OPD
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	Program pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program pengelolaan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program pengembangan sumber daya manusia	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat Daerah
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspektorat Daerah
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Semua Kecamatan
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program pelayanan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
	Program pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
	Program pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
	Program pengelolaan profil kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pembe rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program perlindungan perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pembe rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program peningkatan kualitas keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pembe rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pembe rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pemenuhan hak anak (pha)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pembe rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program perlindungan khusus anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pembe rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pengelolaan arsip	Dinas Perpustakaan Daerah
	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Dinas Perpustakaan Daerah
Meningkatkan Infrastruktur	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengembangan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penataan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Program pengelolaan tanah kosong	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Dinas Sosial
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Dinas Perhubungan Daerah
	Program pengelolaan pelayaran	Dinas Perhubungan Daerah
Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
	Program penanganan bencana	Dinas Sosial

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	Program penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Satuan Polisi Pamongpraja
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024	Program penataan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program peningkatan kerja sama desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program administrasi pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Semua Kecamatan
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Semua Kecamatan
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Semua Kecamatan
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Semua Kecamatan
	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

PRIORITAS	PROGRAM	OPD PELAKSANA
	kebangsaan	
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamongpraja

4.3 Telahaan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka perumusan program prioritas daerah tahun 2024 didasarkan pada hasil serap aspirasi masyarakat anggota DPRD dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pembangunan infrastruktur publik (jalan, jembatan, sarana irigasi, sarana kesehatan, pendidikan dll) belum optimal. Fokus pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 pada peningkatan prasarana publik yang menyangkut kebutuhan masyarakat.
- b. Peningkatan IPM terutama pada bidang pendidikan harus lebih fokus dan terarah. Peningkatan rata-rata lama sekolah dengan pendidikan kesetaraan.
- c. Bidang kesehatan utamanya penanganan kesehatan ibu dan bayi serta penanganan gizi buruk dan stunting di masyarakat.
- d. Penanganan kemiskinan lebih fokus dan terintegrasi antar program agar hasilnya lebih maksimal.
- e. Potensi unggulan yang belum dikelola secara optimal. Produk-produk unggulan daerah kita dibiarkan dan tidak ada nilai tambah. Pengeloaan potensi ekonomi ini lebih difokuskan pada pengelolaan produk unggulan, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih fokus dan bersinergi dalam pengelolaan potensi ekonomi.

4.4 Inovasi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu



ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satunya dengan melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Strategi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik/holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah, peranan inovasi daerah sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Inovasi daerah juga menjadi tumpuan untuk mendongkrak daya saing daerah, terutama dalam kompetisi global, perluasan jejaring, pengelolaan sumber daya manusia yang kolaboratif dan menggiring perubahan kepada ekonomi berbasis pengetahuan. Sehingga pada akhirnya inovasi daerah yang dilakukan Kabupaten Morowali akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim pelayanan publik yang ramah, cepat, mudah, akurat, bersih dan transparan. Kabupaten Morowali dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, saat ini tengah bergegas melakukan upaya inovasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Selain itu memperbaiki alur sistem yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat namun tidak mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan cara memangkas jalur birokrasi serta tahapan-tahapan yang ada didalam SOP (*Standard Operating Procedure*) dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dengan pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.7.
Inovasi Pembangunan Daerah

No.	Inovasi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah
1.	Kesejahteraan Guru Kontrak (Kejar Kontrak)	Meningkatkan Kualitas pendidikan guna menciptakan SDM yang	Meningkatnya kualitas pendidikan berdaya saing dan generasi muda yang	▪ Harapan lama sekolah ▪ Rata-rata lama Sekolah	Dinas Pendidikan Daerah
2.	Bank				

No.	Inovasi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah
	Kampus (Bantuan Pendidikan Mahasiswa)	cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa	Imtaq		
3.	Rumah Sendiri (Rumah Sejahtera Mandiri) 50 Juta/Unit	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah
4.	Kesehatan Gratis (BPJS PBI)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	▪ Usia Harapan Hidup ▪ Angka Stunting	Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB
5	Padi Organik	Meningkatkan ketersediaan pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan Pangan Utama	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

The background of the page is decorated with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue. These shapes, which include trapezoids and parallelograms, are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, particularly along the top and bottom edges of the page. The central text is positioned within the white space between these blue elements.

BAB V

RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



BAB V

RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas

Rencana program prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2023, perkiraan kedudukan tahun 2022 dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024-2026. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2024 ini diharapkan telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Morowali dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) ini.

BAB VI
KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek Daya saing Daerah;
3. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1
Matriks Indikator dan Target Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	
			RKPD	P-RKPD
1	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	12,58 – 12,00	11,30
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,03 - 1,90	1,90-1,52
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,54 - 0,53	0,52-0,32
4	Indeks Gini kabupaten	Indeks	0,285-0,280	0,280
5	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6-7	6-7
6	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	25,00 – 30,00	25,00
7	Pendapatan Perkapita (ADHK)	Juta Rp	400,10 - 420,00	498,00
8	Inflasi	Persen	3,00 - 2,00	3,00 - 2,00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,00 - 2,50	2,50
10	Persentase Kenaikan PAD	Persen	1,00 - 2,00	3,00 - 6,00

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	
			RKPD	P-RKPD
11	Nilai Investasi	Triliun	65-70	70-90 Triliun
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,55-72,75	74,00
13	Indeks Kesehatan	Indeks	0,40 - 0,43	0,40 - 0,43
14	Stunting (Nilai SSGI)	Indeks	20 - 17	20-17
15	Indeks Pendidikan	Indeks	55,00 - 57,00	55,00 - 57,00
16	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	B	B
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	Persen	75,00 - 80,00	75,00 - 80,00
18	Nilai Sakip	Nilai	B	B
19	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	73,7 - 77,4	73,7 - 77,4
20	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	32,50 - 37,50	37,50-40
21	Nilai SPBE	Nilai	1,53 - 1,75	1,53 - 2,88
22	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Nilai	WTP	WTP
23	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	71 - 73	71 - 73
24	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	50 - 60	50 - 60
25	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	23,50 - 24,50	23,50 - 24,50
26	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW)	Persen	50,00 - 55,00	50,00 - 55,00
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,54 - 81,00	80,54 - 81,00
28	Indeks Rasa Aman	Indeks	70,00 - 75,00	70,00 - 75,00
29	Angka Kriminalitas	Persen	19,00 - 17,50	19,00 - 17,50
30	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,00 - 86,50	85,00 - 86,50
31	Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten	Indeks	174 - 173,50	174 - 173,50
32	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	Indeks	Level 2	Level 2
33	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6528 - 0,6178	0,6528 - 0,6178

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Tabel 6.1 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.

Indikator kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Morowali secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ada beberapa indikator yang digunakan yaitu diantaranya Penurunan Tingkat kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran dan meningkatnya Pendapatan perkapita masyarakat. Untuk lebih jelasnya uraian indikator dan target kinerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.2
Matriks Indikator dan Target Kinerja Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.1.1	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (%)	29,00	25,00
1.1.2	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstandengan Migas (%)	49,00	25,00
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	150.000,00	158.046,43
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	150.000,00	158.046,43
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	75.000,00	84.987,24
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	75.000,00	84.987,24
1.1.7	Laju inflasi (Persen)	3,00	3,00
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)		
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	835,00	928,00
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	425,00	498,90
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	15,00	15,42
1.1.9	Indeks Gini	0,240 - 0,265	0,280
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin		
	- Garis Kemiskinan (000)	525.000,00	568.248,00
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	13,00	15,75

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
	- Persentase Kemiskinan (%)	12,58 – 12,00	11,30
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,00	1,52
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,50	0,32
1.1.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,39 - 75,15	74,00
1.1.12	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	89,00	90,75
1.2.	Kesejahteraan Sosial		
1.2.1	Angka Melek Huruf	100,00	98,91
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,36	9,37
1.2.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,37	13,38
1.2.4	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	69,25	69,37
1.2.5	Balita Gizi Buruk	2,00	2,00
1.2.6	Prevalensi Angka Stunting	20-17	20-17
1.2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	43,00	43,00
1.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,00	63,00
1.2.9	Tingkat pengangguran terbuka	3,00 - 2,50	2,50
1.2.10	Rasio Penduduk yang Bekerja	97,00	97,16
1.2.11	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan		
	- PDRB ADHB	270.000,00	270.000,00
	- PDRB ADHK	130.000,00	130.000,00
1.2.11	Persentase PAD terhadap pendapatan	27,50	32,60
1.2.12	Opini BPK	WTP	WTP
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten		
	- PDRB ADHB	2,00	1,55
	- PDRB ADHK	2,50	2,05
1.2.14	Kontribusi sector Pertanian (Holtikultura) terhadap PDRB Kabupaten		
	- PDRB ADHB	0,05	0,01
	- PDRB ADHK	0,12	0,11
1.2.15	Produksi Tanaman Pertanian		
	- Padi	42.000,00	26.940,00
	- Jagung	2.000,00	684,7
	- Ubi Kayu	4.200,00	3.677,57
	- Ubi Jalar	800,00	648,7
	- Kacang Tanah	60,00	45,07
	- Kacang Kedelai	130,00	352,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
1.2.16	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten		
	- PDRB ADHB	0,50	0,45
	- PDRB ADHK	0,70	0,66
1.2.17	Produksi Tanaman Perkebunan		
	- Kelapa	1.000,00	1.025,95
	- Kelapa Sawit	78.000,00	47.922,95
1.2.18	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	0,06	0,05
	- PDRB ADHK	0,09	0,08
1.2.19	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	18,00	17,29
	- PDRB ADHK	22,00	21,11
1.2.20	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	0,10	0,06
	- PDRB ADHK	0,09	0,07
1.2.21	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	1,20	0,70
	- PDRB ADHK	1,10	0,81
1.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	1,35	1,25
	- PDRB ADHK	1,50	1,48
1.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	72,00	72,77
	- PDRB ADHK	68,00	67,31
1.2.24	Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	3,50	NA
	- PDRB ADHK	2,50	NA
1.2.25	Pertumbuhan Industri	0,03	NA
1.2.26	Nilai ICOR	3,40	3,51
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga		
1.3.1	Seni Budaya		
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	17	17
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1	1
1.3.2	Olahraga		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
	- Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	20	20
	- Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	394	394

2. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator kinerja dalam aspek pelayanan umum yang merupakan gambaran kinerja pelayanan pemerintahan Kabupaten Morowali yang menjadi acuan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang terkait dengan pelayanan umum pemerintahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.3
Matriks Indikator dan Target Kinerja Pelayanan Umum
Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
2	ASPEK PELAYANAN UMUM		
2.1.	Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
2.1.1	Pendidikan		
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini		
	- Rasio Ketersediaan Sekolah Per Murid TK	45,00	45,00
	- Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	14,00	14,00
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,00	100,00
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	100,00	100,00
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	100,00	100,00
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)		
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	100,00	100,00
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	100,00	100,00
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	95,00	95,00
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	75,00	75,00
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	71,00	71,00
2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah		
	- Tingkat SD/MI	99,00	99,00
	- Tingkat SMP/MTs	95,00	95,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	95,00	95,00
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah		
	- Tingkat SD/MI	0,20	0,20
	- Tingkat SMP/MTs	0,10	0,10
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,40	0,40
2.1.1.7	Angka Kelulusan		
	- Tingkat SD/MI	100,00	100,00
	- Tingkat SMP/MTs	100,00	100,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	100,00	100,00
2.1.1.8	Angka Yang Melanjutkan		
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00	100,00
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00	100,00
	- Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	80,00	80,00
2.1.1.9	Fasilitas Pendidikan		
	- Tingkat SD/MI	164,00	164,00
	- Tingkat SMP/MTs	52,00	52,00
	- Tingkat SMA/SMK/MA	26,00	26,00
2.1.1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah		
	- Rasio ketersediaan Sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	0,11	0,11
	- Rasio ketersediaan Sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs	0,08	0,08
	- Rasio ketersediaan Sekolah/penduduk	0,05	0,05

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
	usia sekolah SMA/SMK/MI		
2.1.1.1.1	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	11,50	11,50
2.1.1.1.2	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	13,00	13,00
2.1.1.1.3	Rasio guru/murid per kelas		
	- Tingkat SD/MI	0,15	0,15
	- Tingkat SMP/MTs	0,05	0,05
	- Tingkat SMA/SMK/MA	0,10	0,10
2.1.2.	Kesehatan		
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	0,50	0,50
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,84	0,84
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran Hidup	0,50	0,50
2.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0,25	0,25
2.1.2.3	Rasio posyandu per satuan balita	10,00	11,2
2.1.2.4	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Poskesdes dan pustu per satuan penduduk		
	- Rasio Sarana Kesehatan	0,28	0,28
	- Rasio Puskesmas	0,08	0,08
	- Rasio Poliklinik	0,05	0,05
	- Rasio Pustu	0,17	0,17
2.1.2.5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	0,18	0,18
2.1.2.6	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	0,50	0,77
2.1.2.7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	6,00	9,69
2.1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100,00	100,00
2.1.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00
2.1.2.10	Persentase Balita Yang Pernah diimunisasi campak	100,00	100,00
2.1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
	penyakit TBC BTA (Jumlah)		
2.1.2.1 2	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	450,00	450,00
2.1.2.1 3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100
2.1.2.1 4	Penderita Diare Yang Ditangani	2.000,00	2.858
2.1.2.1 5	Angka kejadian Malaria (Per 100.000 Penduduk)	8,00	8,00
2.1.2.1 6	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,02	0,02
2.1.2.1 7	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0,55	0,55
2.1.2.1 8	Cakupan puskesmas	100,00	100,00
2.1.2.1 9	Cakupan puskesmas Pembantu	20,00	29
2.1.2.2 0	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	85,00	85
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	0,20	0,32
2.1.3.2	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	0,04	0,04
2.1.3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	25,00	25,00
2.1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	75,00	75,00
2.1.3.5	Rasio jaringan Irigasi	0,90	0,90
2.1.3.6	Persentase penduduk berakses air minum	93,00	93,00
2.1.3.7	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	2,50	2,50
2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
2.1.4.1	Rumah layak huni	82,00	82,78
2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat		
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	830,00	830,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	10,00	14,00
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7,00	14,00
2.1.6.	Sosial		
2.1.6.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	51.030,48	52.411,00
2.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	100,00	100
2.1.6.3	Jumlah panti sosial yang menerima program	7,00	7,00
	pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		
2.1.6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100,00	100,00
2.2.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
2.2.1.	Tenaga Kerja		
2.2.2.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (orang)	30,00	38,00
2.2.2.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3	16,00	16,00
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	12,00	10,59
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD	5,00	2,00
2.2.2.3	Rasio KDRT	0,10	0,10
2.2.2.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	39,00	43,15
2.2.2.5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,02	1,03
2.2.2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,95	1,03
2.2.2.7	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,12	1,18
2.2.3.	Ketahanan Pangan		
2.2.3.1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	150,00	235,63
2.2.3.2	Ketersediaan Energi	4.100,00	4.100,00
2.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	85,00	85,00
2.2.5.	Lingkungan Hidup		
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada	Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
2.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada
2.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada
2.2.5.4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.5.5	Penetapan MHA	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2.6.	Kependudukan dan Catatan Sipil		
2.2.6.1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	133.000,00	183.957
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	25.000,00	22.253
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	100,00	100,00
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Ada	Ada
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100,00	100,00
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143,00	143,00
2.2.7.3	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00
2.2.7.4	Posyandu aktif	153,00	153,00
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	5,00	5,05
2.2.8.2	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	88,00	88,00
2.2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	69,00	72,00
2.2.8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,00	25,41
2.2.8.5	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	100,00
2.2.9.	Perhubungan		
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	19.000,00	32.400
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	13,00	36,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
2.2.9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	10,00	3
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	60,00	198
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,35	0,38
2.2.9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun Angkutan Laut		
	- Jumlah Penumpang Turun	9.700,00	11.604,00
	- Jumlah Penumpang Naik	9.800,00	10.692,00
	- Jumlah Barang Bongkar (Ton)	220.000	6.684,00
	- Jumlah barang muat (ton)	510.000	5.964,00
	- Angkutan Udara		
	- Jumlah Penumpang Datang	32.000,00	56.092,00
	- Jumlah Penumpang Berangkat	22.000,00	50.431,00
	- Jumlah Barang Bongkar (Ton)	250.000	450.705
	- Jumlah barang muat (ton)	100.000	280.291
2.2.10.	Komunikasi dan Informatika		
2.2.10.1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	15%	15%
2.2.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	40,00	40,12
2.2.12.	Penanaman Modal		
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	90,00	90
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga		
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)	95,50	95,50
2.2.14.	Statistik		
2.2.14.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Ada	Ada
2.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
2.2.14.3	Buku PDRB	Ada	Ada
2.2.15.	Persandian		
2.2.15.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	15%	15%
2.2.16.	Kebudayaan		
2.2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6
2.2.17	Perpustakaan		
2.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	2,600,00	5.105
2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar		
2.3.1.	Pariwisata		
2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	4.000,00	4.000,00
2.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	3,00	3,00
2.3.2.	Pertanian		
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pertanaian		
	- PDRB ADHB	2,00	1,98
	- PDRB ADHK	2,50	2,01
2.3.2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	0,01	0,01
	- PDRB ADHK	0,11	0,11
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		
	- PDRB ADHB	0,80	0,45
	- PDRB ADHK	0,90	0,66
2.3.2.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		
	- Padi	46,00	4,90
	- Jagung	23,00	4,10
	- Ubi Kayu	290,69	25,544
	- Ubi Jalar	203,95	12,974
	- Kacang Tanah	10,77	1,06
	- Kacang Kedelai	20,82	1,10
	- Kacang Hijau	0,66	1,00
2.3.3.	Kehutanan		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
2.3.3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	37,20	37,20
2.3.4.	Energi dan Sumberdaya Mineral		
2.3.4.1	Rumah tangga pengguna listrik	99,99	99,94
2.3.4.2	Daya Terpasang (Kwh)	43.968.432,00	44.289.732,00
2.3.5.	Perdagangan		
2.3.4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	38.000,00	38.000,00
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan		
2.3.5.1	Produksi Perikanan (ton)		
	Produksi Perikanan Laut (ton)	34.350,00	37.755,00
	Produksi Perikanan Darat (Ton)	3.000,00	3.463,00
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.500,00	34.292,00
2.3.5.2	Konsumsi Ikan Perkapita	58,00	58,00
2.3.5.3	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	1,04	1,04
2.4.	Fokus Layanan Urusan Penunjang		
2.4.1	Perencanaan Pembangunan		
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada
2.4.2	Keuangan		
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
2.4.2.2	Persentase SILPA	1,00	1,00
2.4.2.3	Persentase belanja langsung	80,00	80,00
2.4.2.4	Persentase belanja belanja tidak langsung	20,00	20,00
2.4.2.5	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.4.3	Kepegawan serta Pendidikan dan		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
	Pelatihan		
2.4.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40 orang	40 orang
2.4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	75	75
2.4.4	Penelitian dan Pengembangan		
2.4.4.1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	100
2.4.5	Pengawasan		
2.4.5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100	100
2.4.6	Sekretariat Dewan		
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	Ada
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada	Ada
2.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada

3. Aspek Daya saing Daerah;

Ada beberapa indikator yang dapat mengukur Aspek daya saing daerah salah satunya Fasilitas Wilayah/Infrastruktur untuk lebih jelasnya uraian indikator dan target kinerja Daya Saing Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.4
Matriks Indikator dan Target Kinerja Daya Saing Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2024	
		RKPD	P-RKPD
3	DAYA SAING DAERAH		
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	25,00	25,00
3.1.2	Produktivitas Total Daerah	1.250,00	1.404,47
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	0,05	0,05
3.2.2	Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal per tahun Angkutan Laut		
	- Jumlah Penumpang Turun	10.500,00	11.604,00
	- Jumlah Penumpang Naik	10.500,00	10.692,00
	- Jumlah Barang Bongkar (Ton)	230.000,00	230.000,00
	- Jumlah barang muat (ton)	500.000,00	596.400,00
	Angkutan Udara		
	- Jumlah Penumpang Datang	60.000,00	60.000,00
	- Jumlah Penumpang Berangkat	17.000,00	50.431,00
	- Jumlah Barang Bongkar(Ton)	130.000,00	450.705,00
	- Jumlah barang muat (ton)	60.000,00	280.291,00
3.2.3	Jenis dan jumlah bank dan cabang		
	- Bank Umum	19,00	19,00
	- Bank Perkreditan Rakyat	4,00	4,00
3.2.4	Jumlah Restoran/Rumah Makan		
	- Jumlah Rumah Makan	75,00	253
3.2.5	Jumlah Penginapan/Hotel	40,00	40,00
3.2.6	Persentase RT Berakses Air bersih	92,00	92,00
3.2.7	Rumah tangga pengguna listrik	99,99	99,99
3.3.	Fokus Iklim Berinvestasi		
3.3.1	Angka Kriminalitas	17,00	9,21
3.3.2	Jumlah Demonstrasi	6,00	6,00
3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia		
3.4.1	Tingkat Ketergantungan		
	- Rasio Ketergantungan	43,00	43,00

The background of the page is decorated with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue. These shapes, which include rectangles and trapezoids with rounded corners, are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, particularly along the top and bottom edges of the page. The central text is positioned between these decorative elements.

BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024 terdiri dari dua (2) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Perubahan RKPD Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro, dan dokumen perencanaan yang secara hierarkhis lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen di bawahnya secara operasional. Perubahan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Morowali berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD. Adapun fungsi Perubahan RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi Perubahan RAPBD untuk memastikan Perubahan APBD telah disusun berlandaskan pada Perubahan RKPD dan dokumen Perubahan RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan



melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka Perubahan RKPD dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Selanjutnya untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Menurut tata cara pengendalian tersebut disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi juga mencakup tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Posisi OPD pada tata cara pengendalian ini menjadi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang lebih jauh, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang sangat penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing OPD agar menyempurnakan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.
2. OPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target Perubahan RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2. Kesimpulan

1. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Perubahan RKPD Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan pada Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026.

2. Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam Perubahan RKPD 2024 yaitu : **“Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Ketahanan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Serta Pembangunan Berkelanjutan”**. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD diarahkan pada pencapaian tema tersebut. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan komprehensif. Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Extreme;
 - b. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas;
 - e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana;
 - f. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Mengawal Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024.

Pada akhirnya, untuk melaksanakan seluruh prioritas yang telah ditetapkan tersebut diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing

dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Morowali, 29 Juli 2024

Plh. BUPATI MOROWALI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Yusman Mahbub', with a long horizontal stroke extending to the left.

Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si